



**KRITIK TERHADAP NEOLIBERALISME DI BARAT : KASUS DI
AMERIKA SERIKAT DAN PERANCIS**

*(CRITICS OF NEOLIBERALISM IN THE UNITED STATES OF AMERICA
AND FRANCE)*

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

**ILHAM WAHYUDI
NIM 150910101052**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2020

PERSEMBAHAN

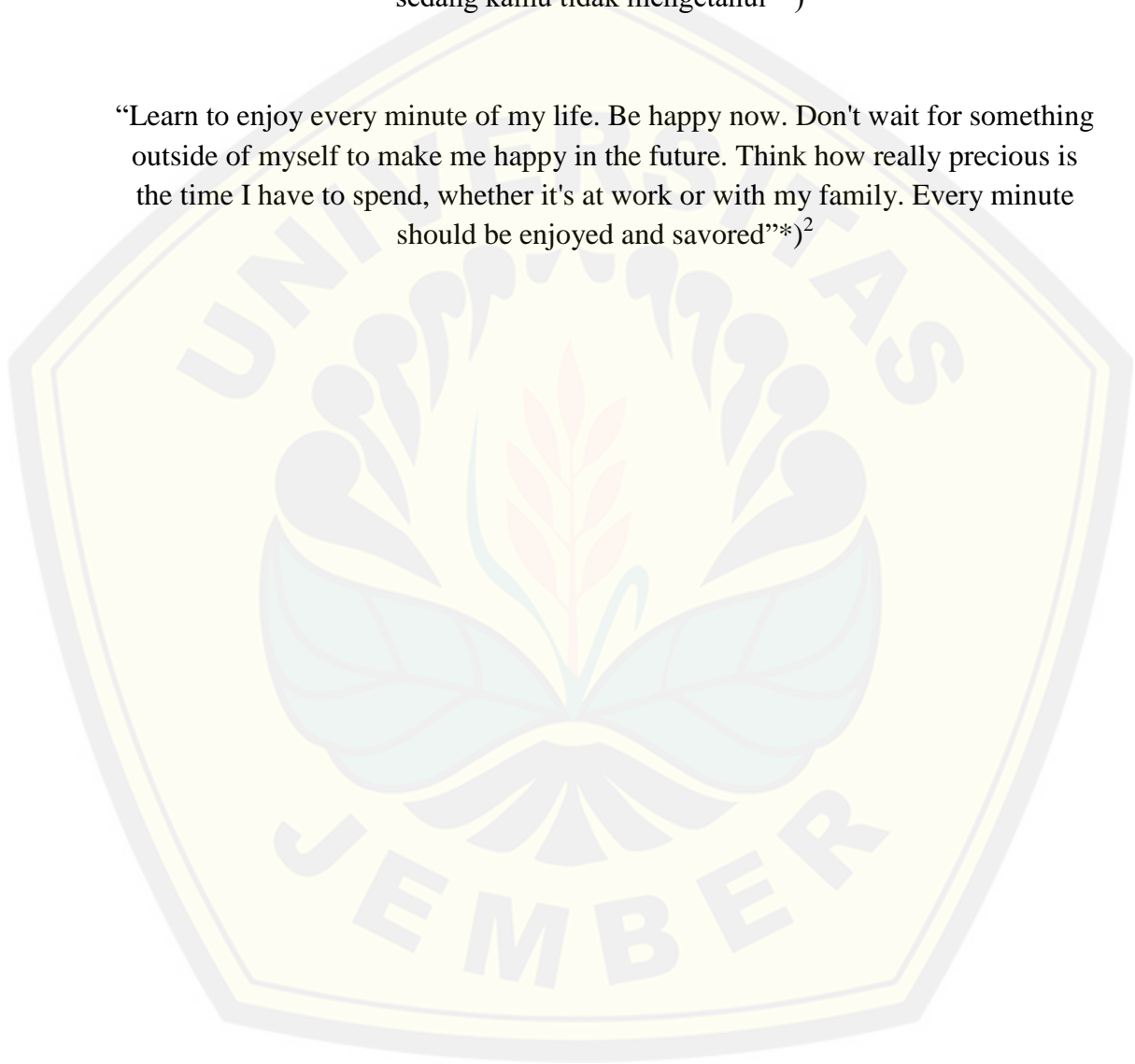
Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Almarhum Ayah Hanafi dan Almarhumah Ibu Mutiah tercinta;
2. Kakak-kakak saya (Siti Fatimah, Heni Imroah dan Ifiatur Rohmi) tercinta;
3. Umik Yuliati Nur Wahyuningsih S.farm, Apt;
4. Pemimpin dan karyawan CV. Natura Prima Farma;
5. Guru-guru saya sejak sekolah dasar sampai perguruan tinggi;
6. Almamater;
7. University Student English Forum;
8. Pembaca.

MOTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”*)¹

“Learn to enjoy every minute of my life. Be happy now. Don't wait for something outside of myself to make me happy in the future. Think how really precious is the time I have to spend, whether it's at work or with my family. Every minute should be enjoyed and savored”*)²



¹ (QS. Al-Baqarah: 216).

² Earl Nightingale. 2019. Life Quotes. <https://www.brainyquote.com/topics/life-quotes>. “Diakses pada” 12 Juni 2019

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham Wahyudi

NIM : 150910101052

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul "Kritik Terhadap Neoliberalisme di Barat Kasus : Amerika Serikat dan Perancis" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 1 April 2020

Yang menyatakan

Ilham Wahyudi

NIM 150910101052

HALAMAN PEMBIMBINGAN

SKRIPSI

**KRITIK TERHADAP NEOLIBERALISME DI BARAT : KASUS
AMERIKA SERIKAT DAN PERANCIS**

Oleh

ILHAM WAHYUDI

NIM 150910101052

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA,Ph.D

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Supriyadi, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Kritik Neoliberalisme di Barat : Kasus di Amerika Serikat dan Perancis” karya Ilham Wahyudi telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Rabu, 1 April 2020

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua,

Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si., Ph.D.
NIP 196802291998031001

Anggota I

Anggota II

Drs. Abubakar Eby Hara, MA., Ph.D.
NIP 196402081989021001

Fuat Albayumi, S.IP., MA.
NIP 197404242005011002

Mengesahkan
Penjabat Dekan,

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP 196106081988021001

RINGKASAN

Kritik Terhadap Neoliberalisme di Barat: Kasus di Amerika Serikat dan Perancis; Ilham Wahyudi; 150910101052; 2020; 85 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pasca krisis finansial tahun 2008, gelombang sentimen terhadap pemberlakuan neoliberalisme di negara-negara Barat semakin meningkat. Peningkatan sentimen ini misalnya ditunjukkan dengan terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS pada Pemilu AS 2016 dan meningkatnya popularitas partai ekstrem sayap kanan Perancis lewat Marine Le Pen pada Pemilu Perancis 2017. Nilai-nilai yang dibawa oleh kedua kandidat ini selama masa kampanye Pemilu dianggap mengkritisi berjalannya neoliberalisme. Padahal di saat neoliberalisme memberikan keuntungan yang relatif lebih besar pada negara-negara maju seperti negara kawasan Barat seharusnya mereka cenderung mendukung sistem neoliberalisme ini. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu penyebab perkembangan sentimen ini bergulir utamanya di negara-negara besar pendukung neoliberalisme seperti AS dan Perancis.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif; deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*) untuk memperoleh data sekunder. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif atas fenomena merebaknya kritik terhadap neoliberalisme di Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu penyebab munculnya sentimen terhadap neoliberalisme di AS dan Perancis adalah akibat kritik yang dilakukan oleh aktor politik populis. Trump dan Marine Le Pen menggunakan nilai-nilai populisme dalam kampanyenya untuk membentuk sebuah dukungan dari pemilih. Lewat pengkaitan gejala dari dampak fenomena neoliberalisme, kedua aktor meraih perhatian yang besar terutama dari pemilih yang mayoritas merasa dirugikan dari berlakunya sistem neoliberalisme.

PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kritik Terhadap Neoliberalisme: Kasus di Amerika Serikat dan Perancis”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA, Ph.D selaku Dosen Pembimbing Utama dan Drs. Supriyadi, M.Si selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, perhatian, dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
2. Honest Dody Molasy S.Sos, MA selaku Dosen Pembimbing Akademik atas dorongan dan bimbingannya selama penulis menjadi mahasiswa;
3. Bapak ibu dosen di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa;
4. Kakak-kakak penulis yang selalu menyemangati penulis dalam setiap perjalanan hidup penulis;
5. Ibu Yulianti dan keluarga yang selalu memberikan dukungan pada penulis;
6. Bapak Imam, Riski dan seluruh karyawan Natura Prima Farma yang selalu membantu penulis selama menjadi mahasiswa;
7. Reza Pasha, Laurent, Fifin, Farit, Alfian, Asmin, Kukuh, Haris, Almer, Fikri yang telah banyak membantu penulis selama menjadi mahasiswa;
8. Sahabat dan teman-teman di USEF, Universitas Jember, dan bapak-ibu International Office Universitas Jember yang banyak berjasa pada penulis selama penulis menjadi mahasiswa;

Dalam penulisan skripsi ini tentu masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 1 April 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSEMBAHAN	i
MOTO	ii
PERNYATAAN	iii
HALAMAN PEMBIMBINGAN	iv
PENGESAHAN	v
RINGKASAN	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	9
1.2.1 Batasan Materi	9
1.2.2 Batasan Waktu	10
1.3 Rumusan Masalah	10
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Kerangka Konseptual	11
1.5.1 Bangkitnya Neoliberalisme dan Reaksi Populis Terhadapnya	11
1.6 Argumen Utama	16
1.7 Metodologi Penelitian	17
1.7.1 Metode Pengumpulan Data	17
1.7.2 Metode Analisis Data	18
1.8 Sistematika Penulisan	18
BAB 2 IDEOLOGI LIBERALISME DAN MANIFESTASINYA DI AMERIKA SERIKAT DAN PERANCIS	20

2.1	Konsep Kebebasan Dalam Liberalisme	20
2.2	Liberalisme Di Amerika Serikat Dan Perancis : Sebuah Komparasi .	22
2.2.1	Liberalisme di Amerika Serikat.....	24
2.2.2	Liberalisme di Perancis	27
2.3	Kemunculan Liberalisme Baru (Neoliberalisme)	31
2.4	Perkembangan Neoliberalisme Di Amerika Serikat Dan Perancis	34
2.4.1	Implementasi Neoliberalisme di Amerika Serikat	36
2.4.2	Implementasi Neoliberalisme di Perancis	38
BAB 3	POPULISME DI AMERIKA SERIKAT DAN PERANCIS.....	42
3.1	Populisme dalam Kritiknya Pada Neoliberalisme.....	44
3.2	Perkembangan Populisme di Amerika Serikat dan Perancis	45
3.2.1	Populisme di Amerika Serikat.....	45
3.2.2	Populisme di Perancis.....	48
BAB 4	PENINGKATAN KRITIK TERHADAP NEOLIBERALISME DI AMERIKA SERIKAT DAN PERANCIS	52
4.1	Marginalisasi Kelompok <i>Blue Collar</i> Sebagai Akibat Pelaksanaan Neoliberalisme.....	53
4.2	Populisme Versus Neoliberalisme pada Masa Kampanye Pemilihan Presiden di AS Tahun 2016 dan Perancis Tahun 2017	56
4.2.1	Kritik Trump terhadap Neoliberalisme dan Ketegasan Sikapnya kepada Populisme	57
4.2.2	Kritik Le Pen terhadap Neoliberalisme dan Ketegasan Sikapnya kepada Populisme	62
	KESIMPULAN.....	72
	DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR TABEL

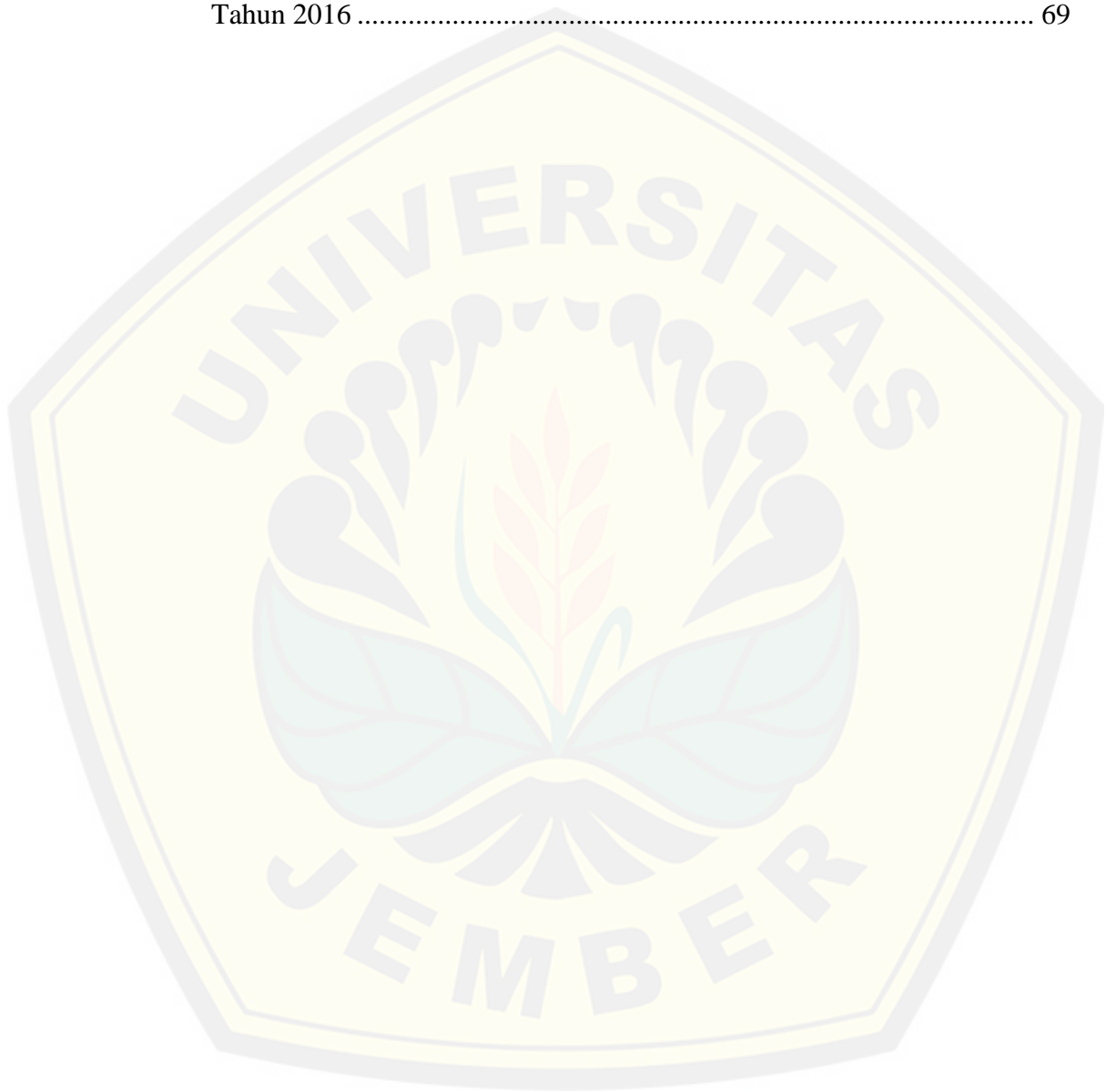
Tabel 4.1 Survey pendapat masyarakat Amerika Serikat terhadap masalah imigran gelap tahun 2010-2016 55



DAFTAR GAMBAR

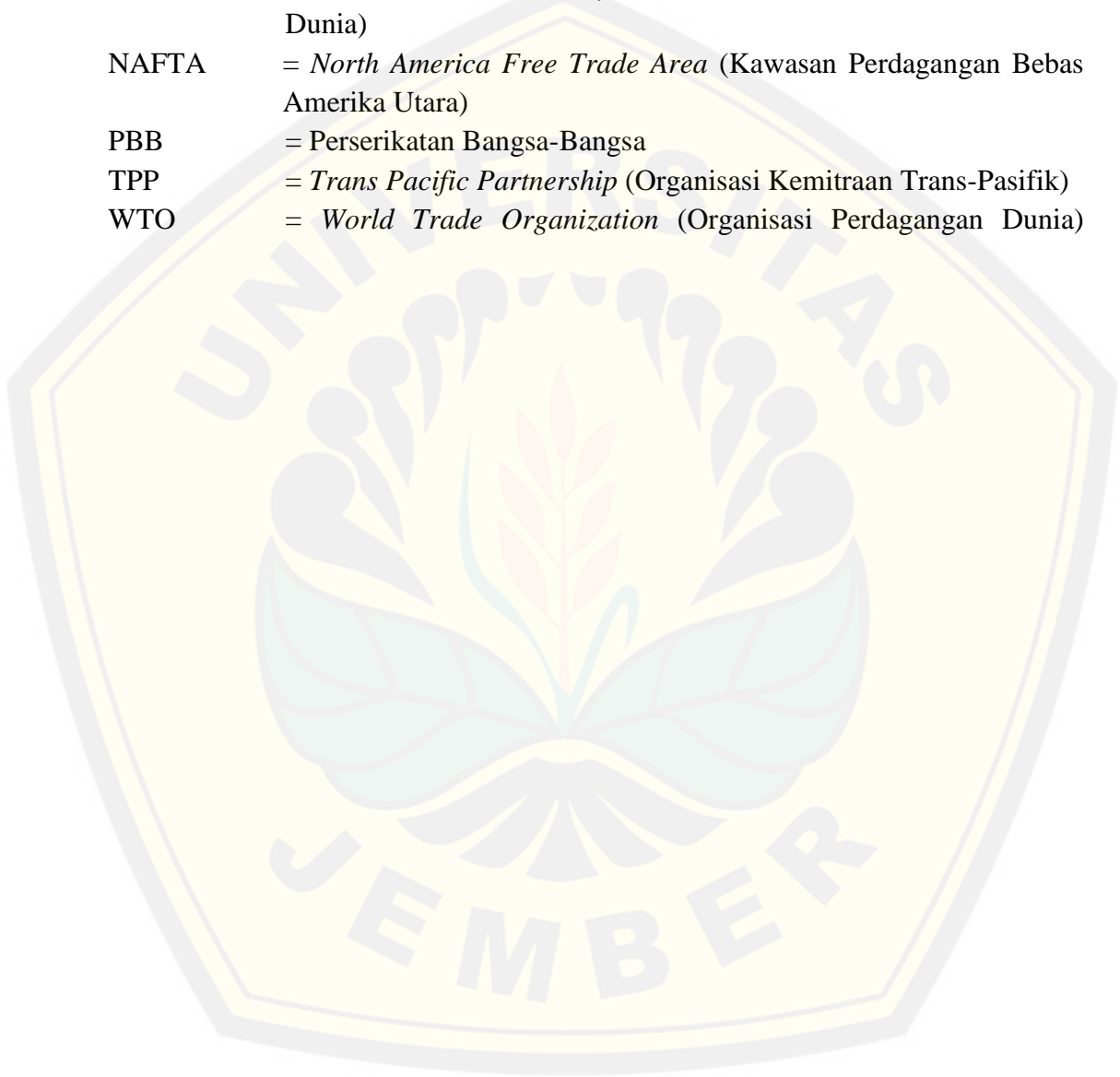
Gambar 2.1 Diagram persentase ketidaksetaraan pendapatan di AS, Perancis dan Inggris pasca neoliberal bergulir sampai pada akhir abad ke 20.. 38

Gambar 4.1 Survey Pendapat Masyarakat Uni Eropa Terhadap Pencari Suaka Tahun 2016 69



DAFTAR SINGKATAN

AS	= Amerika Serikat
EU	= <i>European Union</i> (Uni Eropa)
FN	= <i>Front National</i> (Partai Nasional Front)
IMF	= <i>International Monetary Fund</i> (Institusi Pendanaan Moneter Dunia)
NAFTA	= <i>North America Free Trade Area</i> (Kawasan Perdagangan Bebas Amerika Utara)
PBB	= Perserikatan Bangsa-Bangsa
TPP	= <i>Trans Pacific Partnership</i> (Organisasi Kemitraan Trans-Pasifik)
WTO	= <i>World Trade Organization</i> (Organisasi Perdagangan Dunia)



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Neoliberalisme mulai berkembang sejak krisis ekonomi tahun 1970-an dan tumbuh menjadi hegemoni dalam mengatur sistem ekonomi-politik internasional sampai saat ini. Neoliberalisme merupakan buah hasil perkembangan pemikiran liberal klasik yang berevolusi dalam bentuk yang lebih baru dan telah mendominasi pemikiran politik normatif juga politik praktis di Barat bahkan Dunia. Ide neoliberalisme muncul seiring dengan fenomena titik balik revolusioner sejarah sosial dan ekonomi dunia tahun 1970-an, saat beberapa pemimpin seperti Deng Xiaoping, Paul Volcker, Margaret Thatcher dan Ronald Reagan mengubah tatanan kebijakan sebelumnya yang ekonomi-komunis Cina dan Keynesian³ menjadi lebih liberal. Pengertian neoliberal tidak terlepas dari pemikiran liberal klasik terdahulunya seperti John Locke dan Adam Smith yang sering dikaitkan dengan keyakinan bahwa peran negara harus minimal, hal ini berarti bahwa secara praktis segala sesuatu kecuali angkatan bersenjata, penegakan hukum dan “barang-barang yang tidak dapat dikecualikan lainnya (seperti tanah, air dan udara)” harus diserahkan kepada transaksi bebas warganya dan organisasi. Mereka harus dengan bebas dapat memilih untuk membangun dan mengambil bagian dalam setiap aspek kehidupan (Thorsen, 2006:4). Nilai liberal sendiri menitikberatkan pada pemikiran pentingnya martabat manusia dan kebebasan individu sebagai hal yang mendasar untuk mencapai sebuah kemerdekaan yang hakiki serta terciptanya kesempatan yang sama bagi semua

³John Maynard Keynes dalam bukunya *The General Theory of Employment, Interest, and Money* (1936:155). New York : Harcourt, Brace and Company menjelaskan bahwa campur tangan pemerintah diperlukan untuk mengatur mekanisme pasar. Karena pengeluaran pemerintah merupakan faktor penting yang mendorong permintaan agregat, maka peningkatan pengeluaran akan meningkatkan permintaan. Dilain sisi pengeluaran pemerintah diperlukan untuk mempertahankan *full employment* sehingga penawaran terjaga.

orang. Nilai ini dapat terwujud lewat prinsip perdagangan bebas, kompetisi yang terbuka dan kebebasan berekspresi.

Pengertian neoliberalisme memiliki makna luas dengan cakupan realitas yang multidimensional. Secara garis besar Harvey (2005:2) menjelaskan bahwa “Neoliberalisme pada mulanya merupakan suatu teori ekonomi-politik praktik yang menyatakan bahwa kesejahteraan manusia dapat dicapai dengan cara membebaskan individu untuk berwirausaha dan mengasah keterampilannya, yang didukung dalam sebuah kerangka kelembagaan dengan ciri hak kepemilikan pribadi yang kuat, adanya praktik pasar bebas (*free markets*⁴) dan perdagangan bebas (*free trade*⁵). Sedangkan peran negara adalah menciptakan dan melestarikan kerangka kerja institusional sesuai dengan praktik tersebut. Tugas negara adalah menjamin kelancaran usaha ini, misalnya dengan menjaga kualitas dan integritas uang, mengatur struktur-fungsi militer dan hukum untuk mengamankan hak milik pribadi dan menjamin berfungsinya pasar agar berjalan dengan baik”. Namun, neoliberalisme tidak sekadar teori ekonomi-politik praktik saja melainkan lebih luas mencakup landasan etika serta kesimpulan normatif dari perilaku kebijakan negara. Menciptakan sebuah ideologi yang mempengaruhi prinsip kelembagaan dan interaksi antar negara serta etika humanis, misalnya munculnya fenomena regionalisme pasar bebas untuk memperlancar arus perdagangan bahkan tanggung jawab moral atas perlindungan kebebasan itu sendiri pada masyarakat pencari suka. Selain itu, neoliberalisme juga menyiratkan beberapa dimensi seperti budaya, ekologi dan sebagainya. Sehingga, neoliberalisme bukan hanya masalah ekonomi tetapi lebih luas mencakup fenomena yang kompleks.

⁴ Pasar bebas adalah mekanisme pasar domestik di mana tidak ada intervensi pemerintah dan semua harga, biaya, keputusan didasarkan pada kekuatan dan mekanisme pasar. Tujuan pasar bebas adalah untuk mengurangi pengaruh eksternal terhadap harga, biaya, keputusan konsumen, dan kebebasan memilih individu / perusahaan. Jonty Bloom dalam BBC News-Business correspondent edisi 14 August 2017 (BBC News, 2017).

⁵ Sedangkan Perdagangan bebas merupakan mekanisme pasar bebas yang mempertimbangkan perdagangan internasional antar negara; di mana ada sangat sedikit hambatan perdagangan (tarif, kuota) yang biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian perdagangan bebas. Tujuan perdagangan bebas adalah untuk mempromosikan perdagangan internasional antar negara.

Dalam hal ekonomi, neoliberalisme memberikan fasilitas kepada negara-negara maju untuk memperluas ekspansi keuntungan mereka. Lewat suasana kompetisi yang diciptakan memungkinkan kemenangan yang relatif lebih besar bagi aktor-individu di negara maju dikarenakan kesiapan mereka yang lebih besar dibandingkan dengan aktor-individu di negara berkembang dalam bersaing memperebutkan pasar. Neoliberalisme memberikan ruang bagi negara-negara maju untuk bisa masuk ke dalam batas-batas negara berkembang yang selama ini menghambat pengumpulan keuntungan negara maju. Batas-batas yang dimaksud misalnya adanya syarat-syarat kuota, tarif dan peraturan pemerintah lainnya, sehingga dengan penghapusan hambatan ini fasilitas yang diberikan oleh neoliberalisme diyakini mampu memberikan keuntungan yang maksimal bagi negara maju. Amerika Serikat (AS) merupakan salah satu negara yang gencar dalam melakukan penyebaran neoliberalisme. AS memiliki pengaruh kuat dalam mengatur mode wacana perdagangan dan finansial global lewat alat institusi internasional seperti *International Monetary Fund (IMF)*, *World Bank*, dan *World Trade Organization (WTO)*.

Sejak 1970-an, beberapa negara terlihat mulai mengalami perubahan tegas ke arah neoliberalisme. Hal ini dapat dilihat dari misalnya adanya sistem deregulasi, privatisasi, dan penarikan negara dari bidang penyediaan layanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Puncak dari pergeseran sistem kebijakan negara ini adalah terbentuknya *Washington Consensus* pada pertengahan tahun 1990-an, sebagai upaya mempromosikan re-strukturisasi kebijakan guna menanggulangi krisis di negara-negara selatan atau berkembang (Harvey, 2005:93). Selain itu, hampir semua negara dari bekas keruntuhan Uni-Soviet, negara-negara kesejahteraan dengan demokrasi sosial gaya lama seperti Selandia Baru dan Swedia, Afrika Selatan pasca-apartheid bahkan Cina kontemporer nampaknya semua menuju ke arah neoliberalisme. Hampir seluruh negara di dunia saat ini telah terintegrasi baik secara sukarela maupun dari tekanan paksaan terhadap neoliberal, meskipun beberapa diantaranya juga ditemukan setidaknya menyesuaikan beberapa kebijakan dan praktik yang sesuai dengan versi mereka sendiri.

Salah satu ciri-ciri yang dominan pada masa neoliberalisme sekarang ini misalnya kehadiran yang signifikan dari aktor-aktor internasional baik *state* dan *non-state* dalam praktik-praktik industrialisasi. Kita dapat melihat semakin berkembangnya perusahaan multinasional, adanya *joint-venture*⁶, anak perusahaan, dan sistem kemitraan dengan perusahaan nasional yang memungkinkan aktor tersebut untuk beroperasi ke dalam beberapa daerah paling terpencil sekalipun. Ciri-ciri ini ditopang oleh upaya aktor *state* dalam membentuk mekanisme pasar dengan fasilitas perdagangan bebas dan regionalisme untuk memperlancar arus transaksi dan menghilangkan hambatan-hambatan dalam perdagangan, contohnya kemitraan ekonomi strategis *Trans-Pacific Partnership* (TPP), organisasi dagang *North American Free Trade Agreement* (NAFTA), organisasi supranasional *European Union* (EU) dan organisasi perdagangan dunia *World Trade Organization* (WTO) yang membuat arus perdagangan antar negara semakin menjadi berantai, terbuka dan saling bergantung satu sama lain.

Namun, hegemoni neoliberal dalam mengatur sistem internasional mulai mengalami beberapa tantangan akhir-akhir ini pasca munculnya beberapa gejolak. Gejolak yang dimaksud misalnya ditandai dengan terjadinya resesi global tahun 2001 setelah dua mesin utama penentu ekonomi dunia Amerika dan Cina tidak mampu menanggulangi defisit ekonomi domestiknya. AS yang mengeluarkan pembiayaan besar-besaran untuk militerisasi pasca tragedi 7/11 dan konsumerisme⁷, sementara Cina menghadapi kemacetan kredit-utang untuk

⁶*Joint venture* atau Usaha patungan adalah kemitraan strategis sementara (pendek, menengah, atau jangka panjang) dari suatu perusahaan, kelompok, atau aliansi orang, atau kelompok perusahaan yang mempertahankan individualitas dan independensi hukum mereka masing-masing saat bekerja di bawah manajemen dan peraturan yang sama yang telah mereka sepakati, dalam cakupannya melakukan operasi komersial tertentu baik distribusi investasi, kontrol, tanggung jawab, personel, risiko, biaya, dan keuntungan (BBVA, 2018).

⁷*Consumerism* merupakan sebuah tatanan sosial dan ekonomi yang mendorong seseorang memperoleh barang dan jasa dalam jumlah yang terus meningkat. Hal ini terjadi akibat kelebihan produksi — pasokan barang yang melampaui permintaan konsumen sehingga produsen memanipulasi pengeluaran konsumen. Dalam kasus 2001, Produsen software memanipulasi masalah perangkat lunak generasi Tahun 1900 dan 2000, mengakibatkan banyak perusahaan dan perorangan membeli sistem komputer baru untuk memastikan perangkat lunak mereka sesuai dengan generasi 2000-an. Kent L. Granzin dan Gary M. Grikscheit (1976:68-72).

pembiayaan infrastruktur dan *fixed capital investment*⁸ memberi pengaruh pada ketidakstabilan neraca perdagangan global (Harvey, 2005:152). Resesi ini diikuti oleh serangkaian krisis lainnya seperti kegagalan *Washington consensus* di Amerika Latin yang menyulut kebangkitan kelompok kiri-otoritarian Amerika Latin, krisis finansial tahun 2008 dan *The European debt crisis* tahun 2010 yang diakumulasikan ke dalam sebutan *Great Recession*⁹. Gejolak lain misalnya adanya kecenderungan fenomena ketidaksetaraan pendapatan antar individu yang semakin diperburuk oleh kebijakan privatisasi dan pengurangan subsidi oleh pemerintah membuat kebijakan-kebijakan sosial menjadi dikesampingkan dan cenderung dikomersilkan, munculnya tren pengosongan atau pemindahan produksi manufaktur di beberapa negara maju seperti Eropa barat dan Anglo-Amerika¹⁰ yang dikombinasikan dengan penurunan atau stagnasi upah riil, telah menghasilkan re-komposisi dari keuntungan perusahaan terhadap intermediasi keuangan¹¹ dan pertumbuhan ketergantungan yang terus meningkat daripada impor dengan harga rendah terutama dari Cina, mengakibatkan penurunan keuntungan bagi kelas pekerja serta defisit perdagangan berkelanjutan di beberapa negara maju. Serangkaian fenomena tersebut ditambah dengan tumbuhnya pusat ekonomi baru seperti Cina memberikan sebuah premis bahwa negara maju ternyata tidak seutuhnya diuntungkan dari praktik neoliberalisme. Padahal apabila dilihat dari sisi normatifnya, seharusnya negara-negara majulah yang akan selalu diuntungkan dan cenderung mempertahankan sistem neoliberalisme mengingat kapasitas dan kesiapan mereka yang memadai untuk bersaing dalam situasi liberal

⁸ *Fixed Capital Investment* merupakan biaya yang diperlukan untuk mendirikan fasilitas-fasilitas pabrik secara fisik (Sari, 2011).

⁹ *Great recession* adalah akumulasi periode penurunan ekonomi yang diamati selama akhir 2000-an sampai awal 2010-an dalam transaksi pasar dunia. (Rabinowitz, 2018).

¹⁰ Anglo-american merupakan panggilan yang merujuk pada wilayah di benua Amerika di mana bahasa Inggris adalah bahasa utama dan budaya Inggris dan Kerajaan Inggris telah memiliki dampak sejarah, etnis, bahasa dan budaya yang signifikan misalnya Amerika Serikat dan Kanada. Merujuk pada kamus online Cambridge dictionary, Diakses dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/anglo-american> pada 25 Februari 2019.

¹¹ Intermediasi keuangan adalah proses pembelian dana dari unit surplus (penabung) untuk selanjutnya disalurkan kembali kepada unit defisit (peminjam), yang bisa terdiri dari unit usaha, pemerintah dan juga rumah tangga. (Siringoringo, 2012).

dapat secara relatif memenangkan mereka dalam persaingan global sehingga mereka relatif nyaman dalam situasi ini.

Seiring kemunculan krisis neoliberal di atas, beberapa kelompok bangkit menyuarakan kritiknya terhadap neoliberalisme. Penolakan ini tidak luput pula terjadi di negara-negara pendukung penyebaran neoliberalisme seperti Amerika Serikat dan Eropa barat. Seperti yang diutarakan Birch dan Mykhnenko (2010:249) “Telah ada pertentangan yang luas atas kebijakan keuangan internasional di bawah lembaga kapitalisme global dalam sepuluh tahun terakhir, pertentangan ini sebagian besar mengarah pada penolakan terhadap globalisasi atau neoliberalisme yang rekat dengan kapitalisme global”.

Kemenangan Donald Trump sebagai presiden pada pemilu AS tahun 2016 menimbulkan justifikasi dari ciri-ciri kebangkitan sentimen penolakan terhadap neoliberalisme di AS. Beberapa ilmuwan politik beranggapan bahwa mengapa kelompok kulit putih yang kurang berpendidikan (tidak mengenyam pendidikan tinggi) menjadi pendukung yang paling antusias bagi Trump, adalah karena kekecewaan mereka dengan performa perdagangan internasional yang menempatkan mereka pada kondisi sulit dalam ekonomi. Lebih lanjut dalam penelitian Mutz (2017:3) mengungkapkan beberapa isu yang juga berkorelasi dengan dukungan untuk Trump, utamanya adalah keinginan pemilih agar kelompok mereka menjadi lebih dominan kembali, ketidaksetujuan dengan pandangan Clinton terhadap perdagangan dan Cina, serta timbulnya perasaan bahwa "cara hidup orang Amerika terancam" yang sejak akhir Perang Dingin menimbulkan pertanyaan bahwa Islam radikal dan Cina adalah dua ancaman baru AS. Beberapa alasan ini dapat dibenarkan mengingat kesemuanya berasal dari kelompok masyarakat AS yang berstatus “tinggi” seperti pria, Kristen, dan kulit putih serta kelompok *blue-collar*¹² yang merasa terdiskriminasi dengan adanya

¹² *Blue collar* adalah Istilah bagi kelas pekerja yang melakukan pekerjaan manual, misalnya melibatkan pekerjaan manufaktur yang terampil atau tidak terampil, pertambangan, sanitasi, penangkapan ikan komersial, pemrosesan makanan, pekerjaan ladang minyak, pembuangan limbah, dan daur ulang, konstruksi, mekanik, pemeliharaan, pergudangan, instalasi teknis, dan banyak jenis pekerjaan fisik lainnya. Merujuk pada kamus online Cambridge dictionary, Diakses dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/blue-collar> pada 25 Februari 2019.

neoliberalisme. Ketakutan dan kekhawatiran kelompok ini (*xenofobia*) terhadap ancaman tersebut semakin dirasakan saat neoliberalisme memfasilitasi adanya perpindahan modal dan masyarakat dari berbagai etnis untuk bermigrasi. Menjadikan AS sebagai negara pengimpor terbesar sekaligus negara destinasi imigran yang multi-etnis.

Perkembangan sentimen terhadap neoliberalisme di AS juga terjadi di Eropa. Adanya tren kemenangan partai-partai ekstrem sayap kanan di Uni Eropa seperti *The League* di Italia, *Alternative for Germany* di Jerman, *Freedom Party* di Austria dan *Sweden Democrats* di Swedia kebanyakan disebabkan oleh tren penurunan ekonomi dan peningkatan jumlah pengangguran di Uni Eropa yang diperburuk dengan kebijakan penerimaan pencari suaka terutama dari kawasan Afrika dan Timur Tengah (BBC News, 2018). Uni Eropa yang dikenal sebagai kawasan besar penyelenggara neoliberalisme nyatanya juga mengalami tren negasi seperti yang terjadi di AS. Tekanan ekonomi dan perubahan sosial ditambah dengan fenomena “*Brexit*” semakin menumbuhkan sentimen *Eurosceptism* di seluruh negara anggota EU.

Sementara di Perancis, pergerakan kelompok partai ekstrem sayap kanan seperti *National Front* (saat ini berubah menjadi *National Rally*) semakin intens. Kemenangan Marine Le Pen (ketua partai *National Front*) pada pemilu regional tahun 2015 dan putaran pertama pemilu Presiden Perancis 2017 mengejutkan berbagai pihak, sebab Le Pen berhasil mengalahkan tiga kandidat lainnya sekaligus menjadi rival presiden terpilih Emanuel Macron di putaran kedua. Hal ini merupakan pertama kalinya sejak pemilu Presiden 2002 kandidat dari partai *National Front* melaju ke putaran kedua. Le Pen konsisten dalam politiknya membawa pendirian partainya yang anti-imigran, *Eurosceptism* dan nasionalis. Nilai-nilai ini dibawanya juga dalam pemilihan Presiden Perancis tahun 2012 dan saat terpilihnya dia dalam pemilu parlemen Uni Eropa tahun 2014 (Pedder, 2016).

Keberhasilan Le Pen dalam meningkatkan prestasinya dalam pemilu 2017 menjadi salah satu justifikasi bahwa sentimen terhadap neoliberalisme juga sedang berkembang di Perancis. Lolosnya Le Pen sampai pada putaran kedua pemilu 2017 menjadi kejutan mengingat partai ekstrem sayap kanan ini tidak

terlalu populer di Perancis sebelumnya. Hal ini dibuktikan pada hasil-hasil mengecewakan yang didapatkan oleh kandidat dari partai FN misalnya ketua partai FN yaitu Jean Marine Le Pen yang hanya sampai pada putaran pertama pada pemilu 2002, begitu pula Marine Le Pen pada pemilu 2012 dan beberapa kekalahan Pemilihan legislatif pada 2002, 2007 dan 2010 (Chazan, 2018).

Le Pen memberi kinerja bersejarah bagi sayap ekstrem kanan Perancis di putaran pertama pemilihan presiden 2017. Pandangan nasionalis yang dibawa Le Pen yang lekat dengan karakteristik partai ekstrem sayap kanan, berhasil meraih 21,3 persen suara (Schultheis, 2017) di wilayah-wilayah padat penduduk dan mendapat dukungan penuh di hampir semua wilayah-wilayah di mana lahan pertanian dan pusat imigran berada. Selain itu, politik *Islamophobia* dan anti-globalisasi juga menjadi senjata utama Le Pen dalam meraih suara. Isu ini didukung oleh performa ekonomi Perancis yang tidak begitu memuaskan. Antara tahun 2006 sampai 2011, jumlah pekerjaan di tiga belas kota besar Perancis seperti: Lyon, Marseille, Toulouse, Lille, Bordeaux, Nantes, Nice, Strasbourg, Rennes, Grenoble, Rouen, Montpellier, dan Toulon hanya tumbuh berkisar rata-rata sebesar 5% (The Economist, 2017) membuat kesimpulan bahwa memang permasalahan terbesar Perancis adalah tentang penyerapan tenaga kerja. Hingga 2016 kurang lebih tiga juta orang Perancis menganggur (Walker, 2016). Ditambah dengan masalah imigran yang tak kunjung selesai terutama di Calais dan serangan terorisme tahun 2015 di Paris dan 2016 di Nice membuat tren dukungan terhadap Marine Le Pen semakin meningkat.

Secara umum, kesuksesan Trump dalam pemilu AS 2016 dan meningkatnya popularitas Marine Le Pen pada pemilu Perancis 2017 menumbuhkan pertanyaan lebih dalam tentang mengapa di wilayah atau negara yang mendukung penerapan neoliberalisme, tumbuh tren negasi dari praktik-praktik neoliberal itu sendiri. Padahal apabila dilihat dari segi manfaatnya, seharusnya negara-negara ini cenderung nyaman bertahan pada situasi neoliberalisme karena fasilitas persaingan pasar bebas yang diberikan relatif memberikan banyak keuntungan bagi mereka dibandingkan negara berkembang. Penulis ingin menganalisis tentang alasan atau faktor-faktor pembentuk

kemunculan tren negasi tersebut di masing-masing negara. Penjabaran ini kemudian menumbuhkan aliansi yang menarik untuk dianalisis, sehingga membuat penulis merangkainya dalam sebuah karya tulis ilmiah dengan judul **“Kritik Terhadap Neoliberalisme di Barat : Kasus di Amerika Serikat dan Perancis”**

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Penulis melakukan pembatasan tentang permasalahan apa yang akan dibahas dalam karya tulis ini. Mengingat luasnya dimensi dan sudut pandang yang dapat dibahas dari masalah ini, maka untuk memberikan batasan-batasan penjelasan yang spesifik guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan, penulis membentuk batasan materi dan batasan waktu.

1.2.1 Batasan Materi

Tulisan ini akan mencari tahu mengenai alasan atau faktor pembentuk dibalik kemunculan sentimen terhadap neoliberalisme di AS dan Perancis lewat studi pemilu. Penyebab kemunculan sentimen terhadap neoliberalisme di Amerika Serikat dan Perancis dimulai dengan analisis kampanye yang dilakukan Trump pada pemilu AS 2016 dan Le Pen pada pemilu Perancis 2017. Materi kampanye atau fenomena yang diangkat oleh mereka dalam pemilu Presiden seperti anti-globalisasi, *anti-establishment*¹³ dan anti-imigran menjadi bahan kajian yang dapat digunakan sebagai alat pembenaran bahwa sentimen terhadap neoliberalisme memang menguat pasca adanya kelompok yang mewakili aspirasi kecaman/kritik terhadap dampak negatif dari hegemoni neoliberalisme.

¹³ *Anti-establishment* berarti sebuah pandangan atau kepercayaan yang selalu bertentangan dengan prinsip keamanan dan elite baik dalam segi sosial, politik ataupun ekonomi, misalnya gerakan anti-establishment di Inggris yang menentang adanya praktek rulling class yang memungkinkan sekelompok orang menguasai bidang-bidang pengaturan agar orang lain mematuhi. Merujuk pada kamus online Merriam-webster, diakses dalam <https://www.merriam-webster.com/dictionary/antiestablishment> pada 25 Februari 2019.

1.2.2 Batasan Waktu

Analisis materi atau bahan kampanye digunakan sebagai alat penelitian guna mencari validasi atas kriteria atau klasifikasi dari kemunculan sentimen terhadap neoliberalisme di AS dan Perancis. Oleh karena itu, Kampanye presiden Donald Trump yang secara resmi diluncurkan pada 16 Juni 2015 dan kampanye Marine Le Pen yang secara resmi diadakan pada 10 April 2017 menjadi fokus analisis kemunculan dukungan dan klasifikasi dari gerakan pengecaman terhadap neoliberalisme di Barat. Namun, mengingat faktor sejarah tidak dapat diabaikan dalam penelitian ini, karena masalah yang dibahas menyangkut sejarah pertumbuhan neoliberalisme dan penolakannya maka beberapa aspek menyangkut sejarah dapat diperhitungkan.

Penulis menetapkan berakhirnya pemilu sebagai batas akhir penelitian. Batas akhir ini digunakan penulis sebagai justifikasi kemunculan sentimen terhadap neoliberalisme di Barat utamanya AS dan Perancis. Batas akhir yang dimaksud adalah Januari 2017 untuk Donald Trump, karena bertepatan dengan dilantikannya Trump secara resmi sebagai pemenang pemilu AS dan Juni 2018 sebagai pergantian nama secara resmi partai *National Front* menjadi *National Rally* sebagai strategi lanjutan pasca kekalahan Marine Le Pen pada pemilu Perancis 2017 dan pelantikan Presiden Perancis terpilih Emanuel Macron.

1.3 Rumusan Masalah

Mengapa kritik terhadap neoliberalisme bisa menguat di Amerika Serikat dan Perancis ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab dibalik menguatnya kritik terhadap neoliberalisme di Amerika Serikat dan Perancis.

1.5 Kerangka Konseptual

1.5.1 Bangkitnya Neoliberalisme dan Reaksi Populis Terhadapnya

Berbicara mengenai neoliberalisme, berarti tidak terlepas dari pemikiran liberalisme. Liberalisme klasik sebagai dasar pemikiran teori ini percaya bahwa segala bentuk tindakan manusia harus dikembalikan pada individu itu sendiri. Seperti yang diutarakan beberapa pemikirnya, misalnya John Locke yang mengungkapkan sebuah pemikiran bahwa dasar hubungan antara kebebasan dengan kepemilikan pribadi adalah melekat satu dengan yang lain. Penerapan sistem ekonomi yang berdasarkan kehendak pasar dan kepemilikan pribadi akan sejalan dengan perlindungan terhadap kebebasan individu (Gaus, 2003). Seiring perkembangannya, tradisi liberalisme berkembang pada spektrum yang luas seperti mengakomodasi nilai-nilai perjuangan *working class*, perempuan, orang kulit hitam dan imigran. Tradisi liberalisme inilah yang kemudian banyak disebut sebagai libertarian. Namun, pada perjalanannya kepercayaan pada kebebasan pasar mulai mengalami tantangan pada akhir abad 19. Beberapa dominasi praktik kapitalisme pasar mulai disaingi oleh kemunculan beberapa ide *statist* seperti di Jerman dan Uni Soviet membuat ide-ide *laissez-faire* ini sedikit meredup.

Namun, pasca Perang Dunia II berakhir, tepatnya saat model Keynesian mulai mengalami tekanan pada stagflasi pasar tahun 1970-an di AS dan Inggris, akhirnya praktik liberalisme mulai mendapatkan kekuatannya kembali. Menggunakan prinsip restrukturisasi kebijakan dari liberalisme lama munculah model pembangunan yang disebut sebagai neoliberalisme. Neoliberalisme sebagai bentuk sintesis liberalisme mengungkapkan sebuah pembaruan dari ideologi liberalisme klasik. Beberapa pemikir neoliberalis memiliki definisi bervariasi pada neoliberalisme, mengingat spektrum dan sudut pandang yang dijelaskan berangkat dari konteks atau pendekatan (ekonomi, politik dan sosial) yang berbeda-beda pula sesuai dengan keinginan yang ingin ditekankan.

Meskipun demikian, variasi definisi ini dapat ditarik secara umum seperti pada kutipan berikut :

Neoliberalism is, as we see it, a loosely demarcated set of political beliefs which most prominently and prototypically include the conviction that the only legitimate purpose of the state is to safeguard individual, especially commercial, liberty, as well as strong private property rights (cf. especially Mises 1962; Nozick 1974; Hayek 1979). This conviction usually issues, in turn, in a belief that the state ought to be minimal or at least drastically reduced in strength and size, and that any transgression by the state beyond its sole legitimate purpose is unacceptable. These beliefs could apply to the international level as well, where a system of free markets and free trade ought to be implemented as well; the only acceptable reason for regulating international trade is to safeguard the same kind of commercial liberty and the same kinds of strong property rights which ought to be realised on a national level (Norberg 2001; Friedman 2006)(Thorsen dan lie, 2006:14).

Kutipan di atas menyiratkan bahwa neoliberalisme merupakan suatu nilai, prinsip dan kepercayaan dengan pemahaman bahwa perlindungan terhadap kebebasan individu dalam menjalankan seluruh aspek kehidupannya baik ekonomi, politik dan sosial harus dikembalikan kepada individu itu sendiri atas nama untuk mencapai kemakmuran. Sedangkan peran pemerintah adalah sebagai agen katalisator kemakmuran tersebut dengan menjamin keadilan dan kelancaran struktur yang berjalan dengan pengaruh yang diberikan seminimal mungkin. Prinsip dan kepercayaan ini mulai menjadi hegemoni dalam sistem internasional.

Namun, seiring dengan implementasi dan berjalannya hegemoni neoliberalisme, ternyata hal ini kemudian memunculkan beberapa gejolak. Gejolak yang dimaksud utamanya terjadi pada krisis beraspek ekonomi dan keamanan. Beberapa kelompok terutama yang termasuk ke dalam masyarakat *blue collar* menjadi kelompok paling terpengaruh oleh dampak krisis neoliberalisme ini, mengakibatkan peningkatan sentimen yang menyulut pada reaksi penolakan/pembaharuan terhadap neoliberalisme. Fenomena meningkatnya sentimen ini kemudian

dimanfaatkan secara sempurna oleh aktor-aktor populis untuk menggalang dukungan dari pemilih lewat upaya retorika kritiknya terhadap neoliberalisme.

Populisme sendiri memiliki spektrum yang sangat luas tentang definisi, haluan dan orientasi politik pastinya, namun dapat diidentifikasi dari karakteristik yang identik melekat dengan statusnya. Misalnya populisme suka mengklaim bahwa upaya yang mereka lakukan adalah untuk mewakili khalayak umum atas nama menentang kepentingan kelompok tertentu yang sering digambarkan pada kelompok elite yang korup, memperbesar adanya kelas politik dan strata dalam masyarakat. Populisme identik dengan antagonisme yang selalu menggambarkan keadaan bahwa kaum elite terlalu mengeksklusifkan diri dan melupakan kepentingan masyarakat umum sehingga upaya perwakilannya didasari atas rasa frustrasi dan bentuk kemarahan rakyat (Muller, 2016:9-10). Selain itu, gaya komunikasi politik yang khas seperti selalu menggambarkan “kita versus mereka” mengungkapkan bahwa populisme merupakan sebuah upaya retorika permusuhan terhadap kaum elite yang mendominasi politik negara. Populisme secara strategis dan taktis juga biasanya menggunakan negativitas dalam komunikasi politik. Alat yang digunakan berkisar dari pembahasan dalam ranah politik seperti penghinaan pribadi kepada lawan politik hingga ranah sosial yang mendefinisikan orang-orang pada homogenitas baik secara budaya, identitas, kesamaan kepentingan dan menganggap bahwa orang lain (biasannya kaum minoritas seperti imigran) adalah ancaman atau sering disebut sebagai anti-pluralis (Molloy, 2018).

Populisme pada kesimpulan terakhirnya atau tujuan akhirnya tidak mengekspresikan adanya satu pun agenda kebijakan yang kongkret ataupun model pembangunan/perubahan yang spesifik sehingga populisme tidak pernah dinyatakan sebagai sebuah bentuk ideologi. Populisme lebih dapat dipahami sebagai sebuah gaya politik yang memanfaatkan fenomena yang sedang berkembang di masyarakat untuk tujuan meraih atensi dan dukungan dalam pemilu. Menurut (Muller, 2016:19-20) populisme adalah

“is a particular moralistic imagination of politics, a way of perceiving the political world that sets a morally pure and fully unified—but ultimately fictional—people against elites who are deemed corrupt or in some other way morally inferior...Otherwise, anyone criticizing the powerful and the status quo in any country would by definition be a populist. In addition to being antielitist, populists are always antipluralist: populists claim that they, and only they, represent the people. Other political competitors are just part of the immoral, corrupt elite, or so populists say, while not having power themselves; when in government, they will not recognize anything like a legitimate opposition. The populist core claim also implies that whoever does not really support populist parties might not be part of the proper people to begin with.”

Berdasarkan pendapat Muller di atas dapat ditarik benang merah bahwa populisme merupakan rangkaian bentuk klaim yang dibuat elite dalam mewakili rasa ketidakpuasan masyarakat dari kegagalan kebijakan pemerintah yang berlaku. Populisme selalu berkaitan dengan bentuk penuduhan dan pengkambinghitaman atas masalah-masalah yang terjadi yang kemudian dikaitkan pada lawan politiknya dengan tujuan membela kepentingan atas nama kelompok non-elite.

Untuk memperjelas perbedaan populisme dengan sebuah perjuangan perlawanan kelas, kita dapat menganalisisnya dari cara dan tujuan kedua perjuangan ini dalam mendapatkan keinginannya. Meski demokrasi populisme maupun *grassroots democracy* sama-sama menempatkan tujuan dasar kekuasaan di tangan orang biasa dan mendorong aliran pengaruh dari bawah hierarki sosial ke atas, tetapi perbedaannya populisme memperlakukan “orang-orang” sebagai massa yang relatif umum atau tanpa golongan kelas tertentu. Artinya populisme melakukannya tanpa batasan, tujuan dan sarana yang jelas, tentang waktu yang relatif spontan dengan upaya yang hanya untuk membentuk sebuah etis terhadap peserta (Maurer dan Diehl, 2017).

Perbedaan ini sesuai dengan cara yang dinyatakan oleh Jeffrey Stout (2010 : 231) dimana dia membedakan konsep “*populism*” dan “*grassroots democracy*” dalam metode dan tujuannya. Populisme sangat

bergantung pada pengkambinghitaman musuh yang dituduhkan utamanya terhadap sebuah otoritas, bahkan kepada para pemimpin karismatik. Dalam semua hal ini, populisme berbeda dari konsep *grassroot democracy* yang dipraktikkan dalam gerakan reformasi besar kaum buruh di masa lalu, di mana mereka menggunakan ekspresi yang sangat berbeda dari elite mayoritas dominan dengan struktur otoritas dari bawah ke atas yang berprinsip dan berdiferensiasi, di mana massa perjuangan dibentuk berdasarkan garis pembeda yang jelas antara kaya dan miskin dengan motif yang absolut dan sama yaitu pada kelas tertentu untuk tujuan tertentu. Penjelasan ini semakin menekankan bahwa populisme yang dibawa Trump dan Le Pen (atau bahkan aktor politik lain) sangat berbeda dengan konsep dasar perjuangan kaum buruh dari *grassroot democracy*.

Kelompok populis seperti Trump dan Le Pen tidak dapat dikatakan sebagai non-elite namun lebih pada elite politik yang populis. Populisme tidak dapat diklaim sebagai golongan non-elitis saat mereka mencoba mengutarakan perwakilannya pada masyarakat, hal ini dikarenakan sebenarnya motif perjuangan mereka berbeda dengan dasar kehendak masyarakat itu sendiri. Pernyataan yang lebih mudah adalah fakta bahwa mereka berlari sebagai kelompok elite yang menggunakan populisme sebagai metode untuk meraih tujuannya. Pandangan yang lebih dekat pada kata “populisme” milik Trump dan Le Pen mengungkapkan bahwa kata ini berada dalam kategori istilah deskriptif yang sama dengan “*postmodernisme*”¹⁴ atau sebuah “ironi”¹⁵ di mana kebenaran representasi perjuangan masyarakat mereka bersifat subjektif dan di sisi lain

¹⁴ Postmodernisme adalah sebuah filsafat ilmu pengetahuan yang mengkritik pandangan modernisme bahwa ilmu pengetahuan bersifat mutlak dan objektif, yang artinya tidak adanya nilai dari manusia. Karena postmodernisme beranggapan bahwa ilmu pengetahuan tidaklah bersifat objektif melainkan subjektif dan interpretasi dari manusia itu sendiri, sehingga kebenarannya adalah relatif (Setiawan dan Sudrajat, 2018:28).

¹⁵ Ironi yang dimaksud dalam tulisan ini berarti kejadian atau situasi yang bertentangan dengan yang diharapkan atau yang seharusnya terjadi, tetapi sudah menjadi suratan takdir. Merujuk pada kamus online bahasa Indonesia KBBI Daring diakses dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ironi>. Pada 13 Juli 2019.

sebenarnya tidak koheren namun telah menjadi hubungan yang dibuat-buat.

Relevansi konsep populisme dalam tulisan ini adalah dapat digunakan sebagai pendekatan yang menjawab faktor dibalik berkembangnya kritik terhadap berjalannya neoliberalisme di AS dan Perancis. Populisme memberikan penjelasan pada alasan yang mendasari berkembangnya dukungan terhadap Trump dan Le Pen di saat mereka membawa sentimen kritik terhadap neoliberalisme pada pemilu di kedua negara dari pemilih. Populisme digunakan sebagai pendekatan yang paling cocok dalam mendeskripsikan motif dan tujuan perilaku politik Trump dan Le Pen dalam mengkritik neoliberalisme.

1.6 Argumen Utama

Implementasi sistem neoliberalisme di Barat, terutama di AS dan Perancis tercatat mengalami berbagai macam tantangan yang berasal dari kelompok-kelompok masyarakat yang dirugikan serta beberapa tokoh politik penting di tengah gejolak ekonomi dan sosial. Terkait dengan fenomena yang menarik ini, dengan mengambil contoh kasus di Amerika Serikat dan Perancis, penulis berargumen bahwa kritik terhadap neoliberalisme mengalami peningkatan karena dua hal. Pertama, munculnya kelompok masyarakat yang lazim dikenal sebagai *blue collar* yang merasa termarginalisasikan oleh pelaksanaan sistem neoliberalisme. Dari waktu ke waktu jumlah kelompok ini semakin banyak serta berhasil menarik simpati kelompok masyarakat lain sehingga hal ini berakibat pada kian meningkatnya jumlah penentang atau pengkritik pelaksanaan sistem neoliberalisme. Kedua, gelombang kritik yang disuarakan oleh kelompok masyarakat yang merasa dirugikan oleh sistem neoliberalisme ini selanjutnya semakin diperkuat oleh dukungan yang berasal dari tokoh-tokoh politik seperti Donald Trump dan Marine Le Pen yang dikemas dengan konsep populisme. Sekalipun sebenarnya dukungan tokoh politik tersebut ditujukan untuk mendulang dukungan suara dalam proses pemilihan presiden, namun dampak dari apa yang

mereka lakukan adalah semakin menguatnya kritik terhadap implementasi sistem neoliberalisme di Barat pada umumnya dan kedua negara pada khususnya.

1.7 Metodologi Penelitian

Serangkaian tata cara teratur yang akan digunakan dalam tulisan ini untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan, membutuhkan uraian penjelasan mengenai bagaimana dan dengan apa tulisan ini akan diolah. Maka dari itu, penulis membaginya dalam dua subbab metodologi penelitian, yaitu:

1.7.1 Metode Pengumpulan Data

Pertimbangan atas diperlukannya nilai-nilai subjektivitas penulis untuk menyelami secara mendalam fenomena sosial-politik ini, maka pendekatan atau jenis penelitian kualitatif; deskriptif digunakan penulis untuk menjelaskan alasan-alasan dibalik mengemukakan sentimen penolakan terhadap neoliberalisme. Penulis dapat menginterpretasikan fenomena sosial yang akan diteliti secara bebas sehingga dapat menyimpulkan bahwa fenomena ini adalah bentuk populisme dari elite. Pendekatan kualitatif juga memberikan fasilitas untuk suatu fenomena dapat dikaitkan dengan fenomena lain dengan campur tangan nilai-nilai peneliti sehingga lebih membentuk bahasan atas substansi dari pada hanya bergantung pada ketentuan-ketentuan keilmuan tertentu yang sudah ada (bergantung pada metode saja).

Mengingat bahwa jenis tulisan ini adalah kualitatif; deskriptif maka penulis lebih memilih untuk menggunakan cara pengumpulan data (sekunder) dalam penelitian ini. Data sekunder yang dimaksud bisa berupa buku, jurnal, artikel dan berita yang didapatkan secara langsung maupun online. Seluruh data sekunder tersebut diperoleh atau dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*) berupa literatur-literatur bacaan.

1.7.2 Metode Analisis Data

Klasifikasi kemunculan gerakan populisme di AS dan Perancis didapatkan dari analisis penyebab atau alasan timbulnya dukungan dari pemilih terhadap kampanye yang direpresentasikan oleh Trump dan Le Pen. Proses penyelidikan dari peristiwa populisme ini didapatkan dari pengumpulan data (sekunder) dengan metodologi analisis kualitatif. Penulis hendak melakukan pengamatan dari sebuah kasus realitas sosial di mana penulis mencoba mengklaim bahwa lewat serangkaian fenomena atau variabel yang memunculkan suatu dampak dari berjalannya neoliberalisme ternyata memberikan tempat bagi aktor-aktor/elite bergaya populis untuk memanfaatkan fenomena tersebut bagi kepentingan signifikansi dukungan terhadapnya. Peneliti berfokus pada proses yang berkaitan antara variabel-variabel yang ada dengan membawa serta nilai-nilai dalam diri peneliti untuk digunakan sebagai keyakinan peneliti bahwa fenomena populisme memang menguat pasca adanya upaya representasi Trump dan Le Pen dalam mengkritik neoliberalisme selama pemilu.

Penelitian ini selanjutnya mengadopsi pola logika induktif. Pengadopsian pola induktif didasarkan pada penyusunan serangkaian kasus-kasus khusus yang kemudian disatukan dan dianalisis membentuk suatu kesimpulan berpola umum yang menjadi patokan serta dasar penyusunan argumentasi.

1.8 Sistematika Penulisan

Bab 1 Pendahuluan

Bab satu memberikan pengantar tentang gambaran permasalahan apa yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya meliputi latar belakang dan rumusan masalah. Bab ini juga menerangkan pada penggunaan metodologi yang akan digunakan dalam menjawab permasalahan dengan mendeskripsikannya menggunakan konsep yang kemudian menciptakan argumen utama.

Bab 2 Ideologi liberalisme dan Manifestasinya di AS dan Perancis

Bab dua mendeskripsikan pengertian ideologi liberalisme sebagai dasar pemikiran neoliberalisme. Kemudian pola neoliberalisme dijelaskan pada pengaruhnya terhadap konteks sosial, ekonomi dan politik di AS dan Perancis yang pada akhirnya mempengaruhi sentimen terhadap neoliberalisme.

Bab 3 Populisme di AS dan Perancis

Bab tiga menjelaskan tentang asal muasal populisme yang berkembang di AS dan Perancis.

Bab 4 Peningkatan Kritik Terhadap Neoliberalisme di AS dan Perancis

Bab empat akan membahas mengenai penyebab munculnya perkembangan kritik terhadap neoliberalisme di Barat. Lewat analisis proses berjalanya neoliberalisme beberapa contoh tren kritik ini dapat ditemukan dari penjelasan secara deskriptif dampak fenomena yang ditimbulkan oleh neoliberalisme, yang pada puncaknya ditemukan pada gejolak pemilu di AS tahun 2016 dan Perancis pada 2017.

Bab 5 Kesimpulan

Berisi rangkuman penyebab kemunculan sentimen/kritik terhadap neoliberalisme di AS dan Perancis.

BAB 2

IDEOLOGI LIBERALISME DAN MANIFESTASINYA DI AMERIKA SERIKAT DAN PERANCIS

2.1 Konsep Kebebasan Dalam Liberalisme

Liberalisme dapat dipahami sebagai sebuah nilai tradisi politik, filsafat politik dan teori filosofis umum, yang mencakup teori nilai, konsepsi manusia dan teori moral. Pernyataan ini berasal dari persinggungan antara definisi liberal menurut beberapa filsuf liberalisme seperti Maurice Cranston (1967:459) “bahwa liberal adalah seseorang yang percaya pada kebebasan” ataupun John Locke (1960 [1689]:287) bahwa liberal berarti “keadaan dimana manusia secara alami berada dalam keadaan kebebasan yang sempurna untuk memerintahkan tindakan mereka ... sebagaimana yang mereka anggap tepat ... tanpa meminta izin, atau bergantung pada kehendak orang lain” (Gaus, 2003) dengan implementasi praktik politik, sosial dan ekonomi manusia membentuk suatu prinsip dan nilai kebebasan sebagai syarat utama dalam mencapai kesejahteraan. Prinsip dan nilai yang demikianlah yang disebut oleh pemikir liberal John Stuart Mill sebagai Prinsip Liberal Fundamental (Gaus, 2003).

Namun, di saat prinsip liberal kemudian tidak dapat menghindari fakta bahwa manusia hidup berdampingan dan berinteraksi satu sama lain maka prinsip liberal fundamental mencoba menjembatani antara konsep kebebasan dengan konsep pengaturan. Isi dari prinsip liberal fundamental mengakomodasi adanya penekanan pada tanggung jawab pembenaran bagi mereka yang akan menggunakan paksaan dalam membatasi kebebasan misalnya otoritas politik ataupun hukum. Paksaan ini harus dibenarkan sebagai bagian dari konsep kebebasan sejak di satu sisi mereka membatasi kebebasan warga negara namun disisi lain mengantarkan pada kebebasan yang lebih. Artinya di saat pengertian bebas bukan semata-mata seperti pada mekanisme alam maka diperlukan adanya alat untuk mengatur kebebasan tersebut agar tercapai tujuan yang diinginkan. Untuk mengakomodasi pembatasan inilah kemudian teori kontrak sosial seperti

yang dikembangkan oleh Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau dan Immanuel Kant dapat dipandang sebagai bagian dari bentuk liberalisme (Gaus, 2003).

Hubungan teori kontrak sosial dengan liberalisme adalah teori kontrak sosial berusaha membenarkan bahwa kebutuhan fundamental manusia dalam hubungannya dengan masyarakat harus memiliki aturan dan tidak bergantung pada prinsip alam. Sebab sebelum adanya penetapan kontrak sosial sebagai dasar yang mengacu pada keputusan manusia untuk setuju hidup bersama dan melakukan kesepakatan untuk mewujudkan kedaulatan dengan otoritas absolut, tidak ada satupun hal yang tidak bermoral atau tidak adil dalam kehidupan manusia. Artinya segala sesuatu berjalan dengan sistem alam yang mana pada akhirnya hanya akan berjalan secara brutal. Namun setelah kontrak-kontrak sosial ini ditetapkan, maka istilah ‘masyarakat’ akan menjadi mungkin dan orang-orang dapat diharapkan untuk menepati janji mereka sehingga terbentuklah kerja sama satu sama lain dan seterusnya.

Maksud dan tujuan dari kontrak sosial adalah diperlukannya sumber paling mendasar dari semua yang dapat dipercaya dan yang bisa diandalkan untuk hidup dengan baik dan bersama. Sehingga pembenaran kontrak sosial sebagai pembatasan Prinsip Liberal Fundamental adalah sejauh mereka anggap pembatasan sebagai titik awal keadaan di mana manusia bebas dan setara, maka segala batasan yang mengantarkan pada perlindungan kebebasan dan kesetaraan ini harus dibenarkan (melalui kontrak sosial). John Locke mengklaim bahwa

“Men are naturally free and equal as part of the justification for understanding legitimate political government as the result of a social contract where people in the state of nature conditionally transfer some of their rights to the government in order to better ensure the stable, comfortable enjoyment of their lives, liberty, and property. Since governments exist by the consent of the people in order to protect the rights of the people and promote the public good, governments that fail to do so can be resisted and replaced with new governments” (Tuckness, 2016).

Dari pernyataan di atas nampak membenarkan bahwa atas nama meraih kebebasan, manusia secara suka rela membagikan sebagian kebebasannya untuk diatur oleh otoritas pemerintah. Hal ini dikarenakan manusia melakukan kontrak sosial satu sama lain dalam bentuk pengaturan yang diwujudkan ke dalam sebuah institusi legal bernama pemerintah atas nama untuk melindungi jaminan dari hak kepemilikan manusia itu sendiri. Manusia di dalam masyarakat mencoba membentuk asas kepercayaan agar terbentuk sistem yang dapat menjamin kebebasannya. Pengaturan yang dibentuk inilah yang diartikan sebagai jaminan kebebasan individu. Oleh karena itu, di saat suatu otoritas pemerintah dianggap gagal dalam menjamin perlindungan dari kebebasan masyarakat yang membentuknya maka sudah selayaknya otoritas yang telah ditunjuk sebelumnya digantikan oleh otoritas pemerintah yang baru.

Pembenaran otoritas pemerintahan sebagai pembatas kebebasan namun mengantarkan pada kondisi kebebasan yang lebih besar dari hanya kebebasan berbasis alamiah (*state of nature*) membawa pemikiran liberalisme dekat dengan konsep politik demokrasi. Meskipun kaum liberal klasik sepakat tentang pentingnya kepemilikan fundamental atas properti pribadi bagi masyarakat bebas, tradisi liberal klasik juga mengaitkan peran penting negara sebagai penjaga hak kepemilikan pribadi tersebut. Pandangan liberal klasik tentang negara dibenarkan sebagai monopoli yang sah yang dapat dikenakan biaya keadilan untuk layanan perlindungan hak-hak yang esensial (Zalta, 2018). Misalnya masyarakat menyerahkan sebagian hak mereka untuk kemudian diatur oleh wakilnya dalam pemerintahan, hukum dan penegakan kontrak sosial.

2.2 Liberalisme Di Amerika Serikat Dan Perancis : Sebuah Komparasi

Secara umum teori politik liberalisme mengalami perkembangan pandangan baik yang menyangkut mengenai konsepsi status, moral, properti pribadi maupun tatanan pasar. Banyak faktor yang mempengaruhi mengapa kemudian liberalisme klasik dan neoliberalisme (liberalisme baru) sedikit berbeda. Misalnya, perbedaan konteks suasana permasalahan ekonomi-politik masyarakat di masing-masing era itu, di mana pada era liberalisme klasik,

masyarakat berjuang melawan otokrasi agar lebih terbebas dari lembaga tradisional yang membelenggu mereka (Allsop, 2014). Sedangkan saat neoliberalisme muncul, fenomena krisis finansial pasca era Perang Dunia II menuntut adanya restorasi sistem ekonomi-politik dunia (utamanya di negara-negara Barat sendiri), di mana elite politik mengupayakan kembalinya kekuasaan mereka lewat jalur kapitalisme. Beberapa elite politik beranggapan bahwa resesi ekonomi yang terjadi pasca Perang Dunia II selain disebabkan oleh perang dalam kekuasaan politik internasional tetapi juga karena pengaturan pemerintah yang ketat terhadap aspek-aspek ekonomi masyarakat (George, 1999). Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya variasi atau model sistem ekonomi-politik yang membelenggu kebebasan perdagangan di Barat (negara dengan aliran keynesian, demokrat sosialis bahkan irisan dari Marxist).

Sebagai dasar konsep liberalisme, liberal klasik lebih khusus membahas pada filosofi dasar keilmuan sosial-ekonomi dari Adam Smith yang fokus pada pengulasan alternatif akibat dampak ekonomi dan sosial yang merugikan dari sistem pra-kapitalis merkantilisme abad 19. Kaum liberal klasik memperoleh wawasan mereka tentang pasar ekonomi, geopolitik, dan sifat manusia dari filsuf humanis zaman pencerahan seperti Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, dan Immanuel Kant. Para filsuf sosial dan ekonomi ini secara kolektif, mengembangkan “Teori Kontrak Sosial” dan banyak ide lain yang terkait dengan hubungan antara manusia, ekonomi, dan pemerintah berdasarkan nilai kebebasan. Bagi kaum liberal klasik, mereka memandang bahwa kebebasan dan kepemilikan pribadi saling terkait erat satu sama lain. Kaum liberal klasik menyatakan bahwa sistem ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan pribadi akan secara konsisten selaras dengan kebebasan individu, yang memungkinkan masing-masing untuk menjalani kehidupannya, termasuk mempekerjakan tenaga kerja dan modalnya sesuai dengan keinginannya (Robbins, 1961:11). Tatanan ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan pribadi dengan demikian dipandang sebagai perwujudan dari kebebasan.

Liberal klasik menggunakan pandangan yang menghubungkan kebebasan dan kepemilikan pribadi. Argumen ini menegaskan bahwa properti pribadi secara

efektif dapat melindungi kebebasan, dan tidak ada perlindungan yang efektif tanpa kepemilikan pribadi. Di sini idenya adalah bahwa dispersi (perpindahan) kekuasaan yang dihasilkan dari ekonomi pasar bebas yang didasarkan pada kepemilikan pribadi melindungi kebebasan subyek terhadap perambahan oleh negara. Seperti yang dikemukakan FA Hayek “Tidak ada kebebasan pers jika instrumen percetakan berada di bawah kendali pemerintah, tidak ada kebebasan berkumpul jika kamar-kamar yang dibutuhkan untuk berkumpul dikontrol, tidak ada kebebasan bergerak jika alat transportasi dimonopoli pemerintah” (Gaus, 2018). Hal ini berarti atas nama melindungi segala bentuk kepemilikan maka kebebasan harus diserahkan kembali dan berakhir kepada mekanisme dan transaksi individu itu sendiri.

Sedangkan neoliberalisme sebagai revisi pembaruan teori liberalisme, lebih menjelaskan pada aspek tatanan ekonomi yang didasarkan pada globalisasi ekonomi baru dan kompetisi pasar dunia. Asumsinya bahwa konsep pembaruan ini akan mengantarkan sistem pasar agar didapatkan prinsip persaingan yang adil dan bebas yang sebagian besar berfokus pada aspek kemakmuran bersama dengan peran pemerintah secara minimal. Pengembangan mendasar dari neoliberalisme adalah bagaimana upaya pemerintah dalam mengakomodasi kebebasan mengantarkan pada kebersinambungan pasar dan properti pribadi milik individu agar semakin mengantarkan pada jaminan atas hak individu itu sendiri. Dari hal ini dapat dikatakan bahwa neoliberalisme merupakan sebuah sintesis dari liberalisme klasik. Perkembangan yang dimaksud meliputi dorongan yang kuat atas *free trade* pada barang dan jasa, *free circulation of capital* dan *freedom of investment* yang memberikan dukungan sepenuhnya pada korporatisme sedang pemerintah bertindak sebagai obligator (George, 1999).

2.2.1 Liberalisme di Amerika Serikat

Ideologi liberalisme di AS telah menjadi prinsip fundamental bagi berjalannya negara ini sejak masa pembentukannya. Jauh sebelum Inggris mengkolonialisasi Amerika, tujuan awal kedatangan para imigran Eropa pada abad ke-17 ke Amerika salah satunya adalah ingin terbebas dari kondisi ekonomi

yang merugikan warga negara kelas dua di Eropa. Mereka ingin bebas melakukan perdagangan lintas batas tanpa membayar tarif - pajak yang sering digunakan untuk mendukung bangsawan feodal yang masih berkuasa di sebagian besar benua Eropa akibat dari tatanan kuno kerajaan dan agama pada masa itu (Goldfarb, 2010). Banyak orang yang berpindah tersebut adalah warga negara kelas dua dengan antagonisme agama kuno dan menginginkan kesetaraan untuk semua warga negara. Mereka mendukung ide-ide liberalisme tentang kebebasan pribadi yang kemudian memasukkannya ke dalam nilai-nilai Amerika. Namun di saat kolonisasi negara-negara Eropa mulai terbentuk di Amerika, tujuan-tujuan ini kemudian mulai terkikis seiring regulasi yang diberlakukan oleh kolonialisme Eropa.

Asal mula terbentuknya negara Amerika Serikat diawali dengan sepakatnya tiga belas daerah koloni Inggris untuk mendeklarasikan kemerdekaan atas Inggris. Sebelumnya, wilayah Amerika Utara merupakan daerah koloni dari beberapa negara Eropa seperti Inggris, Perancis, Spanyol, Belanda, Jerman, Swedia dan Irlandia namun pada tahun 1763 Inggris mulai mendominasi kekuasaan atas daerah-daerah koloni di sebagian besar Amerika Utara tersebut. Singkat cerita, Revolusi Amerika kemudian bergulir pada tahun 1776 untuk memperjuangkan kemerdekaan dari Inggris. Revolusi tersebut didasarkan atas kesamaan prinsip kebebasan dari tiga belas daerah koloni yang menolak pemberlakuan kebijakan perpajakan yang dirancang untuk meningkatkan pendapatan bagi pasukan kolonial Inggris yang beroperasi di Amerika atau dikenal dengan kebijakan *Stamp Act*. Revolusi ini terinspirasi oleh pemikiran John Locke tentang prinsip "*life, liberty, and property*". Hal ini dapat dilihat dari isi deklarasinya, dimana Thomas Jefferson mengatakan bahwa

"We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness." It then goes on to present a long list of grievances that provided the rationale for rebellion (Center for civic education, 2019).

Deklarasi di atas menyiratkan bagaimana masyarakat di tiga belas koloni menginginkan sebuah kebebasan yang hakiki, di mana semua individu harus diperlakukan selayaknya apa yang individu tersebut kehendaki, tanpa intervensi atau pengaruh dari entitas lain di luar individu tersebut dan semata-mata untuk kemakmuran yang individu itu inginkan. Pasca revolusi Amerika tersebut bergulir, terbentuklah kesepakatan dari tiga belas koloni untuk membentuk sistem negara federasi dengan nama yang kita kenal saat ini sebagai Amerika Serikat (*United States of America*) dan Thomas Jefferson menjadi pionir partai besar di AS yang kita kenal saat ini sebagai Partai Demokrat.

Periode setelah terbentuknya negara federasi Amerika adalah revolusi perjuangan kelas. Masa-masa industrialisasi tahun 1815-1861 adalah periode di mana fenomena revolusi perbudakan menjadi asal mula sejarah perjuangan kelompok-kelompok buruh untuk melawan dominasi kaum pemilik modal yang berkuasa, yang kemudian menjadi asal mula terbentuknya Partai Republik pada tahun 1854 (Republicans Overseas, 2019). Dominasi mobilitas politik Partai Demokrat dan Republik memiliki sejarah panjang dalam perbedaan orientasi politiknya AS dari waktu ke waktu. Meskipun begitu, baik Partai Republik dan Demokrat mereka sama-sama menggunakan liberalisme sebagai dasar interpretasi dalam menjalankan ideologi. Hal ini tidak terlepas dari sejarah perjuangan “mereka” dalam menuntut kebebasan sejak masa kolonialisasi Eropa sehingga tidak mengherankan pula apabila misalnya istilah konservatif di AS berbeda dengan di Eropa dalam konteks orientasi politik dan ekonomi. Masa-masa perjuangan kelas ini kemudian dilanjutkan dengan fenomena berspektrum rasial di mana perjuangan penghapusan perbudakan dan diskriminasi atas kelompok kulit hitam (afro-amerika) menuntut adanya perbaikan sistem kebebasan bagi setiap individu dan persamaan hak yang pada puncaknya tertuang pada amandemen ke 13 Konstitusi Amerika Serikat tahun 1865 (National Archives, 2016).

Perbedaan utama antara dua partai dominan di AS yaitu Demokrat dan Republik apabila diamati pada tren di abad 21 ini adalah Demokrat cenderung berisi orang-orang dengan pemikiran progresif sedangkan Republik berisi orang-orang dengan pemikiran lebih tradisional. Partai Demokrat condong di posisi kiri,

yang bersikap liberal dan biasanya dikaitkan dengan nilai-nilai progresifitas dan kesetaraan seperti persamaan hak-hak kaum minoritas dan bantuan layanan umum sedangkan Partai Republik condong di kanan, yang identik dengan nilai-nilai tradisional, afirmasi dan kebebasan ekonomi dengan cita-cita “*survival of the fittest*” atau bisa disebut mekanisme seleksi alam (Otieno, 2017) seperti moralitas dan pengurangan subsidi.

Serangkaian cerita di atas menunjukkan alasan mengapa AS menjunjung tinggi nilai-nilai liberal fundamental. Serangkaian sejarah panjang pembentukan dan perjalanan negara federasi AS menunjukkan bahwa negara ini merupakan negara multi-etnis dari berbagai imigran Eropa yang memperjuangkan kebebasan (liberalisasi) utamanya dapat ditekankan pada kebebasan dari aspek sosial-ekonomi yang kemudian diimplementasikan kepada sistem politik.

2.2.2 Liberalisme di Perancis

Perancis juga memiliki andil besar dalam sejarah perjalanan liberalisme. Namun, berbeda dengan apa yang terjadi di AS perjalanan sejarah liberalisme di Perancis lebih menekankan pada aspek politik, meskipun aspek ekonomi juga mempengaruhi perjalanan liberalisme di sana. Hal ini dikarenakan perjuangan kelompok-kelompok revolusioner seperti pada Revolusi Perancis lebih pada perjuangan untuk terbebas dari praktik-praktik kekuasaan monarki absolut yang kemudian melahirkan ide-ide revolusi. Filsuf politik terkenal asal Perancis seperti Montesquieu dengan konsep pemisahan kekuasaannya berhasil menginspirasi terciptanya revolusi di Perancis, yang dilain sisi, Revolusi Amerika juga menjadi titik awal terjadinya revolusi di Perancis (Popkin, 2005:14-16).

Perbedaan perjuangan kelas di Perancis dengan AS terletak pada komposisi rasialnya. Tidak seperti di AS yang memiliki sejarah panjang tentang fenomena perjuangan imigran dan buruh berbasis ras dan golongan, fenomena revolusi di Perancis tergolong hanya berasal dari mono-etnis sehingga perlawanan atas kekuasaan feodal berasal dari masyarakat asli Perancis sendiri. Fenomena imigran di Perancis baru mulai besar pasca Perang Dunia II, di mana selama masa rekonstruksi pasca perang, Perancis kekurangan tenaga kerja (Hamilton, Simon

dan Veniard, 2004) sehingga mengharuskan pemerintah Perancis membuka kebijakan imigran dari seluruh Eropa, Amerika, Afrika, dan Asia. Apalagi kebijakan-kebijakan asimilasi cenderung ditekankan oleh pemerintah Perancis kala itu membuat isu atau gejolak perbedaan identitas tidak begitu menonjol di sana.

Perjalanan panjang revolusi di Perancis seperti halnya di banyak negara-negara pasca monarki di Eropa melahirkan kelompok-kelompok dengan spektrum politik kiri-kanan. Sebutan ini untuk mengklasifikasikan posisi politik, ideologi dan partai dari misalnya yang mengusung ide-ide kesetaraan yang identik diletakkan di sebelah kiri ke ide-ide sosial-hierarkis di sebelah kanan. Hal ini disebabkan oleh perjalanan revolusi sejarah perpolitikan pasca kekuasaan monarki berakhir, kelompok-kelompok pemberontak sistem feodalisme bersatu di bagian kiri sedangkan kelompok-kelompok lama yang tetap mendukung sistem monarki berusaha mengimbangnya dengan berada di kanan yang menginginkan kembalinya sistem lama tersebut.

Kelompok Republikan diasosiasikan pada kelompok kiri di Perancis. Kelompok ini mengutamakan orientasinya pada kebebasan/liberalisme dan *anti-clericalism*¹⁶ baik dalam ranah sosial, ekonomi dan politik (Evans, 2003:12). Mereka memiliki kecenderungan pandangan individualisme serta kapitalisme yang menjunjung tinggi prinsip kebebasan individu dalam menentukan kesejahteraan mereka sendiri (liberalisme). Pada mulanya, kelompok-kelompok Republik adalah pemberontak sistem feodal yang menolak praktik-praktik kekuasaan absolut yang dipegang oleh otoritas penguasa, yang dapat mendikte atau membatasi kehendak individu. Namun seiring perkembangannya, perjalanan orientasi kebijakan kelompok kiri (utamanya pasca terbentuknya Republik Kelima) berkembang tidak hanya pada dukungan atas liberalisme saja namun juga mulai mengakomodasi adanya perlindungan bagi hak-hak minoritas seperti akulturasi budaya bagi imigran, kebebasan beragama, hak wanita dan LGBT

¹⁶ *Anti-clericalism* adalah gerakan yang menentang kekuatan dan pengaruh lembaga-lembaga keagamaan seperti gereja dalam urusan sipil sekuler (Cline, 2019).

bahkan orang dengan disabilitas dan *intersex* juga kebijakan lingkungan (Evans, 2003:172). Produk pemikiran dan kebijakan dari politik kelompok kiri ini misalnya melahirkan beberapa jaminan atas perlindungan Hak asasi manusia di Perancis yang tercantum dalam pembukaan Konstitusi Republik Kelima Perancis yang didirikan pada tahun 1958 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara tahun 1789. Perancis juga telah meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, serta Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia 1960 dan Piagam Hak Fundamental Uni Eropa tahun 2000, yang ke semua instrumen hukum internasional ini didahulukan dari undang-undang nasional Perancis (Constitutionnel, 1958). Penjelasan singkat tentang perkembangan liberalisme di Perancis ini mengungkapkan bahwa kebijakan liberalisme tidak hanya berkembang pada ranah pembebasan individu namun juga mengakomodasi nilai-nilai baru seperti pentingnya perlindungan HAM terhadap imigran dan lingkungan.

Sedangkan oposisi dari kelompok Republik yaitu radikal tradisional/konservatif, sering diasosiasikan sebagai kelompok kanan dalam politik Perancis. Karakteristik kelompok kanan ini memiliki kecenderungan pemikiran yang Nasionalis, *Protectionism*, Anti-imigran, dan *Hard Euroscepticism* (Evans, 2003:122). Spektrum kelompok kanan Perancis adalah kelompok penolak adanya revolusi dan berpegang teguh pada tatanan tradisional yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan hierarki yang cenderung dekat dengan adat istiadat dan monarki. Konservatisme berarti sebuah doktrin politik yang menekankan pada nilai-nilai dan praktik dari lembaga tradisional misalnya gereja. Partai *National Front* yang berdiri sejak 1972 adalah salah satu partai ekstrem kanan di Perancis sebagai kelompok konservatif evolusi dari peninggalan masa-masa Gerakan Nasionalisme Perancis pada Republik Ketiga di Perancis. Mobilitas politik *National Front* mengalami dukungan signifikan sampai pada pencalonan terakhir pemimpin kedua mereka (Marine Le Pen) pada pemilu presiden 2017 meskipun di beberapa waktu ke belakang belum dianggap populer (Evans, 2003:137).

Sebutan konservatif memiliki makna yang multi-definisi. Istilah konservatif dapat didefinisikan kurang lebih sama baik di AS maupun di Eropa dalam memandang kebijakan-kebijakan sosial, namun berbeda apabila menyangkut mengenai teori ekonomi dan politik luar negeri. Konservatif di AS lebih menganjurkan intervensi liberal dalam kebijakan luar negeri mereka. Hal ini salah satunya disebabkan oleh perkembangan faktor sejarah AS yang sejak pembentukan negaranya terdiri dari masyarakat pemegang prinsip liberal. Istilah *neokonservatif* misalnya lebih digunakan di AS sebagai varian ideologi ekonomi-politik konservatif yang menggabungkan fitur konservatisme tradisional dengan individualisme politik yang mendukung liberalisme. Pendekatan *neokonservatisme* erat kaitannya dengan keharusan menempatkan kepentingan AS sebagai prioritas. Pendekatan ini misalnya dapat dilihat dalam praktik mendemokratisasikan Timur Tengah melalui intervensi militer, mengatasi terorisme di wilayah tersebut dan permusuhan dengan Iran. Sedangkan konservatisme di Eropa cenderung lebih jelas dan absolut dalam teori ekonomi dan politiknya yaitu menolak praktik-praktik liberalisme dan condong pada pemikiran nasionalis-tradisional. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan partai-partai berspektrum kanan di Eropa yang berhaluan ortodoks seperti menolak kebijakan progresifitas, disintegrasi Uni-Eropa dan pentingnya batas-batas antar negara.

Liberalisme klasik mulai mengalami kemunduran pada abad 19. Tradisi yang memandang pentingnya tatanan pasar berbasis properti pribadi menghadapi tantangan pada perubahan sosial, ekonomi, dan politik secara meluas. Pada akhir abad 19, beberapa disfungsi liberalisme *laissez-faire*¹⁷ klasik dan kapitalisme mulai muncul ke permukaan. Gejala ini ditandai dengan kecenderungan monopolistik pada industri, fluktuasi siklus bisnis dan beberapa gejala lainnya. Pada awal abad ke-20, liberalisme klasik secara bertahap terkikis, dilemahkan

¹⁷ *Laissez-faire* adalah frasa bahasa Perancis yang secara harfiah diterjemahkan menjadi "biarkan (itu / mereka) lakukan", tetapi dalam konteks ini biasanya berarti "lepaskan". Frasa ini menjelaskan sebuah sistem ekonomi di mana transaksi antara pihak swasta bebas dari intervensi pemerintah baik berupa regulasi, hak istimewa, tarif dan subsidi. (Keynes, 1936:85)

oleh anti-kapitalisme yang berkembang serta ide-ide *statist* yang akhirnya mengarah pada kapitalisme yang dikelola secara terpusat seperti kasus di Jerman pada tahun 1936-1948 dan ekonomi sosialis yang direncanakan secara terpusat di Rusia (kemudian Uni Soviet) setelah Revolusi Oktober 1917. Puncak kemunduran liberalisme klasik adalah pada Depresi Hebat tahun 1929–1933¹⁸, di mana absanya peran kebijakan pemerintah dalam pasar mengakibatkan krisis penawaran-permintaan sehingga kemudian membuka jalan bagi perluasan Keynesianisme yang mengutamakan perlunya intervensi pemerintah untuk berkembang cepat utamanya di AS dan Inggris (Zaccone, 2017). Setelah model keynesian mendominasi pembuatan kebijakan ekonomi pada dekade pertengahan abad kedua puluh (tahun 1950an dan 1960an), pada tahun 1970-an, kemunculan stagflasi pasar mengakibatkan tumbuhnya doktrin seperti *monetarisme*¹⁹ dan ekonomi makro klasik baru yang mengarahkan pembuatan kebijakan ekonomi baru menuju pada kemunculan neoliberalisme.

2.3 Kemunculan Liberalisme Baru (Neoliberalisme)

Sejarah neoliberalisme tidak dapat dipisahkan dari restrukturisasi bentuk negara dan hubungan internasional. Neoliberalisme muncul sebagai ideologi baru dengan harapan dapat memperbaiki sistem dunia yang pada akhir tahun 1960-an sedang mengalami perubahan besar pasca Perang Dunia II. Pemberlakuan restrukturisasi setelah era Perang Dunia Kedua ini dirancang untuk mencegah

¹⁸ Depresi Hebat atau The Great Depression adalah istilah krisis ekonomi yang berlangsung pada tahun 1929-1939 diawali saat pasar saham AS anjlok akibat para investor berbondong-bondong mengalihkan tabungunya pada pasar saham yang kemudian mengakibatkan harga saham meningkat jauh dari nilai sebenarnya dan bank mengalami batas pinjaman likuiditas yang besar. Sementara pada saat yang sama upah pekerja masih rendah mengakibatkan belanja konsumen melambat dan harga produksi naik yang pada akhirnya jumlah barang mulai menumpuk, produksi melambat, pengurangan jumlah pekerja sementara harga saham terus melambung tinggi (History, 2009).

¹⁹ Monetarisme adalah sebuah pemikiran dalam ekonomi moneter yang menekankan peran pemerintah dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar. Prinsipnya menyatakan bahwa jumlah uang beredar (jumlah total uang dalam suatu perekonomian) adalah penentu utama PDB saat ini dalam jangka pendek dan tingkat harga selama periode yang lebih lama. Kebijakan moneter adalah salah satu alat pemerintah yang harus dilakukan dalam mempengaruhi kinerja ekonomi secara keseluruhan, menggunakan instrumen seperti suku bunga untuk menyesuaikan jumlah uang dalam perekonomian. Moneteris percaya bahwa tujuan kebijakan moneter paling baik dipenuhi dengan menargetkan tingkat pertumbuhan jumlah uang beredar (Jahan dan Papageorgiou, 2014).

kembali kepada kondisi bencana yang begitu mengancam kapitalisme seperti yang terjadi pada era Depresi Hebat tahun 1930-an (Harvey, 2005:9). Hal itu juga dimaksudkan untuk mencegah munculnya kembali persaingan geopolitik antar negara yang telah menyebabkan perang. Secara internasional, tatanan ekonomi dunia baru dibangun melalui perjanjian *Bretton Woods* di mana dalam perjanjian ini 44 negara menandatangani sistem moneter internasional baru yang menjadi awal pembentukan berbagai institusi, seperti World Bank, IMF, dan WTO di samping pengembangan lebih lanjut dari organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan untuk membantu menstabilkan hubungan internasional. Selain itu, *washington consensus*²⁰ dibuat dengan tujuan awal untuk mengupayakan pembangunan ekonomi di negara-negara Amerika Latin oleh Amerika Serikat yang kemudian menjadi cikal bakal mempromosikan re-strukturisasi kebijakan di negara-negara selatan atau berkembang lainnya yang diintegrasikan melalui institusi moneter internasional seperti World Bank, IMF dan WTO (Williamson, 2004). Dampak dari serangkaian tatanan internasional baru ini, memungkinkan terwujudnya perdagangan barang bebas di bawah sistem nilai tukar tetap yang ditambatkan oleh AS ke dalam konversi dolar mereka, menggantikan emas sebagai acuan *fixed price* atau harga acuan umum tetap. Serangkaian fenomena inilah yang kemudian dikenal sebagai karakteristik dari neoliberalisme.

Kata neoliberalisme muncul sebagai upaya institusi moneter internasional untuk menginterpretasikan istilah pembaruan dari prinsip liberalisme terdahulu. Kata 'Neo', 'Revisionis', 'Pembaruan' digunakan sebagai julukan atau istilah yang mewakili sistem yang mengakomodasi pembaruan dari mekanisme pasar (liberalisme klasik) (Winanti, 2012) lewat kebebasan ekspansi usaha dan pengurangan hambatan perdagangan atau batas negara yang memungkinkan individu untuk meraih tingkat keuntungannya yang paling tinggi, memungkinkan perpindahan modal yang cepat serta pendapatan yang meningkat akibat cakupan

²⁰ Istilah *Washington Consensus* secara umum dapat diartikan sebagai kesepakatan antar lembaga finansial internasional (*IMF* dan *World Bank*) dengan Departemen Keuangan AS yang isinya merekomendasikan sepuluh paket kebijakan ekonomi yang menurut mereka perlu menjadi acuan bagi negara berkembang (utamanya yang baru didera krisis) untuk menanggulangi masalah pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di negaranya (Bappenas, 2008).

pasar yang lebih besar. Praktik neoliberalisme sukses mengantarkan perusahaan-perusahaan privat besar untuk memaksimalkan utilitas mereka lewat biaya produksi yang lebih murah dan peningkatan penyerapan pasar yang lebih luas.

Terdapat tiga faktor keadaan yang membantu menjelaskan munculnya teori revisionis ini. Pertama, neoliberalisme muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, suatu periode di mana kemampuan pasar bebas untuk mempertahankan apa yang disebut Lord Beveridge (1944:90-93) sebagai 'keseimbangan yang makmur' dipertanyakan. Kaum neoliberalisme percaya bahwa pasar berbasis properti pribadi cenderung tidak stabil, atau seperti yang dikatakan Keynes, terjebak dalam keseimbangan dengan pengangguran tinggi (Keynes, 1936:189), mereka ragu dengan alasan empiris bahwa liberalisme klasik adalah fondasi yang memadai untuk masyarakat yang stabil dan bebas. Disinilah kemudian faktor kedua mulai berperan, keyakinan mereka pada pemerintah sebagai alat yang secara efektif dapat mengawasi kehidupan ekonomi menjadi meningkat. Kepercayaan ini sebagian besar berasal dari fenomena demokratisasi negara-negara Barat yang memungkinkan kepentingan individu dapat dirasakan lebih akomodatif dan upaya perbaikan ekonomi oleh pemerintah pasca Perang Dunia I terlihat berhasil. Faktor ketiga yang mendasari neoliberalisme adalah dengan adanya prinsip hak-hak properti dalam liberal klasik, ternyata telah menumbuhkan ketimpangan kekuasaan yang tidak adil. Contoh ketimpangan ini dapat dilihat dari fenomena berespek ekonomi-politik pada masa revolusi industri di mana kelompok kapitalis pemilik modal mendominasi kesewenangan atas kepemilikan barang produksi termasuk buruh dan terhadap praktik politik di negara Barat (Raico, 2018). Mereka menetapkan hanya kesetaraan formal yang padahal dalam praktik aktual gagal secara sistematis untuk mengamankan jenis kebebasan positif yang setara dan penting bagi kelas pekerja. Neoliberalisme menantang hubungan intim antara kebebasan pribadi dan tatanan pasar berbasis properti pribadi. Oleh karena itu, neoliberalisme diharapkan dapat lebih mengakomodasi kebebasan sipil dan pribadi dari ketidakpedulian atau bahkan permusuhan terhadap kepemilikan pribadi dengan misalnya mengatur hak-hak pekerja yang harus dipenuhi lewat pengawasan oleh pemerintah (Gaus, 2003).

Selain tiga faktor empiris yang dirangkum oleh Gaus di atas, neoliberalisme diharapkan dapat memberikan pembaruan pada sistem perekonomian yang lebih teratur. Tujuannya adalah agar tidak ada lagi otoritas yang lebih tinggi dari pelaku pasar itu sendiri sehingga perekonomian berjalan atas dasar sama-sama membutuhkan dan diuntungkan sebagai individu. Kaum neoliberal memandang bahwa keterikatan peran negara tidak dapat dipungkiri sejak mekanisme pasar bersinggungan dengan hak-hak individu dan kesetaraan. Oleh karena itu perlu adanya pengawasan yang teratur dari otoritas politik/pemerintahan untuk menjaga hak-hak individu tersebut atas nama menjaga keseimbangan sistem pasar namun pada batas peranan yang seminimal mungkin. Contoh praktis dari prinsip neoliberalisme misalnya semakin terbukanya negara dalam kebijakan perdagangan dan investasi bahkan perpindahan tenaga kerja lewat struktur kerjasama bilateral, multilateral dan regional seperti Uni Eropa dan NAFTA di mana tujuannya adalah untuk memperoleh efisiensi produksi dan peningkatan persaingan sumber daya yang paling efektif.

2.4 Perkembangan Neoliberalisme Di Amerika Serikat Dan Perancis

Semenjak kondisi stagflasi ekonomi tahun 1970-an, neoliberalisme mulai menggantikan beberapa jenis teori dan kebijakan ekonomi yang dominan di Barat (keynesian) juga beberapa bagian dunia pada umumnya. Pergeseran radikal dalam filsafat ekonomi ini membuka jalan bagi kebijakan ekonomi Ronald Reagan di AS dan Margaret Thatcher di Inggris yang berorientasi pada prinsip neoliberalisme dengan mengutamakan permintaan spontan, moneterisme, dan ekonomi penawaran untuk berkembang (Harvey, 2005:12). *Chicago School of Economics* memberikan pengaruh kuat pada pemikiran ekonomi dan kebijakan sosial ekonomi neoliberalisme di seluruh dunia, termasuk negara-negara Amerika Selatan dan negara pasca-sosialis di Eropa Tengah dan Timur lewat kebijakan yang dikenal dengan istilah *washington consesensus*. Bahkan doktrin neoliberalisme memberikan dasar bagi transisi sosial-ekonomi di negara-negara sosialis. Runtuhnya sosialisme yang dimulai di Polandia, menyebar ke negara-negara lain dari blok sosialis (termasuk Uni Soviet) di akhir 1980-an dan awal

1990-an, menandai keruntuhan paham sosialisme ini yang pada momentumnya menyebabkan penyatuan kembali Jerman (Nuti, 2018). Perubahan struktur negara sosialis ini membuat neoliberalisme menjadi ide dominan dalam penataan sistem dunia utamanya setelah perang dingin berakhir.

Karakteristik neoliberalisme dapat digambarkan dalam tiga aspek pendekatan. Pertama dalam aspek ekonomi, banyak model kebijakan negara yang mengacu pada pola privatisasi, *global finance*, kerjasama strategis baik bilateral-multilateral ataupun regional yang melepaskan batas-batas negara baik dalam bentuk penghilangan hambatan perdagangan bahkan perpindahan modal dan pekerja untuk memaksimalkan keuntungan individu (perdagangan bebas). Neoliberalisme percaya bahwa kemampuan pasar dalam mengarahkan efisiensi ekonomi lewat penarikan barang-barang publik ke dalam properti individu dapat meningkatkan pendapatan pajak karena efektivitas konsumsi individu ditentukan berdasarkan kebebasan pilihan mereka, peningkatan daya saing dan inovasi juga lebih dinamis, penentuan upah buruh juga secara otomatis ditentukan oleh kemampuan pasar sehingga beban pemerintah hanya terletak pada jaminan kelancaran berjalannya pasar (Thorsen, 2006:5-14), serta beberapa pola ekonomi neoliberal lain yang kemudian menyimpulkan sebuah efisiensi ekonomi yang ditentukan oleh pasar.

Kedua dalam aspek politik, neoliberalisme mengubah interaksi kepentingan lewat susunan wacana diskursus yang komprehensif. Hal ini dapat diamati dari pola dominasi neoliberal yang berkembang membentuk prinsip normatif dalam politik internasional yang mengutamakan diplomasi dan dialog. Neoliberalisme membentuk suatu kecenderungan etis dari kebijakan negara, utamanya pada orientasi politik para elite kiri di AS dan Eropa Barat, di mana mereka percaya bahwa keamanan ekonomi hanya akan didapatkan apabila individu dibebaskan dari belenggu otoritarian. Sehingga untuk mencapai liberalisasi pasar dibutuhkan penyebaran nilai-nilai demokrasi di seluruh dunia. Kepentingan ini dapat dilihat misalnya pasca perang dingin berakhir, banyak penyebaran pentingnya nilai-nilai perlindungan pada individu utamanya pada isu kemanusiaan dan kesamaan hak atas politik oleh AS dan negara-negara Eropa

Barat kepada negara-negara lain contohnya terciptanya *Arab Spring*, selain AS dan Uni Eropa juga menggunakan *platform-platform* komisi PBB seperti *United Nation High Commissioner for Refugee* (UNHCR) dalam menangani isu pengungsi (UNHCR, 2017), *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam isu pembangunan sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan (UNDP, 2017) serta *United Nations Security Council* (UNSC) dalam resolusi konflik untuk mengirimkan tentara mereka sebagai “penjaga perdamaian” (United Nations Peacekeeping, 2018).

Berdasarkan dua pendekatan di atas dapat dinyatakan bahwa neoliberalisme membentuk keterkaitan dengan makna globalisasi. Keterkaitan ini disebabkan karena suasana yang diciptakan oleh neoliberalisme mengantarkan interaksi global antar negara yang saling terbuka, memungkinkan adanya kontak dari perbedaan-perbedaan nilai yang dibawa masing-masing tempat. Interaksi ini kemudian dalam pendekatan sosial telah mempengaruhi tindakan dan cara hidup masyarakat. Neoliberalisme mengantarkan masyarakat pada akses budaya yang jauh lebih luas daripada sebelumnya, mengantarkan mereka pada pintu gerbang untuk melihat, mendengar bahkan mengalami fenomena yang tidak pernah dapat diakses sebelumnya (Birch dan Mykhnenko, 2005:209). Kesalahan konsepsi, stereotip, dan risiko hilangnya hak kekayaan budaya dan intelektual adalah konsekuensi dari akses globalisasi ini, sehingga tidak mengherankan dapat menciptakan adanya kecenderungan penolakan atau sentimen bahkan berakhir dengan diskriminasi dan isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar-golongan).

2.4.1 Implementasi Neoliberalisme di Amerika Serikat

Secara khusus, kesuksesan AS dalam memanen hasil dari neoliberalisme berhasil merestorasi kembali pendapatan negara mereka utamanya bagi elite penguasa pasca kehilangan dominasinya pada Depresi Hebat dan Perang Dunia II. Hal ini dibuktikan dengan pasca penerapan kebijakan neoliberalisme pada tahun 1970-an, tepatnya pada tahun 1978 bagian penghasil pendapatan utama (kelompok elite pemilik modal) di AS yang berkontribusi terhadap pendapatan nasional AS melonjak naik dari hanya 2 persen menjadi 6 persen pada akhir abad

20 (Harvey, 2005:16). Capaian tersebut tidak lain dengan melibatkan beberapa persyaratan kebijakan seperti mengkonfrontasi adanya kekuatan serikat buruh (*trade union*), menyerang semua bentuk solidaritas sosial yang menghambat persaingan (misalnya prasyarat pemerintah termasuk pengaruh kekuatan profesional atau asosiasi), membongkar komitmen negara kesejahteraan, privatisasi perusahaan publik (termasuk program perumahan sosial), mengurangi pajak, mendorong inisiatif kewirausahaan dan menciptakan iklim bisnis yang menguntungkan untuk mendorong arus masuk investasi asing yang kuat (Harvey, 2005:24).

Namun disisi lain, efek redistributif yang ditimbulkan dari neoliberalisasi ini meningkatkan proyek ketimpangan sosial-ekonomi di AS. Kelompok elite berusaha memperbaiki kerugian akibat adanya Depresi Hebat dan berlakunya sistem Keynesian untuk mengambil alih kembali keunggulan mereka yang telah di dapat utamanya pada periode 1913-1928. Hal ini dapat dilihat dari pola yang terjadi setelah neoliberalisme berjalan di AS, di mana kecenderungan tingkat angka ketidaksetaraan pendapatan (*gap*) antara masyarakat umum dengan kelompok elite pemilik modal semakin kentara atau dengan kata lain pola peningkatannya terlihat hampir sama seperti saat sebelum Depresi Hebat tahun 1929-1933 terjadi (di mana saat Liberal klasik masih mendominasi sistem perekonomian di AS). Artinya, pola ketimpangan ini terlihat akan berulang seperti saat liberalisme klasik masih mendominasi tatanan ekonomi-politik di AS dibandingkan saat konsep Keynesian mendominasi sistem politik di sana antara tahun 1950-1960an, yang mana masalah ketidaksetaraan pendapatan tersebut relatif lebih rendah dan stabil (tidak lebih dari 3 persen). Gambar 2. 1 menunjukkan bagaimana skema kenaikan ini terlihat. Skema inilah yang kemudian menurut analisis Gérard Duménil dan Dominique Lévy (Harvey, 2005:16) dianggap bahwa sejak awal neoliberalisme terbentuk, sistem ini merupakan proyek untuk mencapai pemulihan kekuatan kelas.



Gambar 2.1 Diagram persentase ketidaksetaraan pendapatan di AS, Perancis dan Inggris pasca neoliberal bergulir sampai pada akhir abad ke 20. (Task Force on Inequality and American Democracy, American Democracy in an Age of Rising Inequality dalam Harvey, 2005 : 17).

2.4.2 Implementasi Neoliberalisme di Perancis

Adopsi neoliberalisme di Perancis tidak berjalan se-liberal AS ataupun Inggris. Dalam hal ini kelompok elite Perancis tidak memanfaatkan momentum kebangkitan liberalisme lewat neoliberalisme untuk mengembalikan kekuatan kelas mereka. Hal ini disebabkan oleh situasi ekonomi di Perancis yang belum sesuai dengan prasyarat kebijakan neoliberalisme. Menurut analisis (Harvey, 2005 : 115) Perancis lebih mengadopsi neoliberalisme pragmatis, di mana ketika korporatisme²¹ adalah paradigma yang berkuasa di AS dan Inggris, Perancis tidak cocok dengan paradigma model ini karena salah satu pengaruhnya adalah kelemahan serikat buruhnya (*trade union*). Hal ini menyebabkan pemerintah Perancis kemudian lebih mengendalikan neoliberalismenya sendiri berdasarkan dengan prioritas mereka sehingga pada akhirnya membuat perkembangan *income*

²¹ Korporatisme merujuk pada organisasi yang didalamnya terdiri dari para pelaku industri profesional yang mendominasi/mengendalikan politik negara dengan prinsip korporasi ekonomi sebagai nilai utama untuk mengatur kehidupan/aktivitas masyarakat. Merujuk pada kamus online Merriam-Webster diakses dalam <https://www.merriam-webster.com/dictionary/corporatism> pada 11 Juli 2019

share dari para pemilik modal utama di Perancis terhadap pendapatan nasional Perancis relatif lebih stabil sampai pada akhir abad 20. Hal ini dapat dilihat sejak era setelah Perang Dunia II tahun 1948 sampai akhir 1998 dimana *income share* dari para pemilik modal utama di Perancis terhadap pendapatan nasional tidak pernah sampai menyentuh angka 3 persen, bahkan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan era liberalisme klasik tahun 1928 ke belakang. Artinya, adopsi neoliberalisme pragmatis/moderat Perancis menyebabkan tingkat ketimpangan pendapatan di Perancis justru relatif lebih kecil dibandingkan saat periode liberalisme klasik. Gambar 2. 1 menunjukkan bagaimana skema ini terbentuk.

Neoliberalisme pragmatis Perancis berarti kebijakan neoliberalisme yang diinterpretasikan sendiri/disesuaikan oleh Perancis. Neoliberalisme pragmatis yang dimaksud Perancis misalnya dapat dilihat dari kebijakan pajak struktural yang kurang progresif apabila dibandingkan dengan metode yang dilakukan Amerika Serikat di dalam kebijakan pajak, subsidi, dan industri karena Perancis pada periode pasca Perang Dunia II tidak langsung berorientasi pada kesejahteraan sosial (individu sebagai aspek utama kekayaan), melainkan lebih pada pertumbuhan ekonomi (pemerataan). Sehingga kemudian paradigma “variasi dari kapitalisme” mengambil alih dari bidang neoliberalisme ini. Perancis di satu sisi menolak korporatisme, karena jelas kebijakan yang diambil tidak se-“liberal” ekonomi Amerika Serikat ataupun Inggris, tetapi disisi lain juga tidak mengadopsi “ekonomi terkoordinasi” seperti yang dilakukan Jerman.

Rezim pasca Perang Dunia II di Perancis lebih dapat dicirikan sebagai *state-led economy*. Semua pertumbuhan ekonomi Perancis berada dalam pelayanan nasionalisme atas nama mengamankan perekonomian negara, utamanya dalam melayani perkembangan modal. Saat Perancis berubah dari negara ekonomi pertanian dan kerakyatan menjadi negara ekonomi yang didasarkan pada industrialisasi seperti tetangga-tetangganya di Eropa, Perancis mengambil konsep “negara kesejahteraan” yang bertujuan untuk memberikan asuransi sosial untuk kelas menengah (untuk meredam transisi saat ke arah ekonomi industri) daripada mementingkan redistribusinya dan kebijakan industri

lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi daripada *full employment*²². Sehingga dapat dilihat persentase dari kontribusi individu terhadap pendapatan nasional Perancis relatif stagnan dan setara. Argumen dari penjelasan ini adalah kuatnya peninggalan *state-centric* pada periode revolusi dan pascaperang menciptakan ekonomi-politik terstruktur yang menguntungkan bisnis dan kelas menengah yang akibatnya meningkatkan kesetiaan terhadap status quo di Perancis. Dampak dari *state-centric* ini yang akhirnya mengesampingkan kelompok kepentingan dan kekuatan struktur politik partai, yang akhirnya meredam inovasi-inovasi politik oleh elite di Perancis dalam upayanya untuk mengembalikan keunggulan atau dominasi keuntungan ekonomi seperti saat masa liberalisme klasik. Secara keseluruhan *income gap* relatif tidak terlalu terlihat akibat dari kebijakan ini.

Namun, krisis keuangan yang dimulai pada tahun 2007-2008 menandai awal dari suatu akhir dari posisi dominan doktrin neoliberalisme dalam teori dan kebijakan ekonomi di negara-negara di seluruh dunia. Krisis ekonomi tahun 2007-2008 membuat beberapa negara skeptis dengan pemikiran keefektifan sistem finansial global yang ternyata hanya memberi dampak berupa efek domino negatif dari dinamisnya pasar. Kuatnya ketergangtungan pasar global terhadap kestabilan pasar domestik besar seperti AS, Eropa dan Cina telah menimbulkan kekhawatiran yang tidak menentu bagi beberapa pihak. Perubahan utamanya di negara-negara maju yang mendukung praktik neoliberalisme nyatanya juga telah membentuk pergeseran manfaat dari neoliberalisme sendiri (Birch dan Mykhnenko, 2010:175-181).

Pergeseran manfaat utamanya yang dirasakan di negara-negara pendukung neoliberalisme dapat diamati dari beberapa fenomena. Tumbuhnya fenomena-fenomena seperti semakin eksklusifnya para elitis karena kepemilikan modal mereka dapat mendikte kebijakan negara sedangkan ketimpangan yang semakin tinggi terjadi akibat subsidi yang diminimalkan sementara berbagai

²² *Full employment* adalah kondisi dimana hampir semua orang yang mampu bekerja dan ingin bekerja (sumber daya pekerja) dapat dimaksimalkan rasionya untuk bekerja (Crook, 2018).

sektor dikomersilkan, banyaknya pengalihan produksi kepada negara-negara dengan upah murah untuk mendapatkan efisiensi produksi sehingga menghilangkan lapangan pekerjaan kelas buruh (*blue-collar*) di negara maju, sistem kerja sama regional seperti pasar bebas di Uni Eropa yang membawa beban anggaran lebih besar pada negara maju seperti Inggris yang memutuskan untuk melakukan referendum terkait keanggotaannya karena dianggap hanya membebani pertumbuhan ekonomi Inggris (Brexit), sampai permasalahan fenomena perpindahan masyarakat seperti imigran (karena sistem neoliberal yang mengakomodasi nilai-nilai moral perlindungan, kebebasan individu untuk mencari kesejahteraan mereka sehingga meningkatkan tanggung jawab negara maju untuk mengakomodasi kebebasan kehidupan mereka dan efisiensi upah dari pekerja asing) ternyata membawa masalah baru bagi penduduk “asli” karena kekhawatiran akan rasa aman yang terancam akibat kedatangan para imigran/pencari suaka tersebut.

Serangkaian kejadian-kejadian di atas membuat meningkatnya dukungan pada pemikiran-pemikiran alternatif seperti gerakan populis yang berorientasi nasionalis, disintegrasi dan konservatif. Dukungan ini terutama datang dari orang-orang atau kelompok dan kalangan yang memiliki karakteristik tradisional, berpendidikan rendah, ortodoks, ekstrimis dan *blue-collar*. Fenomena tren dari gejolak ini tidak luput pula terjadi di Perancis dan Amerika Serikat.

BAB 3

POPULISME DI AMERIKA SERIKAT DAN PERANCIS

Sentimen terhadap neoliberalisme secara umum dapat dianalisis lewat unsur motif dan tujuan diberlakukannya sistem ideologi ini. Banyak yang berpendapat bahwa sejak awal pembentukannya neoliberalisme hanya digunakan sebagai alat memperbaharui dan memperlancar kepentingan negara-negara penganut liberalisme untuk mendapatkan kembali keuntungan mereka. Seperti yang diutarakan oleh Birch dan Mykhnenko (2005:114) bahwa penolakan neoliberalisme ini didasarkan pada tiga alasan utama. Pertama, neoliberalisme dijalankan hanya sebagai proyek kelas ideologis normatif yang dimaksudkan untuk memulihkan kekuatan kelas borjuis. Hal ini dikarenakan berjalannya kebijakan neoliberal berkaitan dengan proyek nasional para elitie negara dan pemodal dari negara paling maju perekonomiannya di Barat yang bermaksud untuk mengurangi kekuatan kelas pekerja di sana dengan cara menciptakan dan memelihara cadangan tenaga kerja eksternal. Asumsinya bahwa perkembangan kekuatan kelas pekerja di Barat telah membawa kerugian dan mengancam keuntungan yang dimiliki para elitis sehingga mereka menggunakan pilihan eksternal sebagai alternatif untuk mempertahankan keuntungan sembari tetap menekan kekuatan kelas pekerja internal.

Kedua, neoliberalisme dipahami sebagai proyek neo-imperial. Asumsinya bahwa liberalisasi perdagangan internasional dan investasi serta aliran tenaga kerja selektif adalah sebuah strategi yang disengaja oleh negara-negara kapitalis Barat untuk mengunci keunggulan komparatif mereka, demi mencegah negara-negara berkembang menggunakan substitusi impor sekaligus mengembangkan industri saingan ataupun memperbesar pendapatan negara berkembang itu sendiri. Contoh kecil yang dapat dilihat misalnya saja pada tahun 2000, di mana 62 dari 100 merek paling berharga di dunia merupakan merek dagang dari perusahaan asal Amerika Serikat (Quelch, 2003).

Ketiga, neoliberalisme dimanifestasikan sebagai ideologi fundamental untuk mencapai pasar yang sempurna. Tujuan awal pemberlakuan neoliberalisme

bagi beberapa negara maju adalah untuk mendukung terciptanya pasar sempurna di mana seluruh aktivitas manusia didasarkan pada mekanisme pasar namun ironisnya, manifestasi neoliberalisme ini menjadi fenomena yang diakui secara universal sebagai keyakinan memperbaiki pasar yang lebih konklusif dan komprehensif bagi negara berkembang, padahal pada implementasinya syarat-syarat pembentuk manifestasi diperlakukan sebagai proses yang beraneka ragam secara spasial dan terkadang sementara di negara-negara berkembang tersebut sehingga tidak heran apabila kemudian tujuan dari pasar yang sempurna untuk mencapai perbaikan ekonomi tersebut menciptakan hasil yang berbeda atau tidak sesuai dengan ekspektasi negara pengadopsi sehingga kemudian justru menimbulkan kerugian ataupun gejolak. Apabila ditelisik lebih dalam sebenarnya syarat tujuan pasar sempurna ini hanya dimanifestasikan dalam strategi negara yang menghasilkan proses neoliberalisasi itu sendiri yaitu negara Barat dengan lingkungan perekonomiannya yang sudah maju (Birch dan Mykhnenko, 2005:114) sehingga apabila hasil yang diinginkan sesuai dengan manifestasinya hal itu dikarenakan negara-negara maju ini cocok dengan rencana pasar yang demikian, namun di saat negara berkembang kemudian mencoba mengadopsinya terkadang prasyarat pembentukannya berbenturan dengan realitas domestik yang ada sehingga bisa dikatakan tidak cocok dengan model pembangunan yang demikian. Dua alasan pandangan terakhir di atas kemudian menjadi masuk akal apabila di negara berkembang muncul reaksi kritik terhadap neoliberalisme, sebab negara berkembang cenderung dirugikan dari berlakunya sistem neoliberalisme dibandingkan negara maju.

Namun menariknya, kritik dan sentimen atas berlakunya neoliberalisme saat ini juga sedang berkembang di negara-negara maju (Barat). Padahal asumsi selama ini yang berkembang bahwa Barat akan relatif lebih diuntungkan dari implementasi neoliberalisme, mengantarkan pada sebuah pernyataan bahwa negara-negara Barat akan cenderung untuk terus mendorong dan mempertahankan berlakunya neoliberalisme. Perkembangan sentimen ini dapat dilihat dari meningkatnya dukungan terhadap aktor-aktor elite populis yang mengkritik

berjalannya neoliberalisme utamanya lewat kasus yang terjadi pada pemilu AS tahun 2016 dan Perancis pada 2017.

3.1 Populisme dalam Kritiknya Pada Neoliberalisme

Populisme sebagai sebuah gaya politik tidak pernah diidentifikasi sebagai sebuah pemikiran atau ideologi filosofis. Penjabaran mengenai populisme oleh banyak kalangan menekankan bahwa populisme hanya merupakan sebuah ungkapan dari reaksi kekesalan akibat ulah elite politik dominan. Populisme merupakan sebuah bayangan permanen sebagai konsekuensi dari praktik sistem politik perwakilan. Selalu ada kemungkinan bagi aktor untuk berbicara bahwa mereka berjuang atas nama "*real people*" sebagai cara untuk bertarung dengan elite yang sedang kuat kala itu. Populis tidak menentang prinsip politik perwakilan; mereka hanya bersikeras bahwa hanya mereka sendirilah yang sah untuk perwakilan tersebut (Muller, 2016:101).

Khusus dalam tulisan ini, populisme ditekankan pada sebuah ekspresi kemarahan dari akumulasi ketidakadilan yang dijalankan oleh neoliberalisme. Kemarahan ini kemudian ditarik pada upaya narsistik bahwa hanya kelompok populis yang dapat memperbaiki sistem ketidakadilan yang telah berjalan. Mengidentifikasi pada kepentingan "masyarakat umum", elite populis mengklaim bahwa hanya mereka sendiri yang mewakili rakyat. Kelompok populis menganggap bahwa semua pesaing politiknya pada dasarnya tidak sah dan siapa pun yang tidak mendukung mereka bukan bagian dari "masyarakat", dan ketika populis berada di sayap oposisi, mereka akan selalu bersikeras bahwa semua elite tidak bermoral, sedangkan "rakyat" adalah sebuah entitas moral, homogen yang kehendaknya tidak bisa salah (Muller, 2016:101).

Kelompok populis berpandangan bahwa neoliberalisme dalam tataran implementasinya membawa kesenjangan sosial dan ekonomi. Tumbuhnya fenomena elitisme dan pluralitas penduduk menjadi sebuah kerangka permasalahan yang mendasari ketidakadilan bagi "masyarakat asli" (Galston, 2018:18). Sistem neoliberal yang mengakomodasi adanya pasar terbuka ternyata mengorbankan mata pencaharian pekerja kelas "*blue collar*". Hal ini dikarenakan

setiap pelaku usaha akan secara fluktuatif mencari keuntungan dan biaya produksi yang paling efisien dari satu wilayah ke wilayah lain. Sedangkan pada saat yang sama permasalahan perpindahan arus modal ini diperparah dengan terbukanya konsep perbatasan negara untuk orang lain dapat bermigrasi dan menetap mencari sumber kesejahteraan di tempat *blue collar* tersebut berada. Hal ini kemudian menumbuhkan perasaan keterancaman dan persaingan yang lebih sulit dalam mencari kesejahteraan di negara “asli” tempat penduduk *blue collar* itu tinggal.

3.2 Perkembangan Populisme di Amerika Serikat dan Perancis

Populisme disebut-sebut sedang mengalami kenaikan besar dalam beberapa tahun terakhir di AS dan Perancis utamanya pasca krisis finansial tahun 2008. Gaya politik populis yang dibawa oleh aktor elite seperti Trump dan Le Pen dalam pemilu dengan memanfaatkan sentimen-sentimen yang berkembang di masyarakat sebenarnya bukan merupakan gaya politik baru. Populisme telah ada sejak abad ke-19 (Molloy, 2018). Di bawah ini akan dipaparkan sedikit mengenai perjalanan perkembangan populisme di AS dan Perancis.

3.2.1 Populisme di Amerika Serikat

Populisme di AS pertama kali muncul sejak Partai Populis agraris (Partai Rakyat) terbentuk pada tahun 1890. Partai Rakyat ini adalah kalangan *blue-collar* yang mencoba menentang kaum elite mapan yang mendominasi berjalannya politik dua partai di AS (Molloy, 2018). Upaya yang mereka lakukan inilah yang menjadi dasar pemikiran apa yang disebut saat ini sebagai populisme di AS.

Pengaruh perjalanan neoliberalisme kemudian mendorong pemikiran populisme menjadi lebih mendapat suara kembali akhir-akhir ini. Para elite kedua partai utama di AS yaitu Republik dan Demokrat semakin terlihat terikat pada bisnis besar, terutama bisnis kapitalisme besar yang berdiri mendominasi di antara kepentingan khusus lainnya dan telah berfungsi sebagai sebuah klub eksklusif dari kelompok masyarakat yang saling menguntungkan diri mereka sendiri. Akibatnya, kelompok elite ini benar-benar kehilangan kontak dengan orang Amerika kelas menengah dan pekerja biasa (*blue collar*). Di dalam Partai Republik misalnya,

elite adalah "sayap bagi para pebisnis" dan menjadi faksi yang menyusut ke dalam aliran neokonservatif khususnya terhadap kebijakan luar negeri. Sedangkan di dalam Partai Demokrat, elite terdiri dari kaum neoliberal kelas profesional yang menggabungkan pemikiran-pemikiran berorientasi pasar dengan nilai-nilai progresifitas misalnya intensifikasi feminisme, *same sex marriage* yang kemudian membentuk politik identitas (Freeman, 1986:330-336).

Salah satu justifikasi awal menguatnya populisme akibat dari neoliberalisme di AS adalah adanya gerakan *Tea Party* pada tahun 2009 dan *Occupy Wall Street* tahun 2011. *Tea Party* adalah gerakan politik konservatif fiskal Amerika di dalam Partai Republik yang menyerukan adanya penurunan pajak yang lebih rendah, pengurangan utang nasional Amerika Serikat dan tuntutan defisit anggaran federal melalui penurunan pengeluaran pemerintah (Rosenthal, 2013). Gerakan ini mendukung prinsip-prinsip *small government* (meminimalisir keterlibatan pemerintah dalam sektor publik dan swasta) dan menentang layanan kesehatan universal yang disponsori pemerintah. Gerakan *Tea Party* telah digambarkan sebagai gerakan konstitusional populer yang terdiri dari campuran libertarian, populis sayap kanan, dan aktivisme konservatif yang puncaknya berhasil menciptakan *government shutdown*²³ pada kebijakan *obamacare*. Gerakan lain yang menjadi justifikasi menguatnya populisme di AS adalah gerakan *Occupy Wall Street* (OWS). Gerakan protes sayap kiri yang dimulai pada 17 September 2011 di *Zuccotti Park* yang terletak di distrik keuangan Wall Street Kota New York ini adalah untuk melawan ketimpangan ekonomi. Masalah utama yang diangkat oleh *Occupy Wall Street* adalah ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, ketamakan, korupsi, dan pengaruh yang tidak semestinya dari korporasi terhadap pemerintah, terutama dari sektor jasa keuangan. Slogan OWS, "Kami adalah 99%", merujuk pada ketimpangan pendapatan dan kekayaan di AS antara 1% orang yang terkaya di antara total populasi AS lainnya (The Occupy Solidarity Network, 2011).

²³ *Government shutdown* adalah istilah politik di AS saat kongres gagal menyepakati anggaran yang diperlukan untuk operasi pemerintahan (Watson, 2018).

Penjelasan di atas mengungkapkan bahwa populisme di AS tidak datang pada ideologi satu partai melainkan lebih pada ciri khas yang dibawa oleh seorang kandidat. Fenomena yang terjadi di dalam diri partai Republik dan Demokrat dari adanya gerakan *Tea Party* dan OWS menjelaskan bahwa protes ini diwakili oleh pemikiran populisme dari kelompok tertentu yang menginginkan perubahan sistem neoliberalisme yang berjalan yang kemudian didorong oleh seorang kandidat yang maju dalam representasi politik. Populisme bisa datang dari kedua pihak, dan yang bisa lebih ditekankan adalah datang dari beberapa kandidat tertentu. Trump merupakan salah satu kandidat dari Republik yang mencoba menggunakan gaya populisme ini. Trump datang dengan menggambarkan diri sebagai kelompok di luar politik yang mencoba mengubah hegemoni elitisme di AS atas nama kepentingan kelompok umum. Hal ini juga terjadi di sayap Demokrat di mana Bernie Sanders melakukan upaya-upaya kritik utamanya dalam fenomena kapitalisme yang hanya menguntungkan kaum elite pemilik modal atas nama merepresentasikan kepentingan “rakyat biasa” dan mereka yang merasa tertinggal akibat globalisasi (Muller, 2016:1-20).

Setelah adanya gerakan *Tea Party*, sentimen terhadap berlakunya neoliberalisme pada kelompok Republik mulai menguat kembali pada Pemilu Presiden AS 2016. Nilai-nilai kampanye Trump yang populis²⁴ dalam mengangkat isu imigran, perdagangan dan Islam koheren dengan permasalahan yang sedang berkembang bagi rata-rata kelompok *blue-collar* AS. Karakteristik politik Trump yang nasionalis, mengkritisi pola penyebaran modal dunia di mana Trump melihat AS terlalu banyak membantu ekonomi negara-negara lain lewat banyaknya modal yang keluar dari AS sehingga membuat kekuatan perekonomian AS menurun membuat sebuah justifikasi bahwa Trump sedang mengungkapkan retorika populisnya untuk diakui oleh pemilih yang berfikir sama. Trump mengkritik efektivitas berjalannya NAFTA dan TPP yang hanya menguntungkan negara anggota lain dan cenderung merugikan AS, juga bersikap keras terhadap

²⁴ Seseorang, terutama politisi, yang berusaha untuk menarik perhatian orang-orang biasa yang merasa bahwa kepentingan mereka diabaikan oleh kelompok-kelompok elit yang sudah mapan (Molloy, 2018).

fenomena imigran terutama dari Meksiko dan Islam yang dilihatnya sebagai ancaman keamanan serius bagi masyarakat AS. Pandangan nasionalis ini dirangkai oleh Trump dalam slogan masa kampanyenya “*Make America Great Again*” (Donald J. Trump Inc., 2015).

3.2.2 Populisme di Perancis

Seperti halnya di AS, populisme di Perancis bisa datang dari kelompok partai kiri dan kanan. Secara historis populisme di Perancis pertama kali diperkenalkan setelah Perang Dunia II oleh seorang legislator yang duduk di parlemen Perancis bernama Pierre Poujade (Ivaldi, 2019). Poujade meninggalkan pengaruh radikal populis kanan di Perancis dan menjadi cikal bakal pembentukan partai ekstrem kanan oleh Jean Marine Le Pen pada tahun 1980 bernama *National Front* (FN). Sedangkan populisme dari partai kiri pertama kali ditemukan pada Parti Communiste Français (PCF), yang kemudian pada akhir tahun 2000-an mulai mendapatkan saingan dari partai-partai populis kiri lainnya seperti Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) dan Mélenchon (Ivaldi, 2019).

Dalam dekade pertama, keberadaan partai FN masih dianggap kurang populer. FN berdiam di pinggiran kehidupan politik Perancis mewakili sisa-sisa gerakan fasisme²⁵ di Eropa Barat. Setelah membangkitkan kembali slogan-slogan yang digunakan oleh kaum fasis Perancis pada tahun 1930-an, FN berupaya untuk masuk ke dalam konstelasi politik Perancis dengan menghimbau para veteran Perang Aljazair dan para pengikut populisme sayap kanan gerakan Poujadisme untuk mendukung pencalonan Jean Marine Le Pen pada pemilu presiden tahun 1981, namun hal tersebut gagal dicapai karena tidak sampai mendapatkan 500 dukungan suara (Kindred, 2017).

Kemudian pada rentan waktu 1980-an sampai 2000-an FN menjadi *prototype* populis di Perancis yang mulai berkembang memasuki ranah pemilu di Perancis. Pangkalan pertamanya berada di selatan, tempatnya saat Jean-Marie Le

²⁵ Fasisme adalah sebuah prinsip atau pemahaman golongan nasionalis ekstrem yang menganjurkan pemerintahan otoriter. Merujuk pada kamus online KBBI Daring diakses dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fasisme> pada 13 Juli 2019.

Pen membangun dukungan di antara para pemukim Perancis yang kembali dari Aljazair pasca merdeka pada tahun 1970-an. Pangkalan kedua adalah di bagian pinggiran utara dan timur Perancis di mana basis suara ini adalah basis yang pernah mendapat pengaruh kuat sosialis atau komunis. Meskipun begitu, sampai pada pencalonan terakhir Jean-Marie Le Pen pada pemilihan presiden tahun 2007, FN masih menjadi partai kecil yang kurang diperhitungkan di Perancis. Baru pada tahun 2011 FN kemudian berkembang lebih pesat di bawah kepemimpinan anak dari Jean-Marie Le Pen yaitu Marine Le Pen menjadi partai yang populer di beberapa tempat utamanya di wilayah pinggiran Perancis lainnya.

Salah satu justifikasi perkembangan populisme di Perancis dapat dilihat pada naiknya popularitas FN. Gaya politik yang dibawa oleh anggota partai FN dengan menglorifikasi pentingnya identitas nasional Perancis sebagai alat utama memperbaiki setiap masalah yang terjadi di Perancis mulai mendapatkan perhatian utamanya dari kelompok-kelompok *blue collar* yang merasa dirugikan oleh globalisasi. Perkembangan FN dibangun dan berlanjut di wilayah-wilayah pinggiran Perancis. FN sekarang memiliki rumah ketiga pada daerah yang disebut Christophe Guilluy (2019:121-130) sebagai "*Pheripheral France*". Dalam lingkaran komune antara 40 km dan 50 km dari pusat kota Paris misalnya, kandidat FN dalam pemilihan regional 2015 lalu, Wallerand de Saint-Just (seorang legislator dari FN) memenangkan 32% suara. Sedangkan di jarak lebih jauh sekitar 80 km atau lebih, ia mencetak 41% sepenuhnya. Wilayah-wilayah ini adalah daerah di mana kebanyakan pabrik-pabrik yang dulu mempekerjakan ribuan orang menjadi tutup, di mana aplikasi Uber, skema berbagi sepeda dan *work space* (skema berbagi ruangan untuk beberapa kantor/usaha) telah banyak ditemukan serta di mana orang merasa bahwa globalisasi telah melupakan mereka (Ivaldi, 2019). Ciri-ciri tradisional ini yang membentuk pola yang paling mencolok dari segregasi kelompok pendukung bagi FN dan bukan, di mana kelompok bukan pendukung mayoritas adalah orang-orang kosmopolitan yang hidup di kota-kota Perancis yang merasa nyaman dengan globalisasi, sedangkan kelompok pendukung FN adalah orang-orang dengan tempat-tempat di mana lahan pertanian dan perasaan diabaikan karena globalisasi berada.

Faktor lain yang secara umum menambah perkembangan FN adalah serangkaian fenomena gejala ekonomi dan keamanan di Perancis. Kegagalan mantan Presiden Hollande semasa kepemimpinannya tahun 2012 sampai 2017 dalam hal-hal seperti tingkat pengangguran yang tinggi dan beberapa serangan atas terorisme pada Januari dan November 2015 membuat banyak orang Perancis menginginkan perubahan drastis dalam politik Perancis. Apalagi Marine Le Pen membuat citra FN menjadi tidak se-fasis ayahnya dengan mencoba untuk mengganti kesan partainya menjadi lebih baru dan deradikalisasi²⁶ untuk mendapatkan lebih banyak dukungan dan agar lebih mudah diakses oleh orang kebanyakan, sembari tetap mempertahankan fondasi inti dari partai politik radikal dan ide-ide sederhana misalnya *nationalism* (Pedder, 2019). Orang-orang yang memilih *Front National* merasa bahwa partai ini dapat membawa perubahan lebih baik daripada partai-partai sayap kiri.

Selain itu, xenofobia juga menjadi alasan peningkatan popularitas FN. Serangan teroris beberapa tahun ini adalah alasan bagi banyak warga muda Perancis untuk memilih Marine Le Pen dan partainya. Ideologi *anti-enlightment*²⁷-nya yang mencakup sikap anti-imigran dan Islam membantunya mendapatkan dukungan dari golongan pemilih muda Perancis yang ingin secara drastis mengubah politik Perancis terkait beberapa masalah keamanan ini (Maly, 2017).

Serangkaian penjelasan atas fenomena dukungan di atas mengungkapkan bahwa FN mulai mendapatkan popularitasnya pasca partai ini mencoba untuk mengidentifikasi gaya populismenya terhadap pemilih Perancis. Anggota dari partai FN mengupayakan sebuah identifikasi diri partai yang menolak seluruh kebijakan globalisme yang hanya merugikan bagi warga Perancis. Mereka mencoba mengidentifikasi diri sebagai agen pembela dan penjaga kepentingan masyarakat umum Perancis. Ciri-ciri inilah yang kemudian disebut sebagai gaya

²⁶ Deradikalisasi adalah sebuah praktik untuk mendorong penganut ideologi agama atau politik yang radikal untuk mengadopsi pandangan yang lebih moderat. Merujuk pada kamus online KBBI Daring diakses dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/deradikalisasi> pada 12 Juli 2019

²⁷ Maksud dari *anti-enlightment* disini adalah perspektif yang mewakili penolakan terhadap prinsip-prinsip rasionalitas, hukum-hukum alam dan hak-hak manusia dengan kata lain bahwa segala sesuatu harus kembali dan patuh pada ajaran gereja.

populis dalam politik. Gaya populis ini dilakukan oleh aktor-aktor politik dengan memainkan kepentingan pemilih lewat serangkaian fenomena yang telah terjadi agar kemudian dapat berakhir pada bentuk dukungan dari pemilih.



BAB 4

PENINGKATAN KRITIK TERHADAP NEOLIBERALISME DI AMERIKA SERIKAT DAN PERANCIS

Keberhasilan Trump dan Le Pen dalam mengkritik neoliberalisme di negara pendukung neoliberalisme seperti AS dan Perancis mengejutkan berbagai pihak. Di saat upaya yang dilakukan kedua aktor elite ini mendapatkan banyak kecaman sekaligus kekhawatiran baik dari masyarakat dan politisi internal negara tersebut ternyata keberhasilan yang didapatkan kedua aktor elite ini dalam memanfaatkan gejolak dari neoliberalisme di luar dugaan. Signifikansi dukungan dari upaya kritik terhadap neoliberalisme berhasil mengantarkan Trump menang dalam pemilihan presiden AS tahun 2016 dan Le Pen pada putaran pertama pemilihan presiden Perancis 2017.

Disisi lain bukan berarti bahwa kekalahan Le Pen dalam pemilihan presiden Perancis tahun 2017 membentuk anti-tesa dari justifikasi peningkatan kritik terhadap neoliberalisme di Perancis. Justru Le Pen dan partainya sedang mengalami kenaikan besar dari kritiknya terhadap neoliberalisme. Hal ini dapat dilihat berdasarkan pengamatan pada hasil yang partai ekstrem kanan ini dapatkan pada pemilu 2017. Selain secara mengejutkan berhasil mengantarkan Le Pen melesat pada putaran kedua, kesuksesan politisi dari FN yang duduk di kursi legislatif Perancis dan Uni Eropa juga semakin bertambah yaitu dari 2 kursi di pemilihan legislatif Perancis tahun 2012 menjadi 8 kursi di tahun 2017, sedangkan pada pemilihan parlemen Uni Eropa dari hanya 3 kursi di tahun 2009 menjadi 23 kursi untuk perwakilan Perancis di parlemen Uni Eropa sekaligus menjadi partai dengan kursi terbanyak di tahun 2014 (European Parliament, 2019). Hal ini menjadi justifikasi bahwa signifikansi materi Le Pen dan partainya dalam mengkritik neoliberalisme juga sedang berkembang pesat di Perancis.

Bab ini menekankan pada analisis faktor dan alasan dari berkembangnya sentimen/kritik terhadap neoliberalisme di AS dan Perancis. Dalam tulisan ini pertimbangan untuk menggunakan AS dan Perancis sebagai contoh kasus berkembangnya sentimen neoliberalisme di Barat didasarkan pada selain alasan

bahwa kedua negara merupakan penyelenggara besar dari neoliberalisme yang berlatar belakang sebagai negara maju, juga karena hasil yang didapatkan dari kedua aktor elite populis dalam mengkritik neoliberalisme di masing-masing negara mereka dapat dikatakan paling sukses dan mencolok. Sehingga penggunaan dua variabel negara ini dapat semakin menumbuhkan justifikasi bahwa sentimen kritik terhadap neoliberalisme memang sedang berkembang di Barat.

4.1 Marginalisasi Kelompok *Blue Collar* Sebagai Akibat Pelaksanaan Neoliberalisme

Perkembangan neoliberalisme telah merugikan kepentingan kelompok *blue collar*. Seperti yang telah dipaparkan di bab dua, di saat sejarah perjalanan sistem neoliberalisme di AS yang ekstrem pada mekanisme dan implementasinya, ternyata dampaknya telah membawa kecenderungan pada kerugian yang didapatkan oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu utamanya yang berciri *blue collar* di AS. Hal ini dibuktikan setelah neoliberalisme berjalan di AS, kecenderungan pola hasil yang terjadi hanya mendorong pada kepentingan kelompok elitis saja, menumbuhkan misalnya tingkat ketidaksetaraan pendapatan di AS semakin kentara (Harvey, 2005:16). Sedangkan yang terjadi pada kasus Perancis, meskipun perjalanan neoliberalisme di negaranya lebih moderat dalam tataran implementasinya, namun kesenjangan antara kaya dan miskin tetap ada. Meski Perancis berada di bawah rasio Inggris dan Amerika Serikat (OECD, periode laporan 2014-2017) dalam grafik ketimpangan ekonomi, Perancis memiliki reaksi populis yang sama. Hal ini disebabkan karena pasca neoliberalisme berjalan beberapa orang Perancis merasakan adanya situasi tidak aman dan tertinggal akibat globalisasi dari neoliberalisme. Kecenderungan perasaan dirugikan bagi kelompok *blue collar* Perancis ini misalnya dapat dilihat dari rata-rata jumlah pendukung untuk Le Pen yang merupakan kalangan yang tinggal di pinggiran negara Perancis yang paling merasakan dampak deindustrialisasi, invasi imigran dan sebagian pemilih muda yang paling merasakan dampak kesulitan ekonomi akibat neoliberalisme (The Local Fr, 2017).

Keadaan yang berjalan pasca neoliberalisme bergulir di AS dan Perancis ternyata cenderung berakhir pada absolutisme kepentingan elite penguasa tertentu. Contoh paling signifikan dalam fenomena ketimpangan di AS misalnya data *inequality index* atau rasio gini AS yang mencapai 0.396 pada tahun 2013 dan menempati urutan kelima negara dengan tingkat ketimpangan pendapatan paling tinggi pada periode survei tahun 2014-2017 di seluruh dunia (OECD, periode laporan 2014-2017). Sedangkan kasus yang terjadi di Perancis adalah mengenai permasalahan pengangguran. Ekonomi Perancis mengalami pemulihan yang lambat sejak krisis keuangan 2008 mengemuka, di mana angkanya hampir 10% dari total penduduk produktif Perancis dan merupakan yang tertinggi kedelapan di antara 28 negara anggota Uni Eropa lainnya (BBC News, 2017). Hal ini membuat sebagian masyarakat Perancis kemudian menganggap bahwa kebijakan neoliberalisme milik elite ternyata tidak memberikan signifikansi keuntungan bagi keberlangsungan kesejahteraan perekonomian mereka. Fenomena elitisme dalam neoliberal yang membuat ketimpangan ekonomi di AS dan Perancis di atas menunjukkan bagaimana kaum *blue collar* merasa dirugikan akibat berjalannya neoliberalisme. Pengaruh-pengaruh perubahan lingkungan berspektrum sosial-ekonomi seperti eksklusivitas elite, ketakutan terhadap imigran, pergeseran industri manufaktur ke negara lain dan penurunan tingkat kesejahteraan ekonomi membuat beberapa golongan masyarakat yang tidak senang atau paling terdampak dengan keadaan feodalisme baru ini (neoliberalisme) merasa dirugikan.

Selain neoliberalisme telah mengakomodasi kepentingan elite saja, kerugian neoliberalisme bagi kelompok *blue collar* juga berhubungan dengan isu imigran. Perjalanan neoliberalisme yang mengakomodasi isu imigran juga menjadi masalah sensitif di Barat. Neoliberalisme dikaitkan pada kebijakan ekspansi usaha yang menghilangkan mata pencaharian utama bagi kelompok *blue collar*, sedang pada waktu yang sama neoliberalisme dianggap mengancam bagi eksistensi kelompok *blue collar* karena memfasilitasi adanya perpindahan masyarakat lain ke negaranya yang dikhawatirkan akan mengambil alih pekerjaan mereka. Di saat neoliberalisme memberikan fasilitas yang terbuka (*borderless*) kepada pekerja asing untuk masuk dan bersaing dengan penduduk domestik, hal

ini membuat isu imigran yang dibawa oleh aktor populis seperti Trump dan Le Pen menjadi mengena di kalangan utamanya kelompok kulit putih/nativisme dan *blue collar* (lebih terpengaruh pada nilai-nilai xenofobia) (Flegenheimer dan Barbaro, 2016). Di tengah situasi yang tidak disenangi oleh kaum *blue collar* inilah kemudian mendorong keputusan mereka untuk mendukung kritik yang diutarakan Trump dan Le Pen. Xenofobia atas ancaman imigran gelap bagi kelompok *blue collar* ini dapat dilihat misalnya dari hasil survey (Gallup, 2019) mengenai isu imigran gelap di AS :

Tabel 4.1 Survey pendapat masyarakat Amerika Serikat terhadap masalah imigran gelap tahun 2010-2016 (Gallup, 2019)

Next, I'm going to read a list of problems facing the country. For each one, please tell me if you personally worry about this problem a great deal, a fair amount, only a little or not at all? How much do you personally worry about illegal immigration?

	Great deal	Fair amount	Only a little	Not at all	No opinion
	%	%	%	%	%
2016 Mar 2-6	37	23	22	17	*
2015 Mar 5-8	39	24	20	16	1
2014 Mar 6-9	33	24	24	18	1
2013 Mar 7-10	37	23	26	14	*
2012 Mar 8-11	34	23	24	17	1
2011 Mar 3-6	42	23	20	14	*
2010 Mar 4-7	39	25	21	14	*

^ Asked of a half sample; * Less than 0.5%

Tabel 4.1 di atas mengungkapkan bahwa sebagian besar warga AS menganggap masalah imigran menjadi masalah yang perlu untuk diselesaikan. Ditunjukkan pada komparasi jumlah persen responden yang menganggap bahwa masalah imigran merupakan masalah yang penting selama periode tujuh tahun berturut-turut. Nampaknya jumlah warga AS yang menganggap bahwa imigran

gelap merugikan masyarakat AS selalu mendominasi baik sebelum hingga mendekati pemilu Presiden 2016 di AS. Jumlah ini bertahan pada angka yang signifikan mendominasi dibandingkan masyarakat AS yang menganggap bahwa isu imigran gelap ini merupakan isu yang biasa-biasa saja, tidak signifikan ataupun tidak membahayakan sama sekali.

Isu xenofobia juga terjadi pada kelompok *blue collar* Perancis. Ancaman terorisme dan imigran menjadi daftar paling mendorong orang untuk mendukung kritik Le Pen terhadap neoliberalisme, di mana lebih dari 230 orang telah tewas dalam serangkaian serangan terorisme dalam dua tahun terakhir di Perancis yang kebanyakan dilakukan oleh orang-orang dari latar belakang imigran yang memegang paspor Uni Eropa atau lainnya (France24, 2017). Masalah ekspansi imigran gelap di kota-kota pinggiran Perancis seperti di Calais dan rangkaian serangan terorisme sejak 2015 membuat persepsi negatif masyarakat Perancis terhadap imigran naik 5% menjadi total 29% dibandingkan tahun 2013 yang hanya 24% (Pew Research, 2016).

4.2 Populisme Versus Neoliberalisme pada Masa Kampanye Pemilihan Presiden di AS Tahun 2016 dan Perancis Tahun 2017

Di saat implementasi dari neoliberalisme memberi gejolak pada sebagian masyarakat di AS dan Perancis, Trump dan Le Pen datang dengan gaya politik populisnya untuk mengkritik berjalannya neoliberalisme. Serangkaian fenomena-fenomena atas gejolak dari neoliberalisme dimanfaatkan dengan sangat baik oleh kedua elite populis ini untuk meraih dukungan lewat serangkaian bentuk kampanye dan pernyataan dalam debat pemilu. Mereka dengan lantang menyuarakan perbaikan sistem yang selama ini merugikan “masyarakat”. Trump dan Le Pen menjadi lebih mudah menggunakan retorika populisnya dan memanfaatkan kondisi yang ada untuk mengambil suara dari pemilih yang termarginalkan oleh neoliberalisme. Misalnya Trump yang mengupayakan relevansi status quo di AS dengan menumbuhkan sentimen bahwa keadaan yang rata-rata kelompok *blue collar* rasakan telah diabaikan oleh kelompok elite (Homolar dan Scholz, 2019:352). Hal ini juga dilakukan oleh Le Pen dengan

menumbuhkan sentimen *euroceptism* dan permusuhan pada kelompok globalis yang mendukung berjalannya Uni Eropa, karena dianggap telah membawa kesengsaraan ekonomi pada warga Perancis (The New York Times, 2017). Di bawah ini akan dijelaskan salah satu bukti pembenaran populisme Trump dan Le Pen pada kritik terhadap neoliberalisme di AS dan Perancis.

4.2.1 Kritik Trump terhadap Neoliberalisme dan Ketegasan Sikapnya kepada Populisme

Kritik Trump terhadap neoliberalisme dapat dilihat dari beberapa narasi yang diutarakannya baik dalam bentuk teks di media sosial twitter, maupun verbal dalam kampanye dan debat. Dengan mencitrakan bahwa media pemberitaan saat ini dipenuhi dengan kepentingan elite sehingga esensi netralitas tidak ada di sana, Trump berhasil meraih banyak perhatian lewat tulisan twitternya maupun beberapa pernyataan yang kontroversial. Beberapa bentuk rangkaian retorika yang menggambarkan kritik Trump terhadap berlakunya neoliberalisme secara garis besar dapat dibagi menjadi dua isu utama yaitu persoalan perdagangan dengan Cina dan imigran gelap Meksiko. Semenjak awal pengumuman kandidasinya sebagai calon Presiden, Trump mulai mengutarakan beberapa sentimen kritiknya terhadap neoliberalisme.

Pertama, Trump mencoba mengkritik berjalanya neoliberalisme pada masalah ekonomi di AS. Trump mengupayakan sebuah gambaran atas kerugian yang diderita AS akibat neoliberalisme yang berlebihan dengan membingkainya pada penurunan perekonomian AS khususnya dengan Cina, selain juga menghilangkan pekerjaan-pekerjaan sektoral utamanya bagi kelompok *blue collar*. Padahal faktanya lapangan kerja manufaktur di Amerika Serikat justru meningkat sejak 2010 (Mutz, 2017:3). Pengkaitan kerugian ini terus diutarakan Trump, seperti yang ia utarakan pada debat pertama Presiden 2016 melawan Hillary :

“Our jobs are fleeing the country. They're going to Mexico. They're going to many other countries. You look at what China is doing to our

country in terms of making our product. They're devaluing their currency, and there's nobody in our government to fight them...Because they're using our country as a piggy bank to rebuild China, and many other countries are doing the same thing. So we're losing our good jobs, so many of them...But we have to stop our jobs from being stolen from us. We have to stop our companies from leaving the United States and, with it, firing all of their people. All you have to do is take a look at Carrier air conditioning in Indianapolis. They left -- fired 1,400 people. They're going to Mexico. So many hundreds and hundreds of companies are doing this...We cannot let it happen. Under my plan, I'll be reducing taxes tremendously, from 35 percent to 15 percent for companies, small and big businesses. That's going to be a job creator like we haven't seen since Ronald Reagan. It's going to be a beautiful thing to watch...Companies will come. They will build. They will expand. New companies will start. And I look very, very much forward to doing it. We have to renegotiate our trade deals, and we have to stop these countries from stealing our companies and our jobs.”(Washingtonpost, 2016).

Perkataan ini menyiratkan bagaimana Trump berupaya menggambarkan situasi yang secara mutlak merugikan perekonomian AS. Trump membungkus keterancaman perekonomian nasional AS dengan menuduh Cina dan Meksiko telah mencuri keuntungan yang besar dari hasil perdagangan dengan AS. Trump mengupayakan sebuah penuduhan bahwa kerugian perekonomian AS selama ini akibat ulah elite dominan AS yang hanya mementingkan keuntungan pribadi mereka sendiri dengan berupaya menyulut kemarahan masyarakat AS atas situasi perekonomian saat ini yang menurun pasca neoliberalisme berjalan. Perasaan kemarahan dan kekecewaan kepada elite globalis ini didukung dengan data misalnya di saat perdagangan AS-Cina mulai mengalami defisit perdagangan dari \$ 273,1 miliar pada 2010 ke tertinggi sepanjang sejarah AS sebesar \$ 295,5 miliar pada 2011. Peningkatan defisit ini menyumbang tiga perempat dari pertumbuhan defisit perdagangan AS pada tahun 2011 (CFR, 2011). Hal inilah yang kemudian digunakan Trump sebagai alat untuk menyalahkan elite-elite neoliberal dalam menjalankan kebijakan perekonomian negara selama ini, sembari mengutarakan maksud untuk merepresentasikan kekecewaan masyarakat yang dirugikan akibat berjalannya neoliberalisme dengan menawarkan beberapa kebijakan termasuk mengkritisi berjalannya NAFTA dengan mencoba meninjau ulang kerjasama

perdagangan ini serta bermaksud memberlakukan tarif perdagangan dengan Cina.

Selain itu, permasalahan imigran gelap juga menjadi isu utama kampanye politik Trump kepada pemilih. Trump selalu berusaha mencitrakan bahwa ancaman imigran gelap (utamanya dari Meksiko) menjadi ancaman serius bagi kesejahteraan masyarakat AS. Lewat serangkaian pidato, kampanye, debat dan twitternya Trump selalu menegaskan pada ancaman imigran gelap. Trump membungkus isu imigran sebagai sebuah kerugian yang membuat keadaan keamanan dan perekonomian di AS semakin buruk. Seperti yang diutarakannya pada pengumuman pencalonan sebagai kandidat Presiden pada 16 Juni 2015 :

"When Mexico sends its people, they're not sending their best ... They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with [them]. They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists. And some, I assume, are good people" (Washingtonpost, 2019).

Ucapan ini mengarahkan pada retorika pemberian label bahwa mayoritas imigran Meksiko adalah penjahat. Selain Trump mengupayakan sebuah bentuk ketakutan (xenofobia) pada Islam, dia juga menggambarkannya pada imigran-imigran gelap ini. Lewat kebijakannya yang ingin membangun tembok perbatasan dengan Meksiko, mengungkapkan suatu upaya Trump yang ingin mencitrakan bahwa akibat kebijakan neoliberalisme ternyata AS sedang menghadapi masalah "keamanan" yang serius. Meskipun retorikanya ini mendapat reaksi keras dari beberapa kelompok masyarakat di AS namun nampaknya kelompok *blue-collar* kulit putih menjadi kelompok yang paling setuju dengan pernyataan Trump ini. Hal ini misalnya dapat dilihat dari hasil survei pendapat yang dilakukan (Gallup, 2017) pada tanggal 7-11 juni 2017, di mana sebanyak 45% responden mengatakan bahwa dampak imigran terhadap keamanan di AS semakin memburuk, 43% tidak berubah, 9% membaik dan 3% tidak memberikan pendapat pada pertanyaan seberapa buruk pengaruh imigran terhadap situasi keamanan di AS.

Kedua isu utama di atas menjelaskan bagaimana gaya Trump merupakan bentuk dari populisme. Sejak awal Trump muncul dengan membingkai ketakutan-ketakutan massa atas kerugian yang diderita AS akibat perdagangan bebas dan fenomena imigran gelap yang mengancam keamanan sosial-ekonomi masyarakat AS sebagai sikap politiknya. Dari upaya tersebut Trump kemudian mengungkapkan perlu adanya pemberlakuan tarif kembali, merevisi segala bentuk kerjasama perdagangan regional dan membangun tembok perbatasan. Serangkaian bentuk kritik Trump terhadap neoliberalisme ini kemudian dianggap oleh mayoritas pemilih AS yang merasakan hal yang sama dari berlakunya neoliberalisme merupakan suatu hal yang relevan dengan kepentingan pemilih AS. Hal ini berarti bahwa Trump sedang berupaya mendeklarasikan diri sekaligus meyakinkan pemilih bahwa dia adalah kelompok representasi dari kepentingan non-elite yang pada akhirnya menambah kepercayaan dukungan pemilih terhadap Trump. Terbukti pada hasil akhir pemilu AS 2016 di mana wilayah-wilayah basis demokrat yang banyak mendukung Obama pada pemilu 2012 saat Obama mengalahkan Romney dengan 12 persen margin poin (55,3 persen - 43,3 persen), berubah menjadi mendukung Trump di sebagian besar negara-negara bagian *Mid-west* ke utara seperti di Iowa yang bahkan mencapai hampir 20 persen margin poin (56,4 persen - 37,0 persen) (Fahey dan Wells, 2019).

Kampanye yang dilakukan Trump selama masa pemilu Presiden AS tahun 2016 bisa dikatakan merupakan salah satu “pemberontakan” terhadap para elite. Trump merepresentasikan gelombang “populisme” melawan “elite” politik, ekonomi, dan intelektual/teknokratis dengan selalu mengutarakan bahwa keadaan saat ini hanya dikuasai oleh orang-orang elite tertentu, demi keuntungan mereka sendiri (Flegenheimer dan M. Barbaro, 2016). Trump dengan ciri khas dalam konstelasi politiknya yang mengkritik bahkan mengejek para kandidat lain baik didalam pemilihan internal partai Republik (*national convention*) termasuk Senator Texas Ted Cruz, Senator Florida Marco Rubio, Gubernur New Jersey Chris Christie, pengusaha Carlie Fiorina, mantan Gubernur Florida Jeb Bush, Gubernur Ohio John Kasich ataupun lawan kandidasi dalam pemilu Presiden yaitu Hillary Clinton telah membawanya pada opini publik bahwa dirinya adalah

kelompok yang merepresentasikan ketidakpercayaan publik terhadap birokrat dan pemerintah federal (Olson, 2016). Interaksi verbal yang dilakukan Trump secara khas datang dalam bentuk tuduhan yang ditujukan terhadap elite dominan dengan atribut anti-elite dan kemudian tuduhan dalam tindakan politik ini menjadi menonjol, yang pada akhirnya menggiring pada bentuk legitimasi opini publik AS bahwa Trump adalah kalangan non-elite yang akan membawa angin segar bagi perubahan kebijakan ekonomi di AS. Trump berupaya menggambarkan atau mendefinisikan dirinya sebagai representasi masyarakat umum yang sedang berjuang melawan elite-elite yang berdiri di dalam konstelasi politik. Di tengah-tengah semangat *anti-establishment* yang dibuat Trump ini, gaya Trump yang vulgar, melewati batas, dan tidak ortodoks terbukti menghantam para pemilih jauh lebih relevan dibandingkan Clinton (Flegenheimer dan M. Barbaro, 2016).

Selain retorika permusuhan terhadap kelompok elite di atas, Trump juga berupaya menonjol dengan membawa kerangka-kerangka permasalahan imigrasi dan perdagangan. Sikap Trump yang mempertaruhkan seluruh kampanyenya pada gagasan bahwa permusuhan populer terhadap imigrasi dan kebijakan perdagangan bebas, membawanya masuk ke dalam Gedung Putih. Dari awal hingga akhir kampanye, ia berulang kali kembali pada dua masalah utama tersebut. Misalnya dalam pidato disela-sela kampanyenya dia berjanji akan membangun tembok di perbatasan Meksiko dan mendeportasi 11 juta imigran gelap, dia juga berjanji untuk menggubah perjanjian perdagangan bebas dan mengembalikan pekerjaan dalam sektor manufaktur dengan merevisi perjanjian dagang NAFTA dan menghukum negara-negara yang selama ini mengambil untung dari AS utamanya Cina (Homolar dan Scholz, 2019:351-358). Sejak hari pertama, ia menjadikan kebijakan xenofobia dan nasionalis sebagai inti dari kampanyenya. Trump menggiring opini publik pada sebuah peninggalan kebijakan dari pemerintahan sebelumnya yang tidak benar-benar mementingkan kepentingan orang Amerika dan oleh karenanya dia ingin memperbaikinya lewat beberapa kebijakan di atas.

Hasil dari keputusan atau strategi Trump untuk fokus pada imigrasi dan perdagangan terbayar dalam pemilu. Hal ini bahkan dia lakukan dengan sangat baik di negara bagian dengan basis demokrat tradisional seperti Wisconsin,

Michigan dan Pennsylvania yang kesemuanya memiliki populasi besar atas pemilih kelas pekerja kulit putih. Padahal calon-calon dari partai Republik sebelumnya seperti John McCain yang menganut kebijakan imigrasi dan Mitt Romney yang menganjurkan perdagangan bebas, tidak pernah berhasil terhubung dengan pemilih *blue collar* di wilayah Great Lakes ini (Alberta, 2018). Kebijakan perdagangan, anti-imigrasi dan proteksionis Trump memberinya kesempatan unik kepada pemilih kelas pekerja kulit putih, dan ia memanfaatkannya sebaik mungkin. Sehingga apabila ditanyakan mengapa model Trump yang mengkritik neoliberalisme menjadi menguat di AS jawabannya terletak pada permusuhan publik yang intens dan meluas terhadap politik, media, dan bisnis yang menguasai negara. Kepercayaan pada institusi berada pada titik terendah sepanjang masa neoliberalisme di AS dan mayoritas orang Amerika percaya bahwa negara ini menuju ke arah yang salah pasca Trump mencoba merepresentasikannya dalam pemilu. Suasana publik yang marah dan bergejolak membuat pemilu Presiden 2016 menjadi pemilu penuh perubahan yang dimanfaatkan secara sempurna oleh Trump. Serangkaian bentuk identitas dan gaya politik Trump di atas dapat disebut sebagai populisme.

4.2.2 Kritik Le Pen terhadap Neoliberalisme dan Ketegasan Sikapnya kepada Populisme

Sementara kritik yang dilakukan Le Pen terhadap neoliberalisme secara garis besar dapat dilihat dari serangkaian kampanye politik yang dilakukannya pada pemilihan presiden Perancis tahun 2017. Tidak jauh berbeda dengan Trump, Le Pen juga menggunakan retorika-retorika populisme dalam menarik perhatian pemilih. Le Pen menggunakan seruan patriotis melawan globalis untuk mendefinisikan istilah *the people vs the elites* dalam model populisnya. Beberapa kali dalam kampanye dan debat, Le Pen mencoba untuk mengutarakan bahwa identitas dirinya adalah seseorang yang mementingkan kepentingan masyarakat Perancis dibandingkan para elite-elite lain yang berhaluan “globalis” yang menurutnya telah membawa Perancis pada masalah besar dalam lingkup neoliberalisme. Beberapa kebijakan yang Le Pen promosikan sebagai model

patriotis ini misalnya melindungi ekonomi Perancis dari investasi asing dan berusaha melepaskannya dari “belunggu Eropa” (France24, 2016). Tidak jauh berbeda dari Trump, gaya retorika populisme Le Pen berkuat pada upaya penuduhan atas masalah-masalah yang terjadi di Perancis seperti krisis ekonomi dan imigran, di mana kesemuanya itu merupakan akibat dari kebijakan peninggalan kelompok globalis yang mendukung berjalannya sistem neoliberalisme yaitu Uni Eropa.

Le Pen menekankan pada identifikasi kesalahan besar atas neoliberalisme dari Uni Eropa yang selama ini menjadi sumber permasalahan bagi Perancis. Beberapa kerugian yang disusun oleh Le Pen akibat adanya Uni Eropa misalnya Perancis menghadapi ancaman pada imigran dan liberalisme pasar yang berlebihan yang tidak benar-benar membawa kesejahteraan bagi masyarakat Perancis. Anggapan ini seperti yang diutarakannya dalam kampanye resmi pertamanya pada kandidasi pemilihan Presiden Perancis 2016 : *“who wanted to stay in the euro, will drag down our economy, keep mass unemployment going, and give the EU leverage for imposing its views, its inept directives, its millions of migrants.”* (Quartz, 2017). Dari ungkapan ini menjelaskan bahwa Le Pen mencoba mendefinisikan kelompok-kelompok yang dilawannya pada pemilu yang mendukung neoliberalisme Uni Eropa hanya akan mengantarkan Perancis pada masalah keamanan dan penurunan perekonomian Perancis. Le Pen membingkai para kandidat lawan sebagai kelompok globalis yang melupakan kepentingan masyarakat Perancis dengan mengkaitkannya pada kesalahan-kesalahan yang terjadi akibat bentuk kebijakan yang mendukung Uni Eropa. Kesalahan ini misalnya terwujud pada ancaman keamanan nasional berupa imigran dan terorisme, yang saat ini sedang masif melanda Perancis, selain mendefinisikan pula Uni Eropa sebagai bentuk kebijakan yang tidak memberikan signifikansi pembangunan ekonomi bagi masyarakat Perancis karena masih banyak ditemukannya jumlah pengangguran dari warga Perancis. Dalam pidatonya di Fréjus September 2016 lalu, Le Pen berulang kali berbicara tentang “rakyat” menggambarkan secara esensial bagaimana sebuah negara Perancis yang tidak

berdaya dalam menghadapi liberalisme ekonomi dan multikulturalisme yang dipaksakan dari luar negeri terutama dari Uni Eropa (Vinocur, 2017).

Lebih mendalam dibidang isu imigrasi, multikulturalisme, dan identitas nasional, Le Pen konsisten pada strategi seperti yang ia lakukan pada pemilihan Uni Eropa tahun 2012 untuk semakin memperjelas aturan konservatifnya. Hal ini sesuai dengan manifesto partainya berisi proposal untuk memotong jumlah imigrasi menjadi 10.000 per tahun, melakukan deportasi besar-besaran, mempersulit hak suaka, hak tinggal dan status kebangsaan Perancis. Janji-janji ini misalnya diutarakannya pada masa kampanye di kota Fréjus, yang dibingkai dalam frasa “imigrasi besar-besaran” kemudian menghubungkannya pada pertanyaan tentang identitas nasional (Maurer dan Diehl, 2017). Kebijakan imigrasi dan multikulturalisme dianggap Le Pen telah menjadi agama dogmatis yang konsekuensi dari hasil akhirnya hanya akan mengarahkan pada “perang saudara antar komunitas”. Lebih dari sekali ia berbicara tentang “satu bahasa, satu budaya” sebagai hal penting bagi martabat manusia dalam satu komunitas nasional. Oleh karena itu Le Pen ingin sesegera mungkin untuk menghentikan kebijakan yang telah dianggapnya membahayakan Perancis ini. Salah satu kampanyenya di kota Marseille Le Pen berkata :

“More and more are coming from the third world, taking advantage of our benefits. It’s a choice of civilization. I will be the president of those French who want to continue living in France as the French do.”(The New York Times, 2017).

Pernyataan ini merupakan salah satu contoh bagaimana Le Pen menginginkan xenofobia berkembang di Perancis meskipun secara implisit. Le Pen mengutamakan tuduhan atas bentuk imigrasi besar-besaran yang mengancam identitas Perancis dan tidak lebih dari sekali mengungkapkan pentingnya homogenitas penduduk asli Perancis dengan membuat slogan “*make french more french*” (France24, 2017). Le Pen mengutarakan penggambaran atas bahaya yang akan ditimbulkan terhadap identitas nasional warga asli Perancis apabila kebijakan imigran ini terus dilakukan.

Le Pen membuat kesan bahwa akar dari seluruh masalah yang terjadi di Perancis adalah akibat dari hegemoni neoliberalisme yang berlebihan. Dalam beberapa kampanyenya, Le Pen berulang kali mengutarakan ide bahwa globalisme dari Uni Eropa telah membawa kesengsaraan ekonomi bagi warga Perancis. Seperti yang diutarakannya pada pidato di Calais tahun 2017 : *“The main thing at stake in this election is the rampant globalization that is endangering our civilization.”*(The New York Times, 2017). Upaya naratif ini menyiratkan sebuah retorika anti-globalisme yang memang sedang berkembang pada beberapa masyarakat Perancis. Le Pen ingin menggambarkan sebuah permusuhan atas globalisasi dari Uni Eropa akan menyelamatkan masyarakat Perancis dari keterancaman keamanan yang ditimbulkan baik dari segi sosial ataupun ekonomi. Lewat beberapa solusi yang kontradiktif dengan prinsip neoliberalisme, seperti berjanji akan melakukan referendum untuk memastikan keanggotaan Perancis dari Uni Eropa mengutarakan upaya Le Pen dalam memanfaatkan situasi gejolak yang ada di Perancis untuk semakin membuat pemilih Perancis percaya bahwa representasi Le Pen dalam pemilu adalah untuk melindungi kesejahteraan masyarakat Perancis dari kelompok elite.

Le Pen selalu mengutarakan pengkaitan atas situasi ketidakamanan di Perancis adalah akibat dari pengaruh neoliberalisme yang berlebihan utamanya dari Uni Eropa. Berulang kali Le Pen mengutarakan pengkaitan isu-isu terorisme adalah akibat kebijakan Uni Eropa. Pada kampanye dan debat selama pemilu, Le Pen selalu berupaya pada pengkaitan akibat neoliberalisme terbentuklah ancaman keamanan yang saat ini terjadi di Perancis seperti pada kampanyenya di Lyon :

“They’ve made an ideology out of it. An economic globalism which rejects all limits, all regulation of globalisation, and which consequently weakens the immune defences of the nation state, dispossessing it of its constituent elements: borders, national currency, the authority of its laws and management of the economy, thus enabling another globalism to be born and to grow”.(Sandford, 2017).

Pernyataan Le Pen di atas mengutarakan bahwa ia mengupayakan penggabungan fenomena globalisme dengan permasalahan keamanan di Perancis.

Le Pen menekankan perangkaian fenomena dengan retorika bahwa permasalahan yang ditimbulkan oleh elite politik sebelumnya (globalis) yang mendukung neoliberalisme menjadi dasar kesengsaraan rakyat Perancis seperti menimbulkan gejolak ekonomi, keterancaman terhadap terorisme dan masalah imigran. Namun, perlu diingat bahwa retorika politik ini bertujuan untuk menghasilkan dukungan suara dalam pemilu, maka sebenarnya seringkali korelasi antara fakta yang ada dengan materi yang diutarakan Le Pen belum tentu atau dapat dipertanyakan kebenarannya.

Penggabungan fenomena-fenomena di atas kemudian mendasari Le Pen pada janji-janji perbaikan kondisi di dalam negeri Perancis terutama dalam ranah hukum, keamanan dan ketertiban sosial. Hal ini dapat dilihat pada upaya Le Pen yang akan lebih tegas memerangi nilai-nilai “permisif” yang selama ini membuat kekacauan di Perancis. Termasuk dalam janji kampanye ini adalah Le Pen akan melarang organisasi dan mendeportasi semua orang asing dengan menginvestigasi ulang status kewarganegaraan Perancis pada imigran melalui sistem deportasi dan penahanan, menyediakan 15.000 polisi tambahan, menargetkan operasi keamanan pada para pemimpin geng, mengakhiri “*judicial permissiveness*” (penghakiman yang penuh toleransi) melalui toleransi nol dan hukuman yang lebih ketat, membangun lebih banyak tempat penjara dan mendeportasi pelanggar asing. Bahkan keinginan sebelumnya oleh ayahnya untuk memperkenalkan kembali hukuman mati telah diubah Le Pen menjadi janji untuk memastikan hukuman penjara seumur hidup adalah nyata (Renterghem, 2017).

Selanjutnya, Le Pen berusaha mengaitkan serangkaian fenomena di atas dengan fenomena-fenomena yang telah terjadi sebelumnya di negara-negara Barat lainnya seperti keluarnya Inggris dan kemenangan Trump di AS untuk semakin meyakinkan pemilih bahwa narasi yang diutarakan Le Pen sedang mengalami dukungan yang nyata. Le Pen terus mengutip di sela-sela kampanye politiknya bahwa Inggris telah memberikan contoh yang tepat dengan melakukan referendum untuk meninggalkan Uni Eropa. Seperti yang dikutip saat wawancaranya dengan BBC News tanggal 21 Januari 2017 :

“With Brexit, people made the choice for border control, re-industrialisation, economic patriotism, intelligent protectionism. The United States has chosen the same by electing Trump. I’ve been pushing for this new world order for years,”. (Sandford, 2017).

Ucapan Le Pen ini menjelaskan bagaimana dia berusaha untuk marangkai retorika atas fenomena-fenomena yang terjadi agar mendapatkan legitimasi. Le Pen berusaha memproklamirkan bahwa pemikirannya selama ini adalah benar dan sedang mengalami dukungan besar di berbagai negara. Di saat kemenangan Trump meledak di AS ditambah fenomena Brexit yang berhembus kencang dari Inggris membuat Le Pen memanfaatkannya sebagai dukungan bahwa pemikirannya juga sedang mengalami membenaran di negara-negara lain, maka dari itu Le Pen meyakini Perancis harus segera menyusulnya demi membangun dunia yang baru. Le Pen berusaha memanfaatkan fenomena tren perubahan dari neoliberalisme di luar sana (Inggris dan AS yang dia klaim lebih dulu menyadari permasalahan-permasalahan yang dibentuk oleh elite politik neolib dengan memilih pemimpin dan kebijakan reformatif) sebagai sebuah alat tambahan bahwa perjuangan membenaran yang pemikiran Le Pen representasikan merupakan era baru yang tidak bisa dihindarkan.

Analisis rangkuman tekstual secara deskriptif dari pengelompokan bentuk kritik di atas menyiratkan bahwa gaya yang dibawa Le Pen dalam upayanya mencari dukungan adalah populisme. Genre yang dibawa Le Pen dalam konten provokatif membuat dirinya mencoba untuk mendorong dan memanfaatkan kemarahan rakyat atas serangkaian tragedi dan fenomena yang telah terjadi di Perancis. Gaya pembujukan kepada orang-orang Perancis dengan ciri hiperbolik, tidak jujur dan tidak bermoral, mengaitkan fenomena satu dengan fenomena yang lainnya (yang terkadang nilai korelasi dan kebenarannya dapat diragukan) memunculkan suatu pemahaman bahwa permasalahan yang sedang dihadapi orang Perancis memang menjadi konsentrasi politik Le Pen yang populis. Upaya Le Pen selalu berkisar antara usaha untuk meyakinkan pemilih bahwa globalisme milik pemimpin yang mendukung neoliberalisme telah membawa dampak buruk bagi kedaulatan suatu negara dengan mengaitkannya pada bahaya-bahaya yang

telah terjadi di Perancis seperti terorisme dan multikulturalisme dari imigran serta tingkat pengangguran yang tinggi. Selain itu, Le Pen berupaya pula membuat solusi dengan misalnya menawarkan Perancis untuk meninggalkan zona Schengen Uni Eropa, memperkenalkan kembali perbatasan nasional, meningkatkan kontrol bea cukai dan pengetatan hukum-hukum permisif. Janji-janji kampanye ini menjadi daftar prioritas Le Pen paling penting sebagai bagian dari upaya untuk mengembalikan kedaulatan moneter, legislatif, teritorial dan ekonomi (Renterghem, 2017), karena sekali lagi Le Pen melihat globalisme yang berlebihan utamanya dari Uni Eropa telah menghapus manfaat bagi masyarakat Perancis.

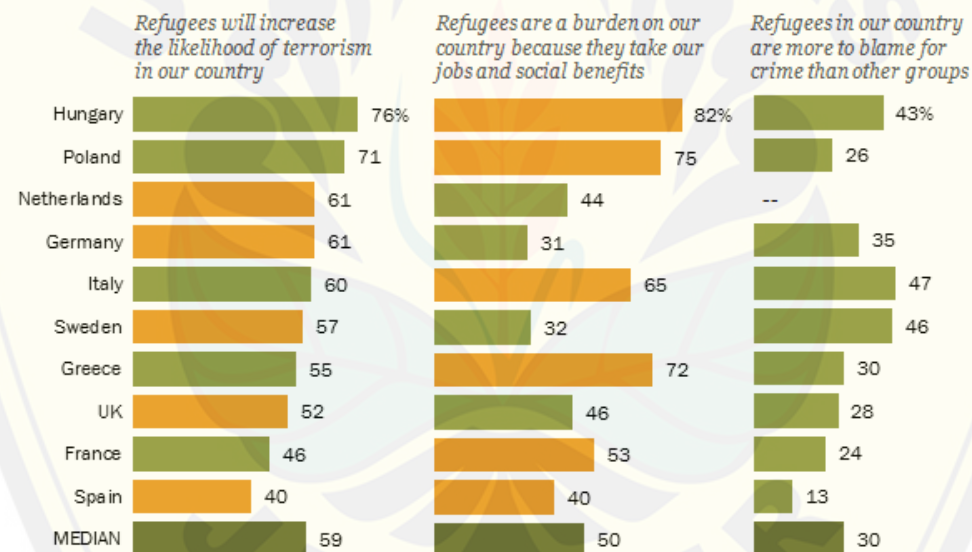
Meskipun di lain sisi tidak sedikit pula beberapa orang Perancis mengkritik rencana-rencana Le Pen, namun nampaknya Le Pen tahu persis bahwa sentimen permusuhan terhadap ide-ide globalis yang dibawanya akan mengalami peningkatan dukungan secara pesat. Le Pen datang dengan wacana baru yang hasilnya membuat Le Pen sukses melesat mengalahkan para pesaing populer lainnya seperti mantan Perdana Menteri Perancis periode 2007-2012 François Fillon, politisi kiri dari partai *Génération.s.* Benoît Hamon (dulu berasal dari the Socialist Party (PS) dan Party of European Socialists (PES) serta anggota legislatif (National Assembly) Jean-Luc Mélenchon (Maly, 2017) pada putaran pertama pemilihan Presiden Perancis tahun 2017.

Tidak berbeda jauh dengan Trump, upaya retorika populisme Le Pen mendapatkan respon signifikan dari pemilih Perancis. Upaya-upaya pemanfaatan masalah keamanan seperti serangan terorisme sampai masalah imigran dan krisis ekonomi di Perancis digunakan Le Pen untuk menyalahkan elite politik pendukung Uni Eropa untuk mendapatkan perhatian pemilih. Kebijakan nativisme dan anti-globalisme berhasil membawa Le Pen meraih 21,3 persen pada putaran pertama dan 33,9 persen pada putaran kedua melawan Emmanuel Macron pada pemilu Presiden 2017 (Ivaldi, 2018). Angka ini menandai tingkat dukungan yang monumental bagi FN mengingat hal ini belum pernah terjadi sebelumnya bagi sejarah partai ekstrem kanan Perancis manapun.

Upaya kritik Le Pen terhadap Uni Eropa mengantarkan pada sentimen pemilih terhadap kelompok-kelompok kiri di politik Perancis. Le Pen yang menggambarkan bagaimana isu imigran dan terorisme merupakan ulah dari kebijakan globalis milik kelompok kiri yang mendukung Uni Eropa membuat masyarakat kemudian mengidentifikasi Le Pen sebagai sarana perubahan untuk situasi di Perancis. Di saat Le Pen menawarkan bentuk-bentuk kebijakan yang lebih konservatif/nasionalis seperti keluar dari Uni Eropa dan membatasi jumlah imigran, membuat beberapa pemilih yang merasakan kecemasan dari dampak neoliberalisme Uni Eropa akhirnya melihat Le Pen sebagai jawaban atas permasalahan yang mereka hadapi. Hal ini misalnya dapat dilihat dari gambar 4.1

Many Europeans concerned with security, economic repercussions of refugee crisis

■ Top choice



Note: Netherlands excluded on question about crime (Q51b) due to administrative error.

Source: Spring 2016 Global Attitudes Survey, Q51a-c.

PEW RESEARCH CENTER

Gambar 4.1 Survey Pendapat Masyarakat Uni Eropa Terhadap Pencari Suaka Tahun 2016 (Pew Research, 2016).

Gambar 4.1 mengungkapkan bahwa kecemasan masyarakat Perancis terhadap dampak pencari suaka yang akan merebut pekerjaan dan bantuan sosial di Perancis menjadi kekhawatiran utama warga Perancis. Hal ini mengungkapkan bahwa dasar kekhawatiran dan alasan utama sebagian besar masyarakat Perancis memilih Le Pen adalah karena ketakutan mereka terhadap isu imigran dan melihat

bahwa Le Pen akan membawa angin segar pada perubahan kebijakan pencari suaka ini. Poling survey menyatakan bahwa hampir 53% responden lebih khawatir para imigran akan mengambil alih pekerjaan dan fasilitas sosial dari warga Perancis dibandingkan mereka yang menganggap bahwa imigran merupakan sebuah ancaman keamanan pada kasus terorisme atau bahkan label sebagai kelompok kriminal. Serangkaian retorika Le Pen dalam mengkaitkan dan memanfaatkan gejolak dari isu Uni Eropa, imigran dan terorisme inilah yang disebut populisme.

Serangkaian pemaparan retorika Le Pen dan Trump di atas tidak dipungkiri pula mengalami banyak penolakan dan kritik. Hal ini disebabkan karena Le Pen dan Trump tidak memberikan perincian yang pasti dalam programnya tentang model seperti apa yang akan menggantikan sistem kedua negara. Kebijakan yang paling kontroversial mendapat kritikan misalnya Le Pen ingin memperkenalkan kembali mata uang Perancis (franc) sebagai mata uang nasional yang diklaim sebagai sarana untuk meningkatkan daya saing Perancis, padahal beberapa kritikus berpendapat rencana ini hanya akan menjadi bencana bagi pasar keuangan dan devaluasi di Perancis (Vinocur, 2017) sedangkan di saat Trump berencana membangun tembok perbatasan dengan Meksiko hal ini juga mendapatkan reaksi penolakan keras yang sama oleh sebagian besar masyarakat AS karena kebanyakan mempertanyakan keefektifannya (Gallup, 2017). Tetapi nampaknya, kembali lagi pada pendekatan populisme, bahwa kedua aktor elite ini memang memiliki semacam alat kontroversial yang dapat menarik perhatian pemilih meski korelasi antara solusi dan perbaikan yang ditawarkan terkadang terdengar seperti hal yang utopis dan penuh tipu daya namun disisi lain juga menarik untuk kelompok-kelompok tertentu di sana. Upaya Trump dan Le Pen dalam mengkaitkan neoliberalisme dengan ancaman elitisme, imigran dan islam merupakan suatu hal yang mengungkapkan gaya retorika populisme dari kedua aktor elite ini.

Lewat beberapa kebijakan yang dijanjikan dan bersifat kritis terhadap neoliberalisme, kelompok elite populis menggunakan pendekatan yang berifat psikologis untuk mencoba mewakili kekecewaan pemilih dari situasi yang ada

saat ini (neoliberalisme). Upaya yang dilakukan elite politik saingan dari neoliberalisme ini dalam menggunakan retorika-retorika massa yang sedang berkembang dan menjadi isu penting bagi sebagian pemegang hak suara yang kemudian diarahkan pada dukungan terhadap legitimasi politik kelompok tradisional/konservatif ini mengungkapkan sebuah bentuk atau gaya politik dari populisme. Kelompok perlawanan ini menggunakan legitimasi politik dalam sistem demokrasi sebagai alat untuk mewujudkan penolakannya tersebut (Maurer dan Diehl, 2017). Kelompok populis ini berupaya menciptakan sebuah dukungan kepada pemegang hak suara dengan cara mengadopsi pemikiran-pemikiran kelompok umum yang merasa dirugikan akibat berjalanya neoliberalisme. Pemilih disodorkan pada pengkaitan fenomena ancaman yang terjadi dan dari pengkaitan atau perangkaian fenomena itu ditarik ke dalam *statement* politik dari kelompok populis seperti Trump dan Le Pen.

Menggunakan pola kritik terhadap neoliberalisme, Trump dan Le Pen relatif berhasil menumbuhkan kecenderungan keterikatan diri mereka dengan signifikansi permasalahan yang ada kepada mayoritas pemilih di kedua negara. Kritik yang dilakukan Trump dan Le Pen misalnya dengan menolak adanya kebijakan liberalisasi pasar, merevisi kebijakan pasar, disintegrasi ekonomi regional, sampai pada ranah sosial-keamanan seperti diskriminasi pada golongan tertentu (kelompok imigran karena ketakutan terhadap ancaman identitas nasional) telah berhasil mengarahkan keterikatan atas kepentingan pemilih terhadap identitas politik Trump dan Le Pen.

KESIMPULAN

Tulisan ini membahas mengenai perkembangan gerakan sentimen/kritik terhadap neoliberalisme di Barat. Asumsi yang selama ini berkembang bahwa neoliberalisme memberikan keuntungan yang relatif lebih besar bagi negara maju dibandingkan negara berkembang, misalnya bahwa ekspansi kebebasan pasar akan mengakomodasi keuntungan bagi perusahaan-perusahaan Barat lewat berkurangnya hambatan perdagangan yang masuk ke dalam pasar negara-negara berkembang sehingga Barat lebih besar dalam upayanya mendukung berjalannya sistem internasional ini ternyata telah mengalami gejolak di wilayah internal mereka sendiri. Tren ini misalnya dapat ditemukan di Amerika Serikat dan Perancis.

Temuan dari tulisan ini mengungkapkan bahwa pemberlakuan neoliberalisme yang dimulai sejak akhir 1970-an telah menyebabkan fenomena ketimpangan dan penurunan kesejahteraan ekonomi pada kelompok *blue collar*. Hal ini diperparah dengan fenomena ancaman keamanan berbasis sosial seperti isu imigran di negara-negara Barat yang kemudian dikhawatirkan akan mengambil alih mata pencaharian kelompok *blue collar* tersebut sehingga pada akhirnya menumbuhkan sentimen xenofobia. Akumulasi kerugian yang didapatkan kelompok *blue collar* inilah yang menjadi sumber utama kenaikan sentimen/kritik terhadap neoliberalisme.

Hasil kajian pada tulisan ini memperlihatkan bahwa kelompok *blue collar* bersama elite populis memanfaatkan momentum gejolak yang terjadi pasca neoliberalisme berjalan untuk semakin menguatkan kritik mereka terhadap neoliberalisme. Di saat kelompok *blue collar* yang merasa dirugikan akibat berlakunya neoliberalisme mulai menyuarakan kritiknya terhadap neoliberalisme, hal ini didukung oleh elite politik populis seperti Trump di AS dan Le Pen di Perancis. Penggunaan politik populisme Trump dan Le Pen dengan menggambarkan ancaman atas eksklusifitas elite dan imigran dari berlakunya neoliberalisme berhasil meningkatkan popularitas mereka dalam pemilu. Kritik yang dilakukan Trump dan Le Pen pada neoliberalisme dengan mencoba

mengenalkan pentingnya konsep perbatasan dan anti-pluralisme mengungkapkan bahwa kedua aktor elite ini sedang melakukan upaya-upaya politik populis dalam rangka mendapatkan dukungan pemilih yang sedang kecewa akan perfoma kebijakan pemerintah yang mengabaikan kepentingan kesejahteraan kelompok pemilih (merasa termarginalkan). Rata-rata pendukung kedua aktor ini menginginkan pembaharuan sistem kebijakan negara karena pemerintah sebelumnya dianggap telah gagal dalam mengakomodasi kesejahteraan pemilih lewat neoliberalisme. Ciri-ciri populisme Trump dan Le Pen dapat dilihat sejak mereka mencoba mengkritik berjalannya neoliberalisme dengan sentimen *anti-establishment*, anti-elite dan anti-globalisasi namun tidak bisa dipungkiri bahwa mereka sendiri merupakan bagian dan pihak yang diuntungkan dari berjalannya neoliberalisme dan hanya sekadar memanfaatkan tren yang sedang berkembang dikalangan pemilih untuk mendapatkan dukungan suara dalam pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

Beveridge, L. 1944. *Full Employment in a Free Society*. London: Allen and Unwin.

Birch, K dan Mykhnenko, V. 2010. *The Rise and Fall of Neoliberalism: the Collapse of an Economic Order?* . London: Zed Books Ltd.

Cranston, M. 1967. *The Encyclopedia of Philosophy*. New York: Macmillan.

Downs, A. 1957. *An economic theory of democracy*. New York: Harper & Row.

Evans, J. 2003. *The French Party System*. Manchester: Manchester University Press.

Guilluy, C dan M. Debevoise. 2019. *Twilight of the Elites Prosperity, the Periphery, and the Future of France*. London: Yale University Press.

Harvey, D. 2005. *A Brief History of Neoliberalism*. New York: Oxford University Press.

He, li. 2015. *Political Thought and China's Transformation: Ideas Shaping Reform in Post-Mao China*. New York: Palgrave Macmillan.

Keynes, J. M. 1936. *The general theory of employment, interest and money*. New York: Harcourt, brace and company.

Muller, J.W. 2016. *What is populism?*. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press.

Popkin, J. D. 2016. *A Short History of the French Revolution Sixth Edition*. New York: Routledge.

Robbins, L. 1965. *The Theory of Economic Policy in English Classical Political Economy*. London: Macmillan.

Sari, Niketut. 2011. *Ekonomi Teknik*. Surabaya: Yayasan Humaniora.

Stout, Jeffrey. 2010. *Blessed Are the Organized*. New Jersey: Princeton University Press.

Artikel dari Jurnal Ilmiah

Adler, Emanuel. 1997. "Seizing the Middle Ground". *Constructivism in World Politics*. 3(3): 319-363

Allsop, Richard. 2014. "LIBERALISM A Short History". *Monographs on Western Civilisation*. (4): 8-20

Alexandra, H. dan Ronny, S. 2019. "The power of Trump-speak:populist crisis narratives and ontological security". *Cambridge Review of International Affairs*. 32(3): 344-364

Cohen, D. d. 1988. "What Caused the Rise of Conservatism: A French View". *Economic Policy* 39. 3(6): 195-219.

Freeman, Jo. 1986. "The Political Culture of the Democratic and Republican Parties". *Political Science Quarterly*. 101(3): 327-356

Granzin, K. L., dan Grikscheit, G. M. 1976. "What Is Consumerism?". *Advances in Consumer Research* . 3(1): 68-72.

Galston, W.A. 2018. The Populist Challenge to Liberal Democracy. *Journal of Democracy*. 29(2): 5-19.

Homolar, A., dan Scholz, R. 2019. The power of Trump-speak:populist crisis narratives and ontological security. *Cambridge Review of International Affairs*. 32(3): 344-364

Jahan, S. dan Papageorgiou, C. 2014. What Is Monetarism?. *Finance & Development*. 51(1): 38

Rycroft, W. S. (1961). "Roman Catholic Clericalism". *Journal of Church and State*. 3(49): 172-182.

Setiawan, J dan A. Sudrajat. 2018. Pemikiran Postmodernisme Dan Pandangannya Terhadap Ilmu Pengetahuan. *Jurnal Filsafat, ISSN: 0853-1870*. 28(1): 25-28.

Siringoringo, R. 2012. "KARAKTERISTIK DAN FUNGSI INTERMEDIASI PERBANKAN DI INDONESIA". *Ekonomi Moneter dan Perbankan Bank Indonesia* . 15(1): 63.

Thorsen, D. E. dan Lie, A. 2006. "Liberalism". *What is Neoliberalism?:* 4-15.

Publikasi Tidak Diterbitkan

Khasanah, Nurul. 2016. Faktor-Faktor Psikologis Voting Behaviour Pemilih. *Skripsi*. Pekanbaru:Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Artikel dari Website

Alberta, Tim. 2018. Trump's GOP Braces for Midwest Massacre. <https://www.politico.com/magazine/story/2018/11/06/2018-election-trump-gop-midwest-222219>. ["Diakses pada" 11 Juli 2019].

Bappenas. 2008. Washington Consensus Dan Usulan Strategi Alternatif Pembiayaan Pembangunan. http://www.bappenas.go.id/files/4613/5228/2360/washington-consensus-dan-usulan-strategi-alternatif-pembiayaan-pembangunan_20081123060218_999_0.docx. ["Diakses pada" 11 Oktober 2019].

BBVA. 2018. What is a joint venture? <https://www.bbva.es/eng/general/finanzas-vistazo/empresas/jointventure/index.jsp>. ["Diakses pada" 10 Januari 2019].

Center For Civic Education. 2019. From the declaration of independent. <http://www.civiced.org/resources/curriculum/911-and-the-constitution/terms-to-know>. ["Diakses pada" 11 Juli 2019].

- Cline, Austin. 2019. Anti-Clericalism Movements Have Helped Shape History. <https://www.learnreligions.com/anti-clericalism-definition-247845>. ["Diakses pada" 11 Juli 2019].
- Constitutionnel conseil. 1958. Constitution Of October 1958. https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/anglais/constitution_anglais_oct2009.pdf. ["Diakses pada" 12 September 2019].
- Crook, Clive. 2018. Full Employment. <https://www.bloomberg.com/quicktake/full-employment>. ["Diakses pada" 11 Juli 2019].
- Chazan, D. 2018. French far-right overtakes Macron in EU parliament election poll. <https://www.telegraph.co.uk/news/2018/11/04/french-far-right-overtakes-macron-eu-parliament-election-poll/>. ["Diakses pada" 2 Februari 2019].
- Donald J. Trump Inc. 2015. Trump Pence Make America Great Again : About The 45th President of the United States. <https://www.donaldjtrump.com/about/>. ["Diakses pada" 25 Februari 2019].
- European Parliament. 2019. Results by national party: 2014-2019 France - Final results. <https://election-results.eu/national-results/france/2014-2019/constitutive-session/>. ["Diakses pada" 13 Oktober 2019].
- Flegenheimer, Matt dan M. Barbaro. 2016. Hillary Clinton and Donald Trump Presidential Election. <https://www.nytimes.com/2016/11/09/us/politics/hillary-clinton-donald-trump-president.html>. ["Diakses pada" 12 Juli 2019].
- Gaus, G. 2003. Stanford Encyclopedia of Philosophy from Liberalism. <https://stanford.library.sydney.edu.au/archives/sum2007/entries/liberalism/>. ["Diakses pada" 31 Maret 2019].
- George, Susan. 1999. A Short History of Neoliberalism. <https://www.tni.org/en/article/short-history-neoliberalism>. ["Diakses pada" 12 September 2019].

- Hamilton, K. Simon, P. dan Clara Veniard. 2004. The Challenge of French Diversity. <https://www.migrationpolicy.org/article/challenge-french-diversity>. ["Diakses pada" 12 September 2019].
- Ivaldi, Gilles. 2019. Populism in France: A Comparative Perspective. https://www.researchgate.net/publication/327799898_Populism_in_France_A_Comparative_Perspective. ["Diakses pada" 12 September 2019].
- KINDRED, ALAHNA. 2017. Brief History of The National Front. <https://thefrenchreportlondon.wordpress.com/2017/05/07/brief-history-of-the-national-front-party/>. ["Diakses pada" 12 Juli 2019].
- Maly, Ico. 2017. Increase Popularity of Marine Le Pen. <https://www.diggitmagazine.com/articles/increase-popularity-marine-le-pen-s-front-national>. ["Diakses pada" 12 Juli 2019].
- Maurer, P. dan Diehl, T. 2017. What kind of populism? A comparison of Marine Le Pen's and Donald Trump's Tweets in the French and US election campaigns of 2016/2017. https://www.researchgate.net/publication/327799898_Populism_in_France_A_Comparative_Perspective. ["Diakses pada" 12 September 2019].
- McAllister, Ian. 2016. Candidates and Voting Choice. <https://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-73>. ["Diakses pada" 13 September 2019].
- Mutz, D. C. 2017. Status threat, not economic hardship, explains. <https://www.pnas.org/content/115/19/E4330> . ["Diakses pada" 2 Februari 2019].
- National Archives. 2016. 13th Amendment to the U.S. Constitution: Abolition of Slavery. <https://www.archives.gov/historical-docs/13th-amendment>. ["Diakses pada" 11 Oktober 2019].
- Nuti, D. M. 2018. The rise and fall of socialism. <https://doc-research.org/2018/05/rise-and-fall-of-socialism/>. ["Diakses pada" 12 September 2019].

- OECD. 2017. OECD Social and Welfare Statistics: Income distribution. <https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm>. [“Diakses pada” 18 Juli 2019].
- Pethokoukis, James. 2017. The blue-collar conservative: A long-read Q&A with Henry Olsen. <http://www.aei.org/publication/the-blue-collar-conservative-a-long-read-qa-with-henry-olsen/>. [“Diakses pada” 12 September 2019].
- Pew Research Center. 2019. Europeans Credit EU With Promoting Peace and Prosperity, but Say Brussels Is Out of Touch With Its Citizens. <https://www.pewresearch.org/global/2019/03/19/europeans-credit-eu-with-promoting-peace-and-prosperity-but-say-brussels-is-out-of-touch-with-its-citizens/>. [“Diakses pada” 25 Januari 2020].
- Pew Research Center. 2016. Europeans Fear Wave of Refugees Will Mean More Terrorism, Fewer Jobs. <https://www.pewresearch.org/global/2016/07/11/europeans-fear-wave-of-refugees-will-mean-more-terrorism-fewer-jobs/>. [“Diakses pada” 16 Februari 2020].
- Quelch, John. 2003. The Return of the Global Brand-Harvard Business Review. <https://hbr.org/2003/08/the-return-of-the-global-brand>. [“Diakses pada” 15 November 2019].
- Raicho, Ralph. 2018. What Is Classical Liberalism?. <https://mises.org/library/what-classical-liberalism>. [“Diakses pada” 12 September 2019].
- Renterghem, V. Marion. 2017. Le Pen can win: she appropriates issues that matter to the French. http://www.theneweuropean.co.uk/top-stories/le_pen_can_win_she_appropriates_issues_that_matter_to_the_french_1_4870375?platform=hootsuite. [“Diakses pada” 13 Juli 2019].
- Republicans Overseas UAE. 2019. A Brief History of the Republican Party in the United States of America. <http://republicansoverseas-uae.com/republican-party-history>. [“Diakses pada” 12 September 2019].

- Rosenthal, Lawrence. 2013. The Tea Party, the government shutdown, and Obamacare. <https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:ba1d8e6b-3cb3-49ad-bf95-abfdddc2c50b>. ["Diakses pada" 13 September 2019].
- Tuckness, A. 2016. Stanford Encyclopedia of Philosophy: Locke's Political Philosoph. <https://plato.stanford.edu/entries/locke-political/>. ["Diakses pada" 31 Maret 2019].
- The Occupy Solidarity Network, Inc. 2011. We are 99%. <http://occupywallst.org/about/>. ["Diakses pada" 12 Juli 2019].
- The Local Fr. 2017. Who are the millions of French voters backing Marine Le Pen?. <https://www.thelocal.fr/20170425/who-are-the-eight-million-voters-expected-to-back-le-pen>. ["Diakses pada" 26 Februari 2020].
- UNDP. 2017. UNDP FUNDING OVERVIEW : Top Contributors 2017. https://www.undp.org/content/undp/en/home/funding/topcontributor_s.htm. ["Diakses pada" 31 Maret 2019].
- UNHCR. 2017. United Nations High Commissioner On Refugee: Donor Ranking Report. http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/donor_ranking/2017%20%20UNHCR%20Donor%20Ranking%20by%20Country.pdf. ["Diakses pada" 30 Maret 2019].
- United Nations Peacekeeping. 2018. What is Peacekeeping: How we are funded. <https://peacekeeping.un.org/en/how-we-are-funded>. ["Diakses pada" 30 Maret 2019].
- Vinocur, Nicholas. 2017. Marine Le Pen makes globalization the enemy. <https://www.politico.eu/article/marine-le-pen-globalization-campaign-launch-french-politics-news-lyon-islam/>. ["Diakses pada" 13 Juli 2019].
- Watson, Kathryn. 2018. What Shutdown in a Government Shutdown. <https://www.cbsnews.com/news/heres-what-shuts-down-in-a-government-shutdown/>. ["Diakses pada" 12 Juli 2019].
- Williamson, J. 2004. The Washington Consensus as Policy Prescription for Development. <https://www.piie.com/publications/papers/williamson0204.pdf>. ["Diakses pada" 12 September 2019].

Winanti, S. P. 2012. Melacak Asal-Usul Neoliberalisme. <http://poppysw.staff.ugm.ac.id/posts/articles/melacak-asalusul-neoliberalisme/>. ["Diakses pada" 12 Oktober 2019].

Zalta, E. N. 2018. Stanford Encyclopedia of Philosophy: Locke's Political Philosophy. <https://plato.stanford.edu/entries/locke-political/>. ["Diakses pada" 29 Maret 2019].

Zaccone, June. 2017. The Rise and Fall of Keynesian Economics. https://www.researchgate.net/publication/320274062_The_Rise_and_Fall_of_Keynesian_Economics. ["Diakses pada" 11 Oktober 2019].

Berita dari Majalah atau Surat Kabar

BBC News. 2017. Free trade area, single market, customs union - what's the difference?. <https://www.bbc.com/news/business-36083664>. ["Diakses pada" 4 Januari 2019].

BBC News. 2018. Europe and nationalism: A country-by-country guide. <https://www.bbc.com/news/world-europe-36130006>. ["Diakses pada" 7 Februari 2019].

BBC News. 2017. Marine Le Pen hails patriotism as the policy of the future. <https://www.bbc.com/news/world-europe-38705176>. ["Diakses pada" 13 Juli 2019].

BBC News. 2017. French election: Turnout sharply down in Le Pen-Macron battle. <https://www.bbc.com/news/world-europe-39833831>. ["Diakses pada" 13 September 2019].

CFR. 2019. Timeline of US-China Relations. <https://www.cfr.org/timeline/us-relations-china>. ["Diakses pada" 23 Desember 2019].

CNN News. 2015. Donald Trump's history of suggesting Obama is a Muslim. <https://edition.cnn.com/2015/09/18/politics/trump-obama-muslim-birther/index.html>. ["Diakses pada" 23 Desember 2019].

CNN Europe. 2017. France Marine Le pen Holocaust. <https://edition.cnn.com/2017/04/10/europe/france-marine-le-pen-holocaust/index.html>. ["Diakses pada" 23 Desember 2019].

- DW News. 2016. Marine Le Pen vows to put France first at National Front party conference. <https://www.dw.com/en/marine-le-pen-vows-to-put-france-first-at-national-front-party-conference/a-37422154-0>. ["Diakses pada" 23 Desember 2019].
- Fahey, M. dan Wells, N. 2019. The places that flipped and gave the country to Trump. <https://www.cnn.com/2019/09/13/politics/trump-wins-places/index.html>. ["Diakses pada" 13 September 2019].
- France24. 2016. BBC criticised for Marine Le Pen interview on Remembrance Sunday. <https://www.france24.com/en/20161113-uk-france-usa-le-pen-lauds-trump-win-bbc-bashed-remembrance-sunday>. ["Diakses pada" 13 Juli 2019].
- France24. 2017. French presidential election 2017 second round. <http://graphics.france24.com/results-second-round-french-presidential-election-2017/>. ["Diakses pada" 14 Juli 2019].
- France24. 2017. Macron-Le Pen Presidential Platform Comparison. <http://graphics.france24.com/macron-le-pen-platform-comparison-presidential/>. ["Diakses pada" 13 September 2019].
- Goldfarb, M. 2010. BBC News World: Liberal? Are we talking about the same thing? <https://www.bbc.com/news/world-10658070> ["Diakses pada" 22 April 2019].
- Gallup News. 2017. Immigration. <https://news.gallup.com/poll/1660/immigration.aspx> ["Diakses pada" 16 Oktober 2019].
- History Television. 2018. Enlightenment. <https://www.history.com/topics/british-history/enlightenment> ["Diakses pada" 22 April 2019].
- History. 2009. Great Depression History. <https://www.history.com/topics/great-depression/great-depression-history> ["Diakses pada" 22 April 2019].
- Molloy, D. 2018. What is populism, and what does the term actually mean?. <https://www.bbc.com/news/world-43301423> . ["Diakses pada" 25 Februari 2019].

- Nbc News. 2015. Trump Doesn't Challenge Man's Anti-Muslim, False Obama Claims in New Hampshire. <https://www.nbcnews.com/politics/politics-news/trump-lets-questioners-anti-muslim-obama-claim-go-new-hampshire-n429536>. ["Diakses pada" 23 Desember 2019].
- Olson, Randy. 2016. How Trump's Narrative Intuition Beat Clinton and Put a Reality TV Actor in the White House. <https://businessofstory.com/podcast/brander-chief-dr-randy-olson-explains-power-trumps-narrative-intuition/>. ["Diakses pada" 13 September 2019].
- Otieno, M. O. 2017. Worldatlas: What Is The Difference Between Republicans And Democrats?. <https://www.worldatlas.com/articles/what-is-the-difference-between-republicans-and-democrats.html> ["Diakses pada" 21 April 2019].
- Pedder, S. 2016. MARINE LE PEN, L'ETRANGERE. <https://www.1843magazine.com/features/marine-le-pen-letrangere>. ["Diakses pada" 23 Februari 2019].
- Quartz. 2017. Le Pen is campaigning on how bad the EU is for France's economy, just as things are improving 2017. <https://qz.com/903764/le-pen-is-campaigning-on-how-bad-the-eu-is-for-frances-economy-just-as-things-are-improving/>. ["Diakses pada" 23 Desember 2019].
- Rabinowitz, K. d. 2018. The Great Recession's. https://www.washingtonpost.com/graphics/2018/business/great-recession-10-years-out/?noredirect=on&utm_term=.add23407287f. ["Diakses pada" 25 Februari 2019].
- Ross, Jamie. 2016. French Far-Right Leader Says She And Donald Trump Are Building "A New World". https://www.buzzfeed.com/jamieross/marine-le-pen-says-she-and-donald-trump-are-building-a-neww?utm_term=.gooGpQn9nL#.yen8kjy3yG . ["Diakses pada" 13 Juli 2019].
- Sandford, Alasdair. 2017. What are Marine Le Pen's policies. <https://www.euronews.com/2017/02/09/what-do-we-know-about-marine-le-pen-s-policies>. ["Diakses pada" 14 Juli 2019].

- Schultheis, E. 2017. The Atlantic : Marine Le Pen's Real Victory-Her National Front party may have lost on Sunday, but its political future is bright. <https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/05/le-pen-national-front-macron-france-election/525759/>. ["Diakses pada" 2 Januari 2019].
- The Economist. 2017. Where France's National Front is on the rise. <https://www.economist.com/graphic-detail/2017/03/02/where-frances-national-front-is-on-the-rise>. ["Diakses pada" 2 Januari 2019].
- The Wall Street Journal. 2015. "Donald Trump Transcript: 'Our Country Needs a Truly Great Leader'—Washington Wire—WSJ". <https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/09/26/the-first-trump-clinton-presidential-debate-transcript-annotated/>. ["Diakses pada" 23 Desember 2019].
- The New York Times. 2017. In Their Own Words: Marine Le Pen and Emmanuel Macron. <https://www.nytimes.com/2017/05/05/world/europe/emmanuel-macron-marine-le-pen-quotes.html>. ["Diakses pada" 23 Desember 2019].
- Walker, A. 2016. Thw BBC News : What is the French economic problem?. <https://www.bbc.com/news/business-36152571>. ["Diakses pada" 2 Januari 2019].
- Washingtonpost. 2016. The first Trump-Clinton presidential debate transcript, annotated. <https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/09/26/the-first-trump-clinton-presidential-debate-transcript-annotated/>. ["Diakses pada" 23 Desember 2019].
- Washingtonpost. 2019. Trump's most insulting — and violent — language is often reserved for immigrants. <https://www.washingtonpost.com/politics/2019/10/02/trumps-most-insulting-violent-language-is-often-reserved-immigrants/> ["Diakses pada" 23 Desember 2019].